

LAPORAN AKHIR ASSESSMENT



PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

DI PT SARINAH (PERSERO) TAHUN BUKU 2018



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
I. RINGKASAN EKSEKUTIF	3
II. SIMPULAN DAN REKOMENDASI	5
2.1 Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan	5
2.2 Pemegang Saham dan RUPS	7
2.3 Dewan Komisaris	8
2.4 Direksi	9
2.5 Pengungkapan Informasi dan Transparansi	11
III. PROFIL PERUSAHAAN DAN METODOLOGI	12
3.1 Profil PT Sarinah (Persero)	12
3.2 Visi dan Misi PT Sarinah (Persero)	13
3.3 SIKAP DASAR DAN BUDAYA PERUSAHAAN	13
3.4 Metodologi <i>Assessment</i> GCG	14
3.4.1 Tujuan <i>Assessment</i> GCG	14
3.4.2 Parameter Penilaian	14
3.4.3 Pengumpulan dan Penilaian Data	15
3.4.4 Pelaporan	17
IV. URAIAN HASIL PENILAIAN/EVALUASI DI PT SARINAH (PERSERO)	18
4.1 ASPEK KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN	18
4.2 ASPEK PEMEGANG SAHAM DAN RUPS	33
4.3 ASPEK DEWAN KOMISARIS	61
4.4 ASPEK DIREKSI	113
4.5 PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI	189

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

PT Sarinah (Persero) telah melaksanakan *Assessment* implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) untuk periode tahun buku 2018 sesuai dengan Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment* penerapan GCG oleh Kementerian BUMN, yaitu berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Ruang lingkup *Assessment* GCG ini meliputi aspek-aspek terkait dengan pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsi-prinsip GCG, yaitu *Tranparansi* (*Tranparency*), *Akuntabel* (*Accountability*), *Bertanggung jawab* (*Responsible*), *Kemandirian* (*Independency*), dan *Kewajaran* (*Fairness*). Tujuan dari pelaksanaan *assessment* GCG di PT Sarinah (Persero) pada tahun buku 2018, yaitu:

- a. Menguji dan menilai penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan dengan kondisi nyata yang diterapkan di PT Sarinah (Persero), melalui pemberian skor/nilai terhadap penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG.
- b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di PT Sarinah (Persero), serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria kesesuaian prinsip-prinsip GCG dengan implementasi penerapan GCG.
- c. Memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi GCG di PT Sarinah (Persero) sejalan dengan *best practices* penerapan GCG.
- d. Memonitor konsistensi penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG di lingkungan PT Sarinah (Persero).

Implementasi terhadap prinsip-prinsip GCG serta fasilitasi terhadap *hard-structure* dan *soft-structure* GCG di lingkungan PT Sarinah (Persero) merupakan salah satu tanggung jawab Manajemen PT Sarinah (Persero), sehingga pelaksanaan *Assessment* GCG merupakan bagian dari proses implementasi GCG secara berkelanjutan dan sekaligus menjadi acuan perkembangan penerapan GCG untuk dapat semakin berkembang dan pada akhirnya akan menjadi cerminan perilaku budaya Perusahaan yang baik.

Assessment penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) tahun buku 2018 memperoleh total nilai/skor 8,04. Dengan kualifikasi "BAIK". Selanjutnya ringkasan Hasil Penilaian/Evaluasi atas Penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) tahun buku 2018, sebagai berikut :

Ringkasan Hasil Penilaian/Evaluasi atas Penerapan *Good Corporate Governance* pada Tahun Buku 2018

ASPEK PENGUJIAN/ INDIKATOR/PARAMETER	BOBOT	CAPAIAN TAHUN BUKU 2018		KUALIFIKASI	
		SKOR	CAPAIAN%		
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,000	4,89	69,92%	Cukup Baik
2	Pemegang Saham dan RUPS	9,000	8,85	98,32%	Sangat Baik
3	Dewan Komisaris	35,000	28,92	82,62%	Baik
4	Direksi	35,000	31,37	89,64%	Sangat Baik
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,000	7,01	77,85%	Baik
6	Aspek Lainnya	5,000			
SKOR KESELURUHAN		100,000	81,04		
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) adalah "BAIK"					

Mengetahui,

Direktur Utama

Komisaris Utama

Gusti Ngurah Putu Sugiarta Yasa

Bambang Rantam Sariwanto

II. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Assessment penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) tahun buku 2018 telah mengacu pada Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16 /S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagai parameter yang absah bagi sebuah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN memiliki beberapa aspek kunci penilaian atau faktor pengujian dalam rangka memonitor dan mengevaluasi bentuk penerapan GCG yang telah berjalan di suatu BUMN. Adapun faktor pengujian tersebut terdiri dari 6 (enam) aspek yang dijabarkan dalam 43 (empat puluh tiga) indikator dan 153 (seratus lima puluh tiga) parameter pengujian, yaitu:

- I. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan;
- II. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;
- III. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
- IV. Direksi;
- V. Pengungkapan Informasi dan Transparansi; serta
- VI. Aspek Lainnya.

Hasil *assessment* penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) tahun buku 2018 memperoleh skor penilaian sebesar 81,04 dengan predikat kualifikasi "BAIK". *Assessment* Penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) tahun buku 2018 menghasilkan beberapa rekomendasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang Baik di PT Sarinah (Persero). Adapun rekomendasi tersebut dijabarkan dalam aspek-aspek sebagai berikut:

2.1 Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan.

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan, skor yang dicapai **4,89** dari bobot sebesar **7,00** atau setara dengan **69,92%**. Hal ini memperlihatkan bahwa

komitmen penerapan GCG secara berkelanjutan di PT Sarinah (Persero) telah berjalan **Cukup Baik**.

Pada aspek ini, hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh PT Sarinah (Persero), sebagai berikut:

No.	Rekomendasi (<i>Area of improvement</i>)	Nomor Indikator (Parameter)
1	Agar Perusahaan meninjau dan memutakhirkan secara berkala atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku (COC).	1 (1)
2	Agar seluruh Karyawan menandatangani secara berkala pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku.	2 (4)
3	Agar dalam proses <i>induction</i> (pengenalan) bagi karyawan baru memasukkan materi Pedoman Perilaku dan peraturan teknis/pedoman pelaksanaan.	2 (4)
4	Agar dilakukan perbaikan pengukuran peningkatan pemahaman terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku oleh Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan karyawan perusahaan.	2 (4)
5	Agar Perusahaan melakukan Evaluasi (review), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di perusahaan dengan menindak lanjuti AOI tahun sebelumnya.	3 (5)
6	Agar dilakukan perbaikan pengukuran peningkatan pemahaman Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan terhadap kebijakan Pengendalian Gratifikasi.	5 (10)
7	Agar di dalam Kebijakan/ketentuan tentang gratifikasi memuat Komitmen Dewan Komisaris serta sanksi atas penyimpangan ketentuan gratifikasi.	5 (10)
8	Agar dilakukan kegiatan sosialisasi atas kebijakan <i>whistle blowing system</i> kepada <i>stakeholders</i> perusahaan, terutama untuk pihak eksternal.	5 (11)
9	Agar dilakukan pengukuran pemahaman terhadap kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada Dewan	5 (12)

	Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan karyawan perusahaan.	
10	Agar Perusahaan mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi memuat pengelolaan gratifikasi, pelaporan serta peninjauan dan penyempurnaan berkala terhadap perangkat pendukung.	5 (12)
11	Agar di dalam Kebijakan/ketentuan mengenai pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (<i>whistle blowing system</i>) memuat Kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran dan Infrastruktur <i>Whistle Blowing System</i> .	6 (13)
12	Agar terdapat sarana/media perusahaan yang mudah diakses oleh pihak eksternal stakeholder untuk mendukung pelaksanaan kebijakan <i>whistle blowing system</i> .	6 (14)
13	Agar pelaporan atas pelaksanaan kebijakan terkait pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (<i>whistle blowing system</i>) dapat dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.	6 (15)

2.2 Pemegang Saham dan RUPS

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Pemegang Saham dan RUPS, skor yang dicapai adalah **8,85** dari bobot sebesar **9,00** atau setara dengan presentase pencapaian sebesar **98,32%**. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Pemegang Saham dan RUPS telah berjalan dengan **Sangat Baik**. Pada aspek ini, hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

No.	Rekomendasi (<i>Area of improvement</i>)	Nomor Indikator (Parameter)
1	Agar RUPS/Pemilik Modal menetapkan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen paling sedikit 20% dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara eksplisit dalam keputusan pengangkatannya.	8 (24)
2	Agar RUPS/Pemilik Modal dalam pengesahan Kontrak Manajemen tidak hanya target kinerja kolejal namun memuat target kinerja (Individu) Direksi.	10 (30)

2.3 Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Dewan Komisaris, skor yang dicapai adalah **28,92** dari bobot sebesar **35,00** atau setara dengan presentase pencapaian sebesar **82,62%**. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Dewan Komisaris telah berjalan dengan **Baik**. Pada aspek ini, hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

No.	Rekomendasi (<i>Area of improvement</i>)	Nomor Indikator (Parameter)
1	Agar Perusahaan membuat kebijakan terkait pelatihan bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	13 (42)
2	Agar dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris memuat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana Kerja membahas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau RUPS/Pemilik Modal. ▪ Rencana Kerja tentang pengawasan efektivitas pelaksanaan audit eksternal. ▪ Rencana Kerja pembahasan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan. 	14 (45)
3	Agar Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.	16 (57)
4	Agar Dewan Komisaris melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit internal melalui: (1) telaah atas efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit SPI (2) telaah atas kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit internal; (3) kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil audit internal; dan (4) telaah rencana kerja pengawasan dan pelaksanaannya; (5) manajemen fungsi SPI.	17 (62)
5	Agar Dewan Komisaris membuat kebijakan dan prosedur peran Dewan Komisaris dalam pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan serta pelaksanaannya.	18 (65)

6	Agar Dewan Komisaris menetapkan kebijakan dan kriteria seleksi bagi calon Direksi dan pengusulan calon tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal serta pelaksanaannya.	19 (66)
7	Agar Dewan Komisaris melakukan telaah atas hasil <i>assessment</i> /review atas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, GCG Code dan kebijakan/ketentuan teknis lainnya, serta memantau tindak lanjut <i>area of improvement</i> hasil <i>assessment</i> GCG oleh Direksi.	21 (70)
8	Agar Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris.	21 (71)
9	Agar Pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris dilengkapi, antara lain mengatur: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya ▪ Pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi dan Dewan Komisaris 	22 (72)
10	Agar Dewan Komisaris memiliki rencana penyelenggaraan rapat internal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dihadiri Direksi (Rapat Gabungan), dengan jumlah dan waktu penyelenggaraan rapat sesuai ketentuan yang berlaku.	22 (73)
11	Agar Sekretaris Dewan Komisaris membuat Risalah Rapat internal Dewan Komisaris.	22 (74)
12	Agar Komite Audit melakukan pemutakhiran Piagam Komite secara berkala.	24 (81)
13	Agar dalam Program kerja tahunan Komite Audit turut memuat <i>Self-assessment</i> kinerja Komite Audit.	24 (81)
14	Agar Risalah Rapat Komite Dewan Komisaris dapat dibuat pada setiap penyelenggaraan rapat. Memuat hasil-hasil analisis, telaahan, dan evaluasi atas acara yang diagendakan, serta risalah asli dari setiap Rapat Komite Dewan Komisaris diserahkan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk disimpan di perusahaan.	24 (81)

2.4 Direksi

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Direksi, skor yang dicapai adalah **31,37** dari bobot sebesar **35,00** atau setara dengan presentase pencapaian sebesar **89,64%**. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek

Direksi telah berjalan dengan **Sangat Baik**. Pada aspek ini, hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

No.	Rekomendasi (<i>Area of improvement</i>)	Nomor Indikator (Parameter)
1	Agar Sarinah membuat kebijakan tentang pedoman penyusunan SOP di perusahaan.	26 (87)
2	Agar Sarinah melakukan peninjauan dan penyempurnaan SOP secara berkala.	26 (87)
3	Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan sehingga tidak terdapat jabatan yang kosong.	27 (91)
4	Agar Sarinah dalam pengukuran kinerja unit dan jabatan dalam organisasi didukung dengan aplikasi komputer.	28 (95)
5	Agar Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diantaranya membuat laporan pencapaian kinerja individu (Direktorat).	28 (98)
6	Agar Direksi menetapkan <i>Information Technology Detail Plan</i> (ITDP) sebagai penjabaran lebih lanjut dari ITMP.	28 (100)
7	Agar Direksi melakukan audit atas TI.	28 (100)
8	Agar Sarinah secara konsisten melakukan sertifikasi atas kebijakan mutu (sistem pengendalian mutu produk).	28 (101)
9	Agar Sarinah menetapkan kebijakan/program pendidikan dan pelatihan untuk memberikan peningkatan <i>knowledge, skill</i> dan <i>ability</i> yang dapat digunakan meningkatkan efektivitas kinerja karyawan dan kebijakan evaluasi kinerja pasca pendidikan dan pelatihan untuk mengukur hasil-hasil pendidikan dan pelatihan.	28 (103)
10	Agar Sarinah melakukan sosialisasi Kebijakan manajemen risiko kepada seluruh karyawan perusahaan.	29 (106)
11	Agar Direksi melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	29 (106)
12	Agar Sarinah melakukan survey tingkat kepuasan pemasok.	31 (112)

13	Agar Sarinah melengkapi Pedoman/tata tertib Rapat Direksi, antara lain mengatur: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tata penyusunan risalah rapat ▪ Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya ▪ Pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terkait dengan usulan Direksi. 	34 (123)
14	Agar Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang tertuang di dalam Risalah Rapat BOD.	34 (127)
15	Agar SPI/Fungsi Audit Internal melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal.	35 (129)
16	Agar dalam penyusunan Kerja Pengawasan Tahunan/PKPT (Rencana Audit Tahunan) dilakukan dengan pendekatan risiko (<i>risk based auditing</i>).	35 (130)
17	Agar SPI/fungsi Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya dengan memberikan sertifikasi profesi untuk Pimpinan Fungsi Audit Internal dan seluruh anggota staf SPI.	35 (129)
18	Sekretaris Perusahaan harus memastikan bahwa risalah rapat direksi yang dibuat mencantumkan <i>dissenting opinion</i> (jika ada), dinamika rapat, dan hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya.	36 (132)
19	Agar Sekretaris Perusahaan membuat Laporan/hasil telaah tingkat kepatuhan perusahaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	36 (132)
20	Agar Melakukan pemanggilan RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan.	37 (134)

2.5 Pengungkapan Informasi dan Transparansi

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi, skor yang dicapai adalah **7,01** dari bobot sebesar **9,00** atau setara dengan presentase pencapaian sebesar **77,85%**. Hal ini berarti bahwa secara umum

penerapan GCG untuk Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi telah berjalan dengan **Baik**. Pada aspek ini, hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

No.	Rekomendasi (<i>Area of improvement</i>)	Nomor Indikator (Parameter)
1	Agar Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting.	38 (136)
2	Agar Perusahaan menetapkan kebijakan tentang pengelolaan dan pemutakhirkan website.	39 (138)
3	Agar konten Laporan Tahunan dilengkapi sesuai dengan ketentuan SK 16, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyajikan informasi keuangan (laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, rasio-rasio keuangan secara umum dan yang relevan dengan industri perusahaan) dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku. ▪ Struktur Organisasi dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan. ▪ Komite manajemen risiko belum mencakup Uraian pelaksanaan kegiatan komite pemantauan risiko. ▪ Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen. 	40 (146)
4	Agar Perusahaan dapat berpartisipasi dalam ajang award bidang publikasi dan keterbukaan informasi.	41 (151)

III. PROFIL PERUSAHAAN DAN METODOLOGI

3.1 Profil PT Sarinah (Persero)

PT Berawal dari keinginan Ir. Soekarno sebagai Presiden pertama RI untuk menghargai dan memuliakan nama seorang pengasuhnya yang berasal dari kalangan bawah, bernama "SARINAH", maka diabadikanlah sebuah nama pada Departemen Store pertama di Indonesia pada tahun 1962, tepatnya tanggal 17 Agustus, yang kemudian dicanangkan sebagai tahun berdirinya PT Sarinah(Persero).

Sarinah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang ritel. Didirikan berdasarkan Akta Nomor 33 tanggal 17 Agustus 1962 dengan nama PT Department Store Indonesia, Sarinah merupakan pelopor bisnis ritel modern di Indonesia. Pada awal berdirinya, Sarinah diharapkan berfungsi sebagai distributor, stimulator, stabilisator harga, bahkan sebagai integrator yang mempunyai peran sebagai penghubung antara kepentingan produsen.

Melalui penerapan GCG secara terencana, sistemik, dan konsisten, PT Sarinah (Persero) tidak saja mampu beroperasi secara efisien, bernilai tambah dan kompetitif secara finansial namun lebih dari itu PT Sarinah (Persero) mampu memitigasi dan mengelola perubahan dan risiko sehingga mampu mencapai keunggulan daya saing berkelanjutan sesuai ekspektasi pemangku kepentingan dan pada akhirnya mampu menjadi *Good Corporate Citizen*.

Logo PT Sarinah (Persero)



3.2 Visi dan Misi PT Sarinah (Persero)

Semua jajaran Perusahaan harus mempunyai gambaran yang sama tentang tujuan akhir perusahaan sehingga visi dan misi yang ditetapkan mampu membawa Perusahaan mencapai tujuan yang diinginkan.

Visi

“Menjadi peritel terdepan produk unggul bercirikan budaya Indonesia”.

Misi

1. Meningkatkan perdagangan produk unggulan Indonesia yang memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan;
2. Menjadi katalis pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bidang industri kreatif bercirikan budaya bangsa;
3. Mewujudkan budaya korporasi yang unggul dan berkredibilitas tinggi;
4. Mengoptimasi seluruh aset properti perusahaan sehingga memberikan nilai tambah yang optimal bagi perusahaan.

3.3 SIKAP DASAR DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Customer Oriented

Mengutamakan kepuasan pelanggan dengan mengetahui dan memenuhi kebutuhan mereka.

Integrity

Mengutamakan kejujuran, kepercayaan dan keadilan dalam segala hal.

Teamwork

Secara berkesinambungan melakukan perbaikan dan pembaharuan yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan perusahaan sehingga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Attitude

Berperilaku sopan dan santun, amanah, *positive thinking* dan saling menghargai satu sama lain.

3.4 Metodologi Assessment GCG

3.4.1 Tujuan Assessment GCG

Tujuan pelaksanaan *assessment* penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) adalah:

1. Menyajikan gambaran (potret) kondisi penerapan GCG;
2. Mengidentifikasi bidang-bidang penerapan GCG yang mendekati atau telah mencapai praktik terbaik (*best practices*), maupun bidang-bidang yang belum mendekati atau mencapai *best practices* sehingga masih memerlukan peningkatan dan perbaikan (*areas of improvement/AOI*);
3. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk AOI guna lebih meningkatkan pelaksanaan GCG di PT Sarinah (Persero).

3.4.2 Parameter Penilaian

Berdasarkan standar alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. Indikator/parameter tersebut dikelompokan dalam 6 (enam) Faktor/Aspek Penerapan GCG yang terdiri dari:

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan;
2. RUPS/Pemegang Saham;
3. Dewan Komisaris;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi;

6. Aspek Lain.

3.4.3 Pengumpulan dan Penilaian Data

Data-data yang diperoleh selama proses pengumpulan data diolah dengan menggunakan Kertas Kerja *Assessment*. Kertas kerja penilaian/evaluasi GCG dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, *assessor* mempelajari uraian yang termuat pada kolom Aspek Penerapan GCG/Indikator/Parameter Dan faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya.
- b. Tahap kedua, *assessor* menyusun analisis kecukupan pelaksanaan GCG, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Menetapkan metode perolehan data yang akan digunakan untuk menilai setiap faktor yang diuji kesesuaian penerapannya, yaitu meliputi:
 - o *Review* Dokumen
Dokumen-dokumen Perusahaan yang relevan diperoleh *assessor* dari pihak Perusahaan melalui tim *counterpart* Perusahaan. Dalam proses ini *assessor* bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dokumen. Dokumen yang terkumpul dianalisis untuk menentukan apakah aktivitas Organ Perusahaan telah sesuai dengan parameter pengujian berdasarkan informasi dari dokumen. Simpulan hasil analisis dokumen bersifat sementara dan akan dilengkapi dengan kuesioner dan wawancara.
 - o Penyebaran Kuesioner
Pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner dilaksanakan apabila kondisi penerapan GCG tidak diperoleh dari *review* dokumen atau simpulan hasil *review* dokumen memerlukan pendalaman. Kuesioner disebarkan kepada pihak-pihak yang relevan di Perusahaan. Jawaban kuesioner akan diteliti dan ditentukan validitasnya untuk mendukung data dari *review* dokumen.
 - o Wawancara, dan/atau observasi
Materi wawancara disusun berdasarkan kesimpulan sementara dari *review* dokumen dan kuesioner. Materi wawancara adalah praktik-praktik GCG yang tidak dapat diperoleh dari metode *review* dokumen dan kuesioner.
 2. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan berdasarkan butir 1) untuk menilai pemenuhan faktor-faktor yang diuji kesesuaiannya penerapannya dalam setiap parameter/sub indikator.

3. Membandingkan pemenuhan faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya pada setiap parameter/sub indikator dengan pelaksanaan GCG sesuai data dan informasi yang diperoleh pada butir 2), yang meliputi penjelasan kelemahan dan/atau kekuatan yang dimiliki BUMN yang bersangkutan.
 4. Mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan kelemahan penerapan GCG pada seluruh faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya dalam setiap parameter/sub indikator yang memberikan usulan rekomendasi yang dituangkan pada kolom identifikasi masalah dan usulan rekomendasi.
 5. Berdasarkan butir (3) menyusun analisis pelaksanaan GCG PT Sarinah (Persero) dimaksud dan dimuat pada kolom Analisis Penerapan GCG.
- c. Tahap ketiga, setelah melakukan analisis penerapan GCG per parameter/sub indikator, penilai/*assessor* dapat mengambil kesimpulan melalui penetapan tingkat pemenuhan setiap parameter/sub indikator beserta penjelasannya, dengan berpedoman pada faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya.
- d. Untuk tingkat pemenuhan penerapan GCG oleh BUMN untuk setiap faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya dalam setiap parameter/sub indikator ditetapkan, sebagai berikut:
1. Keberadaan SOP/kebijakan/aturan main yang melandasi proses yang dilaksanakan oleh organ PT Sarinah (Persero) (Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi), termasuk kelengkapan muatan SOP/kebijakan/aturan main;
 2. Diseminasi/sosialisasi SOP/kebijakan/aturan main;
 3. Pemahaman para partisipan yang melaksanakan proses;
 4. Rencana pelaksanaan atas proses sesuai SOP/kebijakan/aturan main;
 5. Pelaksanaan proses di organ Perusahaan sesuai SOP/kebijakan/aturan main;
 6. Keluaran/output atas proses yang dilaksanakan organ Perusahaan;
 7. Kualitas keluaran/output yang dihasilkan.

Tingkat pemenuhan faktor yang diuji kesesuaian Penerapannya dikategorikan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu 0 (nol), 0.25, 0.50, 0.75 dan 1 (satu). Sebagai langkah akhir, *assessor* menetapkan nilai/skor hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG PT Sarinah (Persero) dengan menetapkan klasifikasi peringkat kualitas penerapan GCG baik per indikator aspek maupun keseluruhan,

berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tingkat	Capaian	Peringkat
1	Nilai diatas 85	Sangat Baik
2	$75 < X \leq 85$	Baik
3	$60 < X \leq 75$	Cukup Baik
4	$50 < X \leq 60$	Kurang Baik
5	Nilai ≤ 50	Tidak Baik

3.4.4 Pelaporan

Pelaporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG merupakan tahapan akhir dari kegiatan pengukuran terhadap penerapan PT Sarinah (Persero). Format laporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG, terdiri dari:

- a. Halaman judul;
- b. Daftar isi;
- c. Daftar Lampiran;
- d. Ringkasan Eksekutif;
- e. Simpulan dan Rekomendasi;
- f. Profil Perusahaan dan Metodologi.
- g. Uraian Hasil Penilaian/Evaluasi.

IV. URAIAN HASIL PENILAIAN/EVALUASI DI PT SARINAH (PERSERO)

4.1ASPEK KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN

INDIKATOR/ PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN			
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR	
1	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>) dan pedoman perilaku (<i>Code of Conduct</i>)		1,218	75,00%	0,914	
1	Perusahaan memiliki Pedoman Telola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>) yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan <u>telah</u> memiliki Pedoman <i>Good Corporate Governance (GCG Code)</i> dalam bentuk Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik GCG Code PT Sarinah (Persero) Tahun 2014. <i>GCG Code</i> <u>telah</u> ditandatangani oleh Organ BUMN (Komisaris dan Direksi) atau dikukuhkan RUPS. Hal ini terdapat di dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik GCG Code PT Sarinah (Persero) Tahun 2014. Code of GCG <u>telah</u> mengacu kepada Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) bagi Badan Usaha Milik Negara, Pedoman Sektor dan/atau peraturan sektoral. <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>) <u>belum</u> dimutakhirkan secara berkala yaitu <i>GCG Code</i> disahkan tahun 2014. 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Agar Perusahaan meninjau dan memutakhirkan secara berkala atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>). 	0,609	75,00%	0,457

INDIKATOR/ PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
2	Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan <u>telah</u> memiliki Pedoman Perilaku berupa Pedoman Prilaku (<i>Code of Conduct</i>) PT Sarinah (Persero) Tahun 2014. <i>Code of conduct</i> <u>telah</u> disahkan dengan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Pedoman Perilaku (<i>Code Of Conduct</i>) telah memuat 15 aspek pedoman perilaku, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> Pernyataan Komitmen Dewan Pengawas dan Direksi (hal.2) Nilai-nilai perusahaan (values); (hal.6) Benturan kepentingan; (hal. 10) Pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan dan pemberian donasi; (hal.7) Kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian; (8) Kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi (hal.8) Integritas Laporan Keuangan (hal. 8) Perlindungan informasi perusahaan dan intangible asset; (hal. 12) Perlindungan harta perusahaan; (hal. 5) <p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Agar Perusahaan meninjau dan memutakhirkan secara berkala atas Pedoman Perilaku (COC). 	0,609	75,00%	0,457

INDIKATOR/ PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan sosial dan politik; (hal. 9) - Etika yang terkait dengan stakeholders. (hal. 8) - Mekanisme penegakan Pedoman Perilaku termasuk pelaporan atas pelanggaran; (hal.13) - Pelanggaran dan sanksi. (hal.14) <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan <u>belum</u> melaksanakan peninjauan dan pemutakhiran berkala terhadap <i>Code of Conduct</i> pada tahun 2014. 				
2	Perusahaan melaksanakan PedomanTata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.		1,217	76,55%	0,932
3	Direksi menunjuk seorang anggota Direksi sebagai penanggungjawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yaitu Direktur Keuangan & Administrasi sesuai SK Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 024/KPTS/DIREKSI/VI/2018 tentang Struktur Organisasi Utama PT Sarinah (Persero) • <u>Telah</u> terdapat rincian tugas anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat <p><u>Hambatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 	0,456	100,00%	0,456

INDIKATOR/ PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN			
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR	
	<p>Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018</p> <p>3. Divisi Hukum dan Manajemen Risiko.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat laporan mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Dewan Komisaris Dibuktikan dengan Laporan kegiatan pemantauan <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> Tahun 2018. Terdapat Laporan Hasil <i>Assessment Penerapan Good Corporate Governance</i> Kepada Yth: Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarinah (Persero) Jakarta, 15 Desember 2018. <p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p>					
4	<p>Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>) dan Pedoman Perilaku.</p>	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan <u>telah</u> memiliki berbagai kebijakan dan panduan tambahan untuk memberikan panduan mengenai praktik yang terdapat dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG Code) antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Board manual</i> 2. Keputusan Direksi Nomor: 048/KPTS/DIREKSI/XII/2014 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku (Code of 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar seluruh Karyawan menandatangani secara berkala pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku. • Agar dalam proses induction (pengenalan) bagi karyawan baru 	0,761	62,50%	0,476

INDIKATOR/ PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>Conduct) PT Sarinah (Persero).</p> <p>3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Sarinah (Persero) dengan Ikatan Karyawan PT Sarinah (Persero) (IKS) 2015-2018.</p> <p>4. Keputusan Direksi Nomor: 019/KPTS/DIREKSI/III/2015 tentang Penambahan Diktum Ketujuh Butir (3) Pada SK Ketentuan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan PT Sarinah (Persero) Nomor: 004/KPTS/DIREKSI/II/2010.</p> <p>5. Berbagai kebijakan dan prosedur. Berbagai kebijakan dan panduan tambahan tersebut telah disosialisasikan kepada GM, Manager dan seluruh karyawan Sarinah.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan <u>telah</u> memiliki kebijakan dan panduan tambahan yang dapat memberikan panduan lebih jauh tentang berbagai perkara yang terdapat dalam Pedoman Perilaku, diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Sarinah (Persero) dengan Ikatan Karyawan PT Sarinah (Persero) (IKS) 2015-2018. Keputusan Direksi Nomor: 048/KPTS/DIREKSI/XII/2014 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG 	<p>memasukkan materi Pedoman Perilaku dan peraturan teknis/pedoman pelaksanaan.</p>			

INDIKATOR/ PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>Code) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT Sarinah (Persero).</p> <p>3. Keputusan Direksi Nomor: 019/KPTS/DIREKSI/III/2015 tentang Penambahan Diktum Ketujuh Butir (3) Pada SK Ketentuan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan PT Sarinah (Persero) Nomor: 004/KPTS/DIREKSI/II/2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah menandatangani komitmen untuk mematuhi Pedoman Perilaku berdasarkan Pernyataan Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi Jakarta, 16 Desember 2018. <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Karyawan <u>belum</u> seluruhnya menandatangani secara berkala pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku. Karena berdasarkan Lembar Daftar Penandatanganan <i>Code of Conduct</i> 2018, baru 62 dari 342 jumlah karyawan yang sudah menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku di tahun 2018. Pedoman Perilaku dan peraturan teknis/pedoman pelaksanaannya 				

INDIKATOR/ PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN			
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR	
		<u>belum</u> menjadi materi dalam proses induction (pengenalan) bagi karyawan baru.				
3	Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.		0,608	87,50%	0,532	
5	Perusahaan melakukan <i>assessment</i> terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan <i>review</i> secara berkala.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Telah</u> terdapat Penilaian GCG oleh lembaga independen PT Dinamika Pasifik Solusindo pada tahun 2017 untuk tahun Buku 2018. <u>Telah</u> terdapat Laporan Hasil Assessment dan evaluasi GCG Laporan Tahunan Sarinah 2018 hal.211 Hasil dan Penilaian Penerapan Tata Kelola. <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Belum</u> terdapat Evaluasi (review), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di perusahaan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian. 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Agar Perusahaan melakukan Evaluasi (review), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di perusahaan dengan menindak lanjuti AOI tahun sebelumnya. 	0,304	75,00%	0,228
6	Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu unsur <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang dituangkan dalam Kontrak	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan Telah memiliki KPI (Kolegial) dalam Kontrak Manajemen Tahun 2018 dimana salah satu aspek yang tercantum di dalamnya adalah aspek pelaksanaan Tata Kelola <p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,304	100,00%	0,304	

INDIKATOR/ PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
Manajemen.	<p>Perusahaan yang baik dimana dalam KPI tersebut adalah melakukan <i>Assessment</i> GCG dengan target skor sebesar 86.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat tingkat pencapaian yang memadai atas KPI mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik berdasarkan hasil <i>assessment</i> GCG Tahun Buku 2017 memperoleh score 88,51. <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
4	Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).		1,370	100,00%	1,370
7	Perusahaan memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi Dewan Komisaris Pengawas, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> Terdapat kebijakan/SOP tentang pengelolaan terhadap kepatuhan dan penyampaian LHKPN, terdapat Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 054/KPTS/DIREKSI/X/2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Sarinah (Persero). • <u>Telah</u> Terdapat kebijakan/SOP tentang pengelolaan terhadap kepatuhan dan penyampaian LHKPN. Tertuang di dalam Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: <p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u> -</p>	0,609	100,00%	0,609

INDIKATOR/ PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>054/KPTS/DIREKSI/X/2017tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Sarinah (Persero).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> Terdapat keputusan Direksi tentang pejabat perusahaan yang ditugaskan melaksanakan koordinasi dengan KPK berkaitan dengan pengelolaan LHKPN di lingkungan perusahaan. Terdapat Surat Direksi nomor: 1109/DIREKSI/E/XI/2017perihal: Admin Instansi dan Admin Unit Kerja PT Sarinah (Persero) kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN - KPK Admin Instansi PT Sarinah (Persero): Nama: Nina Fatmahwati Jabatan: Manager GCG & Manajemen Risiko. Admin Unit Kerja PT Sarinah (Persero): Nama: Elly Kusmiyati Jabatan: Asisten Manager GCG Jakarta, 23 November 2017. • <u>Telah</u> Terdapat kebijakan/peraturan mengenai pemberian sanksi terhadap Penyelenggara Negara yang belum memyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 054/KPTS/DIREKSI/X/2017tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 				

INDIKATOR/ PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Sarinah (Persero) KEENAM: Penyelenggara Negara di PT Sarinah (Persero) yang lalai dan tidak memenuhi kewajiban mengisi dan menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor: 28 tahun 1999 bahwa kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perusahaan yang berlaku.</p> <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
8	<p>Penyelenggara Negara/Wajib Laporan memahami kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.</p> <p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang LHKPN kepada pegawai wajib lapor LHKPN berdasarkan bukti memorandum sosialisasi, daftar hadir kegiatan Sosialisasi Pengisian LHKPN Terdapat Daftar Hadir Acara: Sosialisasi e-LHKPN Tanggal: 6 Maret 2018 Waktu: Jam 09.00 – Selesai Tempat: Ruang Rapat Arjuna Sosialisasi Personal untuk LHKPN 19 Maret 2019 kepada Bapak Asep Rahmat (Asst GM SPI). • Seluruh Penyelenggara Negara <u>Telah</u> mampu menyusun LHKPN secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukti dokumen 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u> -</p>	0,304	100,00%	0,304

INDIKATOR/ PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	berdasarkan Monitoring Kepatuhan Penyelenggara Negara PT Sarinah Wajib Lapor 21 Sudah Lapor 21 (100%). <u>Kelemahan</u> -				
9	Perusahaan melaksanakan kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. <u>Kekuatan</u> <ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepatuhan Penyelenggara Negara di perusahaan dalam menyampaikan LHKPN telah sepenuhnya terlaksana. Bukti dokumen berdasarkan Monitoring Kepatuhan Penyelenggara Negara PT Sarinah Wajib Lapor 21 Sudah Lapor 21 (100%). Telah terdapat pelaporan berkala tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK, terdapat progres pelaporan pada https://elhkpn.kpk.go.id. <u>Tidak</u> terdapat pemberian teguran/sanksi bagi Penyelenggara Negara yang belum/tidak menyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan. Karena sudah 100% sudah lapor. <u>Kelemahan</u> -	<u>Hambatan</u> - <u>Rekomendasi</u> -	0,457	100,00%	0,457
5	Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.		1,370	52,76%	0,723

INDIKATOR/ PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
10 Perusahaan memiliki ketentuan/kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Tela</u>h terdapat kebijakan/ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi yaitu Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 062/KPTS/DIREKSI/VIII/2013 tentang Penambahan atas Pedoman Perilaku Etika PT Sarinah (Persero) dengan Ketentuan/Kebijakan atas Pemberian dan Penerimaan Hadiah serta Donasi (Gratifikasi). • <u>Tela</u>h terdapat Kebijakan/ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi yang meliputi komitmen Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, ketentuan-ketentuan tentang gratifikasi, mekanisme pelaporan gratifikasi. Terdapat di dalam Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 062/KPTS/DIREKSI/VIII/2013 tentang Penambahan atas Pedoman Perilaku Etika PT Sarinah (Persero) dengan Ketentuan/Kebijakan atas Pemberian dan Penerimaan Hadiah serta Donasi (Gratifikasi). <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan/ketentuan tentang gratifikasi <u>belum</u> memuat Komitmen Dewan Komisaris serta sanksi atas penyimpangan ketentuan gratifikasi. 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar di dalam Kebijakan/ketentuan tentang gratifikasi memuat Komitmen Dewan Komisaris serta sanksi atas penyimpangan ketentuan gratifikasi. 	0,304	87,50%	0,266
11 Perusahaan melaksanakan upaya untuk meningkatkan	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Tela</u>h terdapat pelaksanaan 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p>	0,609	75,00%	0,457

INDIKATOR/ PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
pemahaman terhadap kebijakan/ketentuan pengendalian gratifikasi.	<p>komunikasi dan sosialisasi tentang Pengendalian Gratifikasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan perusahaan melalui Terdapat Intruksi Direktur Utama kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Insah PT Sarinah (Persero) 2. Rekanan Kerja PT Sarinah (Persero) 3. Rekanan Usaha PT Sarinah (Persero) perihal: Himbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya nomor: 026/DIREKSI/INS/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018. <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan <u>telah</u> melaksanakan kegiatan pendistribusian ketentuan dan perangkat Pengendalian Gratifikasi di lingkungan perusahaan berupa Intruksi Direktur Utama kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Insah PT Sarinah (Persero) 2. Rekanan Kerja PT Sarinah (Persero) 3. Rekanan Usaha PT Sarinah (Persero) perihal: Himbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya nomor: 026/DIREKSI/INS/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018. • <u>Telah</u> terdapat kegiatan diseminasi tentang Pengendalian Gratifikasi kepada stakeholder perusahaan. Terdapat Intruksi Direktur Utama kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Insah PT Sarinah (Persero) 	<p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar dilakukan perbaikan pengukuran peningkatan pemahaman Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan terhadap kebijakan Pengendalian Gratifikasi. 			

INDIKATOR/ PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN			
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR	
	<p>2. Rekanan Kerja PT Sarinah (Persero) 3. Rekanan Usaha PT Sarinah (Persero) perihal: Himbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya nomor: 026/DIREKSI/INS/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018.</p> <p><u>Kelemahan</u> -</p>					
12	<p>Perusahaan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.</p> <p><u>Kekuatan</u> -</p> <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Belum</u> terdapat pelaporan tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan perusahaan Laporan Gratifikasi 2018 • <u>Belum</u> terdapat pelaporan tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan perusahaan. • <u>Belum</u> terdapat peninjauan dan penyempurnaan berkala terhadap perangkat pendukung pedoman gratifikasi tahun 2018. 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar Perusahaan mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi memuat pengelolaan gratifikasi, pelaporan serta peninjauan dan penyempurnaan berkala terhadap perangkat pendukung. 	0,000	00,00%	0,000	
6	<p>Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (<i>whistle blowing system</i>).</p>		1,217	34,87%	0,424	
13	<p>Perusahaan memiliki kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada</p>	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan telah memiliki kebijakan mengenai pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan 	<p><u>Hambatan</u> -</p>	0,304	89,58%	0,272

INDIKATOR/ PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		<p>perusahaan (<i>whistle blowing system</i>).</p> <p>(<i>whistle blowing system</i>) yaitu Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 024/KPTS/DIREKSI/VIII/2013 tentang Penambahan atas Pedoman Perilaku Etika PT Sarinah (Persero) dengan Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistle Blowing</i>) terhadap Kode Etik Perusahaan.</p> <p><u>Kelemahan</u> Materi Pedoman penerapan sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistle blowing</i>) <u>belum</u> memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran; • Infrastruktur WBS. 	<p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar di dalam Kebijakan/ketentuan mengenai pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (<i>whistle blowing system</i>) memuat Kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran dan Infrastruktur WBS. 			
14	Perusahaan melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan pelaporan atas dugaan penyimpangan (<i>whistle blowing system</i>).	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat kegiatan sosialisasi kebijakan <i>whistle blowing system</i> kepada karyawan perusahaan terdapat Sosialisasi WBS ditahun 2017 dengan Surat Edaran WBS kepada Seluruh Divisi. kebijakan WBS di perbaharui setiah 2 tahun sekali. <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Belum</u> terdapat kegiatan sosialisasi kebijakan <i>whistle blowing system</i> kepada stakeholder eksternal perusahaan hanya melalui website perusahaan. 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar dilakukan kegiatan sosialisasi atas kebijakan <i>whistle blowing system</i> kepada stakeholders perusahaan, terutama untuk pihak eksternal. 	0,304	50,00%	0,152

INDIKATOR/ PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
15	Perusahaan melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (<i>whistle blowing system</i>).	<p><u>Kekuatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Tidak</u> terdapat sarana/media perusahaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan <i>whistle blowing system</i>. • <u>Tidak</u> terdapat penanganan/tindak lanjut sesuai dengan kebijakan atas pengaduan yang diterima perusahaan. • <u>Tidak</u> terdapat pelaporan atas pelaksanaan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (<i>whistle blowing system</i>). • <u>Tidak</u> terdapat pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan <i>whistle blowing</i> secara berkala. 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar terdapat sarana/media perusahaan yang mudah diakses oleh pihak eksternal stakeholder untuk mendukung pelaksanaan kebijakan <i>whistle blowing system</i>. • Agar pelaporan atas pelaksanaan kebijakan terkait pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (<i>whistle blowing system</i>) dapat dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. 	0,000	00,00%	0,000
JUMLAH ASPEK I				7,000	69,92%	4,89

4.2ASPEK PEMEGANG SAHAM DAN RUPS

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
7	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi.			2,423	100,00%	2,423
16	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat pedoman pengangkatan dan pemberhentian 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p>	0,346	100,00%	0,346

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN			
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR	
		pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi.	<p>Direksi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Direksi BUMN. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. <ul style="list-style-type: none"> Materi Pedoman pengangkatan dan pemberhentian <u>telah</u> memuat: mekanisme penjangkaran atau nominasi calon anggota Direksi, penilaian/pengujian atas kepatutan dan kelayakan (<i>fit and proper test</i>) bagi anggota Direksi. Bab 3 Permen BUMN No. 03 dan Bab 3 butir c Permen BUMN No. 03. <p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p>	<p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>			
17	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Direksi.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Telah terdapat Daftar Bakal Calon yang disetujui oleh Menteri Negara BUMN dan berisikan nama-nama yang diperoleh melalui proses penjangkaran dalam rangka memperoleh calon anggota Direksi, Berdasarkan konfirmasi Pemegang Saham terdapat Integrated Talent Management System (ITMS) untuk 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,692	100,00%	0,692	

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN			
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR	
		<p>Database Direksi, External BUMN dan External BUMN.</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan konfirmasi, UKK dilakukan oleh Lembaga Profesional dan TIM dari kementerian BUMN, dievaluasi oleh Tim terhadap bakal calon. <u>Telah</u> terdapat penetapan hasil akhir UKK dan Evaluasi oleh Tim dan disampaikan kepada Pemegang Saham berdasarkan konfirmasi. Berdasarkan konfirmasi dalam pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terdapat Tim khusus berdasarkan Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan <u>telah</u> menilai semua kriteria penilaian Direksi yang ditetapkan dalam ketentuan perusahaan. Berdasarkan konfirmasi, Anggota Direksi <u>telah</u> tercantum dalam penetapan hasil UKK dan Evaluasi yang disampaikan oleh Tim. <p><u>Kelemahan</u> -</p>					
	18	<p>Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota dan komposisi Direksi.</p>	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Penetapan anggota Direksi yang definitif oleh RUPS/Pemilik Modal <u>telah</u> dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir berdasarkan berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor: SK-01/MBU/01/2017 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u> -</p>	0,520	100,00%	0,520

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Sarinah (Persero).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengangkatan Direksi dilakukan dengan Keputusan Menteri untuk Direksi Perum dan dilakukan dengan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS dan keputusan seluruh Pemegang Saham di luar RUPS untuk Direksi Persero. Berdasarkan dokumen berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor: SK-01/MBU/01/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Sarinah (Persero). • Pembidangan tugas Direksi <u>telah</u> ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-199/MBU/09/2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Sarinah (Persero). • Jumlah Direksi <u>telah</u> sesuai dengan kebutuhan perusahaan sesuai Anggaran Dasar pasal 10 <ul style="list-style-type: none"> a. Ayat (1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang diantaranya 				

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>diangkat sebagai Direktur Utama.</p> <p>b. Ayat (7) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>c. Ayat (8) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham. Anggaran Dasar PT Sarinah (Persero) Nomor: AHU-52421.AH.01.02. Tahun 2008 Nomor Anggaran Dasar 17220.</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Laporan Tahunan PT Sarinah (Persero) tahun 2018 hal 74-77 <u>telah</u> terdapat Direksi yang memiliki latar belakang pendidikan/pengetahuan dan/atau pengalaman yang sesuai dengan jenis usaha BUMN. <p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p>				

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
19	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan menetapkan ketentuan mengenai jenis-jenis jabatan rangkap anggota Direksi yang menimbulkan benturan kepentingan mengacu pada Pengaturan mengenai rangkap jabatan yang ditetapkan oleh RUPS tercantum dalam: <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER.03/MBU/02/2015 Diktum KETIGA dari SK Menteri BUMN Nomor: SK-01/MBU/01/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Sarinah (Persero). Anggaran Dasar ayat 34. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap. Ketentuan perangkapan jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan tersebut <u>telah</u> termasuk jenis-jenis perangkapan jabatan dan pengaturan/mekanisme pengunduran diri dari jabatan rangkap tersebut atau jabatan anggota Direksi, yang paling lambat 30 hari sejak terjadi perangkapan 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,346	100,00%	0,346

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			jabatan tersebut. Permen BUMN No. 03/MBU/2015 tgl. 17 Feb 2015 bab IV poin A.5 <u>Kelemahan.</u> -				
	20	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<u>Kekuatan</u> <ul style="list-style-type: none"> Penetapan pemberhentian anggota Direksi Perum <u>telah</u> dilakukan dengan keputusan Menteri; Penetapan pemberhentian anggota Direksi Persero dapat dilakukan dengan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, dan keputusan seluruh Pemegang Saham di luar RUPS. Salinan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS PT Sarinah (Persero) Nomor: SK-01/MBU/01/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan (Perseroan) PT Sarinah KESATU: Memberhentikan dengan hormat Sdri. Handriani Tjatur Setiowati sebagai Anggota Direksi Perusahaan KEDUA: Mengangkat Sdr. GNP Sugiarta Yasa sebagai Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarinah. Rencana pemberhentian anggota Direksi <u>telah</u> diberitahukan kepada yang bersangkutan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 10 	<u>Hambatan</u> - <u>Rekomendasi</u> -	0,173	100,00%	0,173

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN			
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR	
		ayat 33 Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan. <u>Kelemahan</u> -					
	21	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan respon terhadap lowongan jabatan dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	<u>Kekuatan</u> <ul style="list-style-type: none"> N/A belum pernah terdapat pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris di PT Sarinah (Persero) selama tahun 2018. <u>Kelemahan</u> -	<u>Hambatan</u> - <u>Rekomendasi</u> -	0,346	100,00%	0,346
8		RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.			1,731	94,99%	1,644
	22	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	<u>Kekuatan</u> <ul style="list-style-type: none"> Telah terdapat Pedoman Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Peraturan Pemerintah No. 45 	<u>Hambatan</u> - <u>Rekomendasi</u> -	0,346	100,00%	0,346

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman pengangkatan dan pemberhentian, <u>telah</u> mengatur mengenai: (a) penjaringan atau nominasi calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; (b) penilaian bagi calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
	23	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan konfirmasi Pemegang Saham/RUPS mencari usulan calon anggota Dewan Komisaris yang berasal dari masing-masing Pemegang Saham yakni Kementerian BUMN (Pemerintah) melalui <i>talent pool</i> dan eselon 1 Kementerian. • Pemegang Saham/RUPS melaksanakan penilaian terhadap Calon Dewan Komisaris yang berasal dari Pemegang Saham. Berdasarkan konfirmasi Pemegang Saham untuk calon Dewan Komisaris tidak dilakukan UKK karena sudah dilakukan oleh lembaga masing-masing untuk Eselon 1. • Penilaian bagi Dewan Komisaris telah mencakup semua ketentuan yang berlaku berdasarkan konfirmasi <u>telah</u> 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u> -</p>	0,519	100,00%	0,519

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>terdapat Berita acara penilaian Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan konfirmasi Penetapan Dewan Komisaris berdasarkan hasil akhir penilaian. 				
	24	<p>Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan komposisinya.</p>	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pemegang Saham <u>telah</u> menetapkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir. Terdapat dokumen: S-155/D7.MBU.4/09/2018 tentang penyampaian salinan keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-235/MBU/09/2018 tanggal 07 September 2018. Tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komsaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarinah Memberhentikan dengan hormat Sdr Eva Yuliana sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Saarinah yang diangkat berdasarkan keputusan Menteri BUMN Nomor SK-238/MBU/11/2017 tanggal 2 November 2017, dan mengangkat Sdr. Suhardi sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarinah <u>Telah</u> terdapat penetapan pengangkatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melalui RUPS/Pelantikan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Agar RUPS/Pemilik Modal menetapkan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen paling sedikit 20% dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara eksplisit dalam keputusan pengangkatannya. 	0,347	75,00%	0,260

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah anggota Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) orang, sesuai dengan jumlah Anggota Direksi sebanyak 4 (empat) orang. <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> RUPS/Pemilik Modal <u>belum</u> menetapkan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen paling sedikit 20% dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara eksplisit dalam keputusan pengangkatannya. 				
25	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Telah</u> terdapat keputusan RUPS/Pemilik Modal perusahaan (untuk Perum)/AD/peraturan lainnya yang mengatur dan menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Anggaran Dasar pasal 14 ayat 32. Telah terdapat keputusan RUPS/Pemilik Modal menetapkan jabatan-jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Anggaran Dasar pasal 14 ayat 32. <p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p>	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,346	100,00%	0,346

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
26	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Penetapan pemberhentian anggota Dewan Pengawas <u>telah</u> dilakukan dengan keputusan Menteri; Penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat dilakukan dengan keputusan RUPS secara fisik. Terdapat keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-235/MBU/09/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarinah <p>Memutuskan: KESATU Memberhentikan dengan hormat Sdr. Eva Yuliana sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarinah yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-238/MBU/11/2017 tanggal 2 November 2017, dengan ucapan terimakasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya tersebut. KEDUA : Memangkat Sdr. Suhardi sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarinah.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pada dokumen Pemberhentian Dewan Komisaris keputusan Pemegang Saham Nomor: SK-234/MBU/09/2018 TAGGAL 07 September 2018 alasan pemberhentian Dewan Komisaris 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,173	100,00%	0,173

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		<p>Memberhentikan dengan hormat.</p> <p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p>				
9	RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.			1,385	100,00%	1,385
27	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan tentang Pedoman RJPP yaitu Pedoman Tata Kelola Perusahaan hal 25 Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-102/MBU/2002, tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja Jangka Panjang BUMN. • Dewan Komisaris telah memberikan pengesahan/persetujuan terhadap prancangan RJPP atau Revisi RJPP. • Berdasarkan konfirmasi, Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal telah melakukan pembahasan/pengkajian terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP. • Pemegang Saham telah memberikan pengesahan/persetujuan terhadap prancangan RJPP atau Revisi RJPP tepat waktu yaitu selambat- 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,519	100,00%	0,519

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		<p>lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP atau Revisi RJPP secara lengkap atau sebelum tahun periode RJPP atau Revisi RJPP berjalan.</p> <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
28	<p>Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).</p>	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan Pedoman Penyusunan RKAP, berdasarkan keputusan menteri BUMN Nomor Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencan Kerja Anggaran Perusahaan BUMN. • Pembahasan/pengkajian/penelaahan terhadap rancangan RKAP oleh RUPS, telah didahului oleh pemaparan Direksi atas hal-hal yang diagendakan untuk diputuskan oleh RUPS/Pemilik Modal tertuang di dalam RKAP 2018 Outline Nomor 10 Terdapat risalah rapat pembahasan rencana kerja dan anggaran program kemitraan dan bina lingkungann tahun 2018 PT Sarinah Nomor: RIS-28/D7.MBU.3/12/2017. • Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah menyampaikan pemaparan/ tanggapan atas hal-hal yang diusulkan oleh Direksi untuk diputuskan oleh RUPS/Pemilik 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u> -</p>	0,520	100,00%	0,520

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>Modal, di dalam Tanggapan Dewan Komisaris PT Sarinah mengenai RKAP 2018 dan RKA PKBL tahun 2018 Surat tanggapan: atas RKAP tahun 2018 dengan nomor: 1/DEKOM/1/2018 TANGGAL 10 Januari 2018 tentang tanggapan atas RKAP tahun 2018 dan RKA program Bina Lingkungan tahun 2018 PT Sarinah Surat Nomor : 30/DEKOM/XII/2017 tanggal 29 november 2017 tentang usulan Indikaor Operasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal <u>telah</u> memberikan pengesahan/ persetujuan terhadap rancangan RKAP tertuang di dalam Lembar Persetujuan Keputusan RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 PT Sarinah (Persero) Jakarta, 29 Desember 2017. • RUPS <u>telah</u> memberikan pengesahan/persetujuan rancangan RKAP tepat waktu tertuang di dalam Lembar Persetujuan Keputusan RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 PT Sarinah (Persero) Jakarta, 29 Desember 2017. <p><u>Kelemahan</u> -</p>				

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN			
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR	
	29	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS/Pemilik Modal.	<u>Kekuatan</u> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Konfirmasi Pemegang Saham tidak terdapat Usulan Direksi yang perlu mendapatkan persetujuan RUPS pada tahun 2018. <u>Kelemahan</u> <p>-</p>	<u>Hambatan</u> <p>-</p> <u>Rekomendasi</u> <p>-</p>	0,346	100,00%	0,346
10		RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.			2,077	96,88%	2,012
	30	RUPS/Pemilik Modal memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	<u>Kekuatan</u> <p>Penilaian Kinerja Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah terdapat sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi (kolegial dan individu), yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan tertuang di dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN Pasal 30 ayat (5) ukuran 	<u>Hambatan</u> <p>-</p> <u>Rekomendasi</u> <ul style="list-style-type: none"> Agar RUPS/Pemilik Modal dalam pengesahan Kontrak Manajemen tidak hanya target kinerja kolegial namun memuat target kinerja (Individu) Direksi. 	0,346	81,25%	0,281

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>kinerja utama atau <i>Key Performance Indicator</i> dan/atau tingkat kesehatan ditetapkan oleh RUPS/ Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ukuran kinerja utama (<i>key performance indicator</i>) dan tingkat kesehatan BUMN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah terdapat Kontrak Manajemen yang memuat target kinerja kolegal, yang disahkan/disetujui Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal tertuang di dalam RKAP Outline 2 terdapat Kontrak Manajemen Persetujuan dan Pengesahan kontrak manajemen (<i>Key Performance Indicators</i>) antara kuasa menteri BUMN selaku Pemegang Saham PT Sarinah (Persero) dengan Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarinah (Persero). <p>Penilaian Kinerja Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat sistem/pedoman penilaian kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (majelis), yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan. Berdasarkan Board Manual hal 35 Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris Per-Men No. PER-12/MBU/2012 Pasal 29 serta <i>Key Performance Indicators</i> Dewan Komisaris 2017. • Pemilik Modal telah memberikan 				

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>penilaian Kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (majelis) berdasarkan laporan kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Berdasarkan RKAP Outline 2 terdapat Kontrak Manajemen Persetujuan dan Pengesahan kontrak manajemen (Key Performance Indicators) antara kuasa menteri BUMN selaku Pemegang Saham PT Sarinah (Persero) dengan Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarinah (Persero).</p> <ul style="list-style-type: none"> RUPS/Pemilik Modal telah memberikan penilaian Kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (majelis) berdasarkan laporan kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, tertuang di dalam Risalah Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sarinah Nomor: 59.- 1. Keputusan Agenda 1: -Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas). Penilaian kinerja telah dituangkan dalam Risalah RUPS. <p><u>Kelemahan</u> Penilaian Kinerja Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Belum</u> memuat target kinerja Direksi 				

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>secara individu pada Kontrak Manajemen</p> <ul style="list-style-type: none"> RUPS/Pemilik Modal <u>belum</u> memberikan penilaian Kinerja Direksi Individu. 				
	31	RUPS menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Telah</u> terdapat pedoman gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diantaranya memuat tentang : (1) formula perhitungan gaji/honorarium; (2) Formula perhitungan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas tersebut memperhatikan pendapatan, aktiva, tingkat inflasi, serta mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur (<i>benchmark</i>), kondisi persaingan usaha (<i>competitiveness</i>) atau kompleksitas usaha, dan kelangkaan Sumber Daya Manusia. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER06/MBU/06/2018 tanggal 4 Juni2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN. Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal telah menetapkan tantiem/insentif kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,346	100,00%	0,346

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Direksi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan tertuang di dalam surat Nomor: S-516/MBU/D2/05/2019 Perihal: Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) Tahun 2019 31 Mei 2019.</p> <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
	32	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan auditor eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan perusahaan.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal <u>telah</u> menetapkan pedoman penunjukan audit eksternal mengacu pada: <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang BUMN Pasal 71 ayat (1) pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan dilakukan oleh Auditor Eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN Pasal 31 Auditor Eksternal ayat (1) yang 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u> -</p>	0,346	100,00%	0,346

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>menyatakan bahwa Laporan Keuangan Tahunan BUMN diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS/Menteri dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>3. Anggaran Dasar pasal 15 ayat (10) Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan konfirmasi Pemegang Saham <u>telah</u> menyerahkan penunjukan calon auditor eksternal kepada Dewan Komisaris. • <u>Telah</u> terdapat penunjukan auditor eksternal yang akan mengaudit Laporan Keuangan yang telah disetujui oleh Pemegang Saham, berdasarkan dokumen Keputusan RUPS Agenda 3: <ul style="list-style-type: none"> -Menetapkan kembali KAP Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) -Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan 				

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		lainnya yang Wajar bagi KAP tersebut. <u>Kelemahan</u> -				
33	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	<u>Kekuatan</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat pedoman penyusunan laporan tahunan (<i>annual report</i>) dan laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal tertuang di dalam Pedoman penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan tentang Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tercantum dalam Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 23 ayat (1), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 ayat (2) • <u>Telah</u> terdapat telaahan terhadap laporan tahunan (termasuk laporan keuangan) dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dilakukan oleh Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal berdasarkan dokumen Risalah Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarinah Nomor: 59.-. • <u>Telah</u> terdapat keputusan RUPS tentang memberikan/tidak 	<u>Hambatan</u> - <u>Rekomendasi</u> -	0,520	100,00%	0,520

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>memberikan pembebasan tanggung jawab terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, berdasarkan dokumen Risalah Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarinah Nomor: 59.-1. Keputusan Agenda 1:</p> <p>-Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas), dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31.</p> <p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p>				
	34	Pemegang Saham/RUPS/ Pemilik Modal menetapkan penggunaan laba bersih.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat pedoman/kebijakan deviden dalam Surat Edaran Menteri BUMN SE-05/MBU/2010 tanggal 25 Mei 2010. • <u>Telah</u> terdapat penetapan penggunaan laba bersih untuk deviden mempertimbangkan pengembangan usaha/investasi perusahaan. Pada Risalah RUPS Pertanggung Jawaban Laporan 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,346	100,00%	0,346

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Keuangan PT Sarinah (Persero) Tahun Buku 2018 Keputusan Agenda 2: Menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasian untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp. 20.767.324.016,00 (dua puluh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam belas rupiah) seluruhnya sebagai cadangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan penggunaan laba bersih untuk deviden <u>tidak</u> melanggar ketentuan perjanjian pinjaman atau ketentuan penerbitan obligasi. Risalah Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarinah Nomor: 59.-. <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
	35	Pengesahan terhadap laporan tahunan dan persetujuan terhadap laporan keuangan dilaksanakan tepat waktu.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengesahan laporan tahunan dalam RUPS/Keputusan Pemilik Modal telah dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang lampau. Berdasarkan Pelaksanaan RUPS Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan PT Sarinah (Persero) tahun buku 2018 dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2019. <p><u>Kelemahan</u> -</p>	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u> -</p>	0,173	100,00%	0,173

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
11	RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.			0,519	100,00%	0,519
36	RUPS mengambil keputusan sesuai dengan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang sah.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ketua RUPS <u>telah</u> sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan dibuktikan dalam RUPS Tahunan yang di selenggarakan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar yaitu Pasal 24 ayat 1 apabila dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka rapat umum pemegang saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang di pilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan tertuang di dalam Board Manual BAB 5 hal 49. Peserta rapat <u>telah</u> memenuhi kuorum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan. Terpenuhinya persyaratan yuridis sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, maka RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat. <p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p>	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,173	100,00%	0,173

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
37	RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Saham <u>telah</u> diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Berdasarkan Risalah RUPS Laporan Tahunan tanggal 17 Mei 2019 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018, terdapat jalannya RUPS, dimana Komisaris membuka dan menyerahkan pimpinan rapat kepada Kuasa Pemegang Saham Negara RI. Pimpinan Rapat menyatakan bahwa dengan dipenuhinya persyaratan yuridis sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, maka RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat. • Dalam hal anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya keputusan RUPS tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha perusahaan, keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan wajar para pemangku kepentingan hal itu <u>telah</u> sesuai Risalah Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarinah Nomor: 59.-. • RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,346	100,00%	0,346

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		<p>dan menyetujui tambahan mata acara RUPS. Keputusan atas mata acara tambahan tersebut harus disetujui dengan suara bulat.</p> <p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p>				
12	Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.			0,865	100,00%	0,865
38	Pemegang Saham/Pemilik Modal memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan konfirmasi dan analisis dokumen sepanjang 2018 <u>tidak</u> terdapat arahan Pemegang Saham dalam RUPS maupun dalam Keputusan Pemegang Saham tentang persetujuan transaksional. <u>Telah</u> terdapat arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Berdasarkan konfirmasi laporan hasil assessment GCG dilaporkan kepada Pemegang Saham, Berdasarkan konfirmasi Pemegang Saham hasil dari Assessment untuk Semua BUMN di laporkan kepada asdep manajemen eksekutif untuk tindak lanjut AOI Aspek Pemegang Saham. Pemegang Saham <u>telah</u> melakukan upaya-upaya menindaklanjuti <i>area of</i> 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pemegang Saham segera menindaklanjuti <i>area of improvement</i> yang menjadi kewenangannya. 	0,346	100,00%	0,346

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p><i>improvement</i> yang dihasilkan dari assessment atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Berdasarkan konfirmasi Pemegang Saham hasil dari Assessment untuk Semua BUMN di laporkan kepada asdep manajemen eksekutif untuk tindak lanjut AOI Aspek Pemegang Saham.</p> <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
	39	Pemegang Saham/Pemilik Modal tidak mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan konfirmasi Pemegang Saham <u>terdapat</u> penugasan import Beras Ketan kepada PT Sarinah (Persero) pada tahun 2018. <p><u>Kelemahan</u> -</p>	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u> -</p>	0,173	100,00%	0,173
	40	Pemegang Saham/Pemilik Modal merespon terhadap informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian perusahaan yang signifikan	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> RUPS/Pemilik Modal <u>telah</u> menetapkan sistem penerimaan laporan mengenai gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tertuang di dalam Surat Kementrian BUMN Nomor: S-1189/MBU/D2/11/2018 Hal: Tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2018 PT Sarinah (Persero) Jakarta, 21 November 2018. Selama tahun 2018 tidak terdapat gejala penurunan kinerja dan 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u> -</p>	0,346	100,00 %	0,346

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	kerugian perusahaan yang signifikan. <u>Kelemahan</u> -				
JUMLAH ASPEK II			9,000	98,32%	8,85

4.3ASPEK DEWAN KOMISARIS

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN			
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR	
13	Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.		1,348	83,33%	1,123	
41	Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.	<u>Kekuatan</u> <ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris <u>telah</u> menyampaikan kepada Direksi untuk diadakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat. Berdasarkan surat Undangan Rabu, 12 September 2018 Agenda : Perkenalan dan pisah sambut komisaris. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat <u>telah</u> mengikuti program pengenalan perusahaan. Terdapat Undangan Undangan Rabu, 12 September 2018 Agenda : Perkenalan dan pisah sambut komisaris. <u>Telah</u> terdapat tingkat kehadiran/keaktifan anggota Dewan Komisari tertuang dalam Daftar Hadir Pemaparan Program Pengenalan 	<u>Hambatan</u> - <u>Rekomendasi</u> -	0,674	100,00%	0,674

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Perusahaan. <u>Kelemahan</u> -				
42	Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai kebutuhan.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Tertuang di dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan RKAP PT Sarinah (Persero) tahun 2018. • <u>Telah</u> terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Terdapat <i>Certificate of Attendance</i> Muallimin Abdi PT Sarinah (Persero) as Participation on Commissioner & Directorship expand leadership program Sheraton Kuta Bali Resort, 3-4 May 2018. <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Tidak</u> terdapat kebijakan Dewan Komisaris tentang pelatihan bagi Dewan Komisaris. 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar Perusahaan membuat kebijakan terkait pelatihan bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. 	0,674	66,67%	0,449	
14	Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas dan menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan				2,127	98,45%	2,094

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		tugas Dewan Komisaris.				
43	Dewan Komisaris memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewajiban Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris Board Manual PT Sarinah (Persero) 2016 hal.9 2.2 Pembagian Kerja Komisaris. • <u>Telah</u> terdapat penetapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tentang pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Tertuang di dalam Tertuang dalam RKAP PT Sarinah (Persero) hal.26 • 3. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris • Dewan Komisaris dalam melakukan kegiatan fungsi, tuas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pembagian tugas sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Mualimin Abdi, Komisaris Utama selaku Koordinator. b. Luizah, Anggota Dewan Komisaris membidangi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kinerja Operasional 2) Investasi 3) Perusahaan dan Pelayanan 4) Audit c. Eva Juliana, Anggota Dewan Komisaris membidangi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Keuangan, perpajakan dan pendanaan 2) Penerapan GCG dan Manajemen 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,648	100,00%	0,648

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>Risiko</p> <p>3) Teknologi informasi</p> <p>d. Farid Zainuddin, Anggota Dewan Komisaris membidangi:</p> <p>1) Organisasi dan Manajemen</p> <p>2) Restrukturisasi</p> <p>3) Hukum dan Hubungan antar Lembaga</p> <p>e. Setyo Puji Hartono bertugas sebagai Sekretaris Dewan Komisaris</p> <p>f. Komite Audit dan Risiko</p> <p>Dewan Komisaris menugaskan Komite Audit dan Risiko untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2018</p> <p>g. Staf Pendukung Personil Pendukung bertugas untuk membantu kelancaran tugas-tugas Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat penugasan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagai ketua/wakil/anggota Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarinah Nomor: 2/DEKOM/Kep/X/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarinah <p>Menetapkan:</p> <p>Kedua: Mengangkat Sdr. Luizah sebagai Ketua Komite Audit PT</p>				

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Sarinah (Persero), dengan demikian susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr. Luizah sebagai Ketua; 2. Sdri. Shinta Rahma Diana sebagai anggota; 3. Sdri. Rafi Rakhmadhan sebagai anggota. <p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p>				
	44	Dewan Komisaris menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris. Secara formal, tertuang di dalam GCG Code PT Sarinah (Persero) hal.28 d. Rapat Komisaris dan RKAP Sarinah terkait 4. Mekanisme Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris. • <u>Telah</u> terdapat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan persetujuan terhadap usulan Direksi tertuang di dalam GCG Code PT Sarinah (Persero) hal.26(11) Pengambilan keputusan persetujuan terhadap usulan Direksi maksimal 7-14 hari kerja. • <u>Telah</u> terdapat ketentuan tentang tingkat kesegeraan untuk mengkomunikasikan keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada Direksi. Tertuang di dalam GCG Code PT Sarinah (Persero) 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,493	100,00%	0,493

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>hal.26(11) Pengambilan keputusan persetujuan terhadap usulan Direksi maksimal 7-14 hari kerja.</p> <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
	45	Dewan Komisaris menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat sasaran/target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada RUPS/Pemilik Modal.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> Terdapat kebijakan mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang memadai. Tertuang dalam Anggaran Dasar PT Sarinah (Persero) hal.(418) Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP. • <u>Telah</u> terdapat penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Tertuang di dalam BAB III Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018 hal.23D. Rencana Program Kerja Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Sekretariat Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) Tahun 2018. • <u>Telah</u> terdapat penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada Direksi untuk dimasukkan sebagai bagian dari RKAP. RKA Dekom 2018 Surat Dekom No. 176/DK-AK/2017 tanggal 30 November 2017 perihal Penyampaian Program Kerja dan 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris tertuang di dalam risalah rapat internal Dewan Komisaris. 	0,493	93,33%	0,460

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Rencana Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rencana kerja tahunan <u>telah</u> memuat indikator kinerja utama dan target-targetnya yang mencerminkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas <u>telah</u> disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk mendapatkan pengesahan. <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Proses penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas <u>belum</u> tertuang di dalam risalah rapat internal Dewan Komisaris. 				
	46	Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi perusahaan sesuai kewenangannya.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Telah</u> terdapat kebijakan/pedoman Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tentang informasi yang harus disediakan oleh Direksi dan kebijakan tersebut disampaikan kepada Komisaris tertuang di dalam GCG Code PT Sarinah (Persero) hal.25 poin.3 Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan. 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,493	100,00%	0,493

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> Substansi kebijakan/pedoman diantaranya <u>telah</u> memuat bentuk informasi yang disampaikan baik yang berkala maupun insidental, standar waktu penyampaiannya dan mekanisme penyampaian informasi tersebut oleh Direksi. Terdapat dalam GCG Code PT Sarinah (Persero) hal.25 poin.3 Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan. <u>Telah</u> terdapat upaya komunikasi dengan Direksi untuk meminta informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugasnya. <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
15	Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.				2,904	100,00%	2,904
47	Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Telah</u> terdapat kebijakan mengenai mekanisme pemberian persetujuan /tanggapan/ pendapat Dewan Komisaris terhadap rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi. Tertuang di dalam GCG Code PT Sarinah (Persero) hal.24 poin. <u>Tidak</u> terdapat rencana kerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u> -</p>	1,296	100,00%	1,296	

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>berkaitan dengan proses persetujuan RJPP yang disampaikan Direksi (N/A).</p> <ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris <u>telah</u> melakukan telaah terhadap rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi, terdapat Arahan Dewan Komisaris terkait RJPP Sarinah Tertuang dalam Risalah Rapat Gabungan tanggal Jumat, 21 Desember 2018. Dewan Komisaris <u>telah</u> memberikan pendapat dan saran terhadap rancangan RJPP dan disampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal untuk bahan pertimbangan keputusan RUPS/Pemilik Modal. Berdasarkan konfirmasi dengan Pemegang Saham bahwa telah terdapat dokumen usulan RJPP PT Sarinah (Persero) namun asesor belum menemukan dokumen terkait. <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
	48	Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Telah</u> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat Dewan Komisaris terhadap rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi. Tertuang dalam GCG Code PT Sarinah (Persero) hal.25 poin.7 Memberikan nasehat kepada Direksi ataupun memberikan pendapat atau saran kepada RUPS atas penyusunan 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u> -</p>	1,608	100,00%	1,608

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>berikutnya dan pelaksanaan RKAP yang merupakan penjabaran tahunan dari RJPP untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat rencana kerja Dewan Komisaris yang berkaitan dengan proses persetujuan rancangan RKAP yang disampaikan Direksi. Rencana Program Kerja Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) Tahun 2018 poin b.memantau pencapaian sasaran Perusahaan sebagaimana telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) termasuk Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). • Dewan Komisaris <u>telah</u> melakukan telaah terhadap rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Terdapat Di 5. Ragab, Selasa 23 Oktober 2018 Pembahasan Rapat: Pembahasan program kerja RKAP 2019 Lapkin s/d Prognosa akhir tahun 2018. • Proses telaah sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, baik melalui proses pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Di Notulen Rakom dan Notulen Radirkom di Bulan Nov-Des 2017 mengenai RKAP. 				

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<ul style="list-style-type: none"> Adanya hasil telaah rancangan RKAP secara tertulis tertuang di dalam Surat Dewan Komisaris Nomor: 022/DEKOM/XII/2018 Hal: Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP PT Sarinah (Persero) Tahun 2019 Kepada Kemen BUMN 20 Desember 2018. Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran terhadap rancangan RKAP dan disampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal untuk bahan pertimbangan keputusan RUPS/Pemilik Modal. Surat Dewan Komisaris Nomor: 022/DEKOM/XII/2018 Hal: Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP PT Sarinah (Persero) Tahun 2019 Kepada Menteri BUMN Jakarta, 20 Desember 2018. Tanggapan atas rancangan RKAP oleh Dewan Komisaris <u>telah</u> diberikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Board Manual. Tanggal 20 Desember 2018. <u>Telah</u> terdapat simpulan bahwa rancangan RKAP selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP. Kualitas yang <u>telah</u> memadai atas tanggapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terhadap rancangan RKAP. <p><u>Kelemahan</u> -</p>				

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
16	Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.			9,593	88,52%	8,492
49	Dewan Komisaris memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Telah</u> Terdapat kebijakan/kriteria yang ditetapkan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai informasi lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Tertuang pada GCG Code PT Sarinah (Persero) hal. 25 Komisaris berhak untuk: <ol style="list-style-type: none"> Meminta penjelasan dari Direksi dan atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan, Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi. <u>Telah</u> terdapat penyediaan bahan bacaan/referensi yang memudahkan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memperbaharui pengetahuan tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan dan/atau permintaan arahan dari Direksi tentang permasalahan yang dihadapi 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Agar Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris) yang tertuang di risalah rapat internal Dewan Komisaris. 	1,100	95,00%	1,045

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>perusahaan. Berupa Laporan Manajemen Triwulan PT Sarinah (Persero).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris <u>telah</u> melakukan telaah mengenai isu-isu terkini tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan. Didukung dengan dokumen 2. Ragab Kamis, 30 April 2018 Pembahasan Rapat: <ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan KAP untuk General Audit tahun buku 2018 - Lapkin s/d Februari 2018. • Dewan Komisaris <u>telah</u> memberikan arahan kepada Direksi berdasarkan hasil telaah mengenai isu-isu terkini tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan, termasuk pemberian persetujuan jika respon perusahaan dalam kewenangan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Arahan ini terdapat dalam surat / Notulen Ragab Kamis, 30 April 2018 Pembahasan Rapat: <ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan KAP untuk General Audit tahun buku 2018 - Lapkin s/d Februari 2018. • <u>Telah</u> terdapat respon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terkait dengan perubahan lingkungan bisnis tersebut. • <u>Tidak</u> terdapat permasalahan/tantangan (ancaman 				

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		<p>dan peluang) yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan, yang tidak direspon oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.</p> <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris) yang namun <u>belum</u> tertuang di risalah rapat internal Dewan Komisaris. 				
50	Dewan Komisaris dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari <i>stakeholders</i> (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris ataupun penyampaian oleh Direksi.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Telah</u> Terdapat mekanisme bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk merespon/menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan dari stakeholder dan menyampaikan kepada Direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan. Tertuang dalam Board manual PT Sarinah (Persero) hal.11 Komite Audit membantu Komisaris untuk hal-hal yang berkaitan dengan: <ol style="list-style-type: none"> Pengaduan Masyarakat. Tidak terdapat permasalahan hubungan dengan stakeholder yang berdampak pada kinerja perusahaan, yang tidak dibahas dalam rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. <p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p>	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,789	100,00%	0,789

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
51	Dewan Komisaris memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern perusahaan.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya. Tertuang dalam GCG Code PT Sarinah (Persero) hal.25 poin.8 Memberikan nasehat/pengawasan terhadap sistem pengendalian intern, manajemen risiko, sistem teknologi informasi, sumber daya manusia, pengadaan, manajemen mutu, dan pengawasan pengelolaan anak perusahaan. • <u>Telah</u> terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya. Tertuang dalam Rencana Program Kerja Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) Tahun 2018 d. Memastikan agar terlaksananya secara efektif sistem pengawasan internal, sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. g. Melakukan peningkatan efektivitas pengendalian internal Perusahaan, dimana Dewan Komisaris bersama Dewan Komite Audit akan melakukan 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	1,100	100,00%	1,100

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>pengawasan dan fungsi kontrol untuk sistem pengendalian internal Perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris <u>telah</u> melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya tertuang di dalam risalah rapat Ragab Jumat, 23 Maret 2018 Pembahasan Rapat: <ul style="list-style-type: none"> Pencapaian dan Laporan Kinerja s/d Februari 2018 Arahan Dewan Komisaris terkait pencapaian target RKAP 2018 Tanggapan Dewan Komisaris terkait Struktur Organisasi Poin. c Dewan Komisaris <u>telah</u> menyampaikan arahan tentang peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern kepada Direksi. <u>Telah</u> terdapat Kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris tentang peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern. <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
	52	Dewan Komisaris memberikan arahan tentang manajemen risiko perusahaan.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris <u>telah</u> memiliki kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko Perusahaan. Tertuang di dalam GCG 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Agar proses telaah yang dilakukan oleh Dewan 	1,100	95,00%	1,045

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>Code PT Sarinah (Persero) hal.25 poin.8 Memberikan nasehat/pengawasan terhadap sistem pengendalian intern, manajemen risiko, sistem teknologi informasi, sumber daya manusia, pengadaan, manajemen mutu, dan pengawasan pengelolaan anak perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan. Rencana Program Kerja Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) Tahun 2018 e. Memantau efektivitas penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dan Manajemen risiko yang ditetapkan Perusahaan. • Dewan Komisaris/Dewan Pengawas <u>telah</u> melakukan telaah atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan (termasuk rencana kerja unit manajemen risiko), tertuang di dalam risalah rapat gabungan Jumat, 23 Maret 2018. • Dewan Komisaris <u>telah</u> menyampaikan arahan tentang peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan. tertuang di dalam risalah rapat gabungan Jumat, 23 Maret 2018. 	<p>Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris) dan dituangkan di dalam risalah rapat internal Dewan Komisaris.</p>			

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <u>Telaah</u> terdapat kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tentang manajemen risiko perusahaan. <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris) <u>belum</u> tertuang di dalam risalah rapat internal Dewan Komisaris. 				
	53	Dewan Komisaris memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Telaah</u> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya, tertuang dalam GCG Code PT Sarinah (Persero) hal.25 poin.8 Memberikan nasehat/pengawasan terhadap sistem pengendalian intern, manajemen risiko, sistem teknologi informasi, sumber daya manusia, pengadaan, manajemen mutu, dan pengawasan pengelolaan anak perusahaan. <u>Telaah</u> terdapat rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya. Tertuang dalam Rencana Program Kerja Dewan Komisaris PT Sarinah 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	1,100	100,00%	1,100

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>(Persero) Tahun 2018 poin.h.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris/Dewan Pengawas <u>telah</u> melakukan telaah terhadap kebijakan sistem teknologi informasi dan pelaksanaannya, tertuang dalam risalah rapat gabungan Jumat, 23 Maret 2018. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <u>telah</u> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris). Dewan Komisaris <u>telah</u> menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi, tertuang dalam risalah rapat gabungan Jumat, 23 Maret 2018. <u>Telah</u> terdapat kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris/Pengawas tentang sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya. <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
	54	Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Telah</u> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, khususnya tentang manajemen karir di perusahaan, 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u> -</p>	1,101	100,00%	1,101

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>sistem dan prosedur promosi, mutasi dan demosi di perusahaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Terdapat dalam GCG Code PT Sarinah (Persero) hal.25 poin.8 Memberikan nasehat/pengawasan terhadap sistem pengendalian intern, manajemen risiko, sistem teknologi informasi, sumber daya manusia, pengadaan, manajemen mutu, dan pengawasan pengelolaan anak perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat mengenai kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Tertuang dalam Rencana Program Kerja Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) Tahun 2018 poin.i • Dewan Komisaris <u>telah</u> melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap terhadap kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya, tertuang di dalam risalah rapat gabungan Jumat, 23 Maret 2018. • Dewan Komisaris <u>telah</u> menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya, tertuang di dalam risalah rapat gabungan Jumat, 23 Maret 2018. • <u>Telah</u> terdapat kualitas yang memadai atas arahan Dewan 				

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		<p>Komisaris tentang kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya.</p> <p><u>Kelemahan:</u> -</p>				
55	<p>Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK).</p>	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. • <u>Telah</u> terdapat rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan tersebut. Rencana Program Kerja Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) Tahun 2018 poin. J. <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Belum</u> terdapat proses telaah terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. • Dewan Komisaris/Dewan Pengawas <u>belum</u> menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya. • <u>Belum</u> terdapat Kualitas memadai atas saran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas kebijakan akuntansi 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar Dewan Komisaris melakukan proses telaah terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan di tuangkan di dalam risalah rapat internal Dewan Komisaris. • Agara Dewan Komisaris menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya. 	1,101	55,00%	0,606

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya.			
56	Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaannya. Tertuang di dalam GCG Code PT Sarinah (Persero) hal.25 Komisaris Berkewajiban: poin.8 Memberikan nasehat/pengawasan terhadap sistem pengendalian intern, manajemen risiko, sistem teknologi informasi, sumber daya manusia, pengadaan, manajemen mutu, dan pengawasan pengelolaan anak perusahaan. • <u>Telah</u> terdapat rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. Rencana Program Kerja Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) Tahun 2018 poin.k. • Dewan Komisaris <u>telah</u> melakukan pembahasan terhadap terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya, tertuang di dalam rislaah rapat gabungan Jumat, 23 Maret 2018. • Dewan Komisaris <u>telah</u> menyampaikan arahan kepada Direksi 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	1,101	100,00%	1,101

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		<p>tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya, tertuang di dalam risalah rapat gabungan Jumat, 23 Maret 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya, tertuang di dalam risalah rapat gabungan Jumat, 23 Maret 2018. <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
57	Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya.	<p><u>Kekuatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut. Tertuang di dalam GCG Code PT Sarinah (Persero) hal.25 Komisaris Berkewajiban: poin.8 Memberikan nasehat/pengawasan terhadap sistem pengendalian intern, manajemen risiko, sistem teknologi informasi, sumber daya manusia, pengadaan, manajemen mutu, dan pengawasan pengelolaan anak perusahaan. Telah terdapat rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai tugas pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya. Rencana 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Agar Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya. 	1,101	55,00%	0,606

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		<p>Program Kerja Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) Tahun 2018 poin. L Meningkatkan mutu Perusahaan dengan cara melakukan pengawasan dan pemberian nasihat untuk rencana kerja yang akan dilakukan oleh Perusahaan agar semua pelaksanaan kegiatan dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan serta berkualitas.</p> <p><u>Kelemahan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris <u>belum</u> melakukan pembahasan terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya. Dewan Komisaris <u>belum</u> menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya. <u>Belum</u> terdapat kualitas memadai atas saran Dewan Komisaris mengenai kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya. 				
17	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.			6,479	79,07%	5,123
58	Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Telah</u> terdapat kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris atas kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar serta 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Agar proses telaah yang dilakukan oleh Dewan 	1,417	90,00%	1,275

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga. GCG Code4. Menetapkan batasan batasan nilai perbuatan hukum Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat rencana kerja Dewan Komisaris yang membahas kepatuhan direksi terhadap peraturan per-UU-an dan perjanjian dengan pihak ketiga. Rencana Program Kerja Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) Tahun 2018 poin. M Melakukan pengawasan kepada Direksi dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perjanjian dengan pihak ketiga agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. • Dewan Komisaris <u>telah</u> membahas kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga. Tertuang di Laporan Auditor Independen Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Pengendalian Intern PT Sarinah (Persero) Tahun 2018. • Telah terdapat arahan Dewan Komisaris kepada Direksi berdasarkan hasil telaahan, tertuang di Risalah Rapat Gabungan Jumat 23 	<p>Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris) dan dituangkan dalam risalah rapat internal Dewan Komisaris.</p>			

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>Maret 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris melaporkan hasil evaluasi/pembahasan tersebut kepada RUPS/Pemilik Modal dalam laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris semesteran dan tahunan, Dewan Komisaris melaporkan hasil evaluasi/pembahasan tersebut kepada RUPS/Pemilik Modal dalam laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris semesteran dan tahunan, tertuang didalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris IV. Hasil Pengawasan Tahun 2018 poin b. • <u>Telah</u> terdapat tingkat kualitas yang memadai atas evaluasi Dewan Komisaris atas kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan dan kesesuaian dengan RKAP dan/atau RJPP, tertuang di dalam Tertuang di dalam Risalah rapat gabungan Jumat, 23 Maret 2018. • <u>Telah</u> terdapat kualitas pengawasan atas kepatuhan Direksi terhadap anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta perjanjian dengan pihak ketiga, tertuang di dalam Laporan Auditor Independen Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Pengendalian Intern PT Sarinah (Persero) Tahun 2018. 				

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> Tidak pernah terjadi pelanggaran oleh Direksi. Tidak terdapat permasalahan mengenai pelanggaran, yang tidak dibahas oleh Dewan Komisaris. <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris) namun <u>belum</u> di tuangkan dalam risalah rapat internal Dewan Komisaris. 				
	59	Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP.	<p><u>Kekuatan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Telah</u> terdapat kebijakan Dewan Komisaris untuk memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan terhadap RKAP dan/atau RJPP. Terdapat dalam GCG Code PT Sarinah Memberikan nasihat kepada Direksi ataupun memberikan pendapat atau saran kepada RUPS atas penyusunan berikutnya dan pelaksanaan RKAP yang merupakan penjabaran tahunan dari RJPP untuk memenuhi ketentuan ketentuan Anggaran Dasar dan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <u>Telah</u> terdapat rencana Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKAP. Rencana Program Kerja Dewan Komisaris PT 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	1,106	100,00%	1,106

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		<p>Sarinah (Persero) Tahun 2018 poin. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat evaluasi pencapaian Perusahaan yang mencakup kesesuaian pelaksanaan program kerja (inisiatif perusahaan) dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP. Tertuang di dalam risalah rapat gabungan Jumat, 23 Maret 2018 Pembahasan Rapat: Arahan Dewan Komisaris terkait pencapaian target RKAP 2018. • Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas <u>telah</u> menandatangani Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen s.d. Triwulan III Tahun 2018. <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2018. - Laporan Manajemen Semester I Tahun 2018. - Laporan Manajemen S/D Triwulan III Tahun 2018. - Laporan Manajemen Tahun 2018 (Audited). <p><u>Kelemahan:</u> -</p>				
60	Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS/Pemilik Modal.	<p><u>Kekuatan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat mekanisme bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pemberian persetujuan/otorisasi/rekomendasi Dewan Komisaris terhadap tindakan Direksi yang memerlukan 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris memuat: Rencana Kerja 	0,966	33,33%	0,322

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>rekomendasi/persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar. GCG Code PT Sarinah (Persero) hal.25 5) Memberikan putusan terhadap usulan pembuatan hukum Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis.</p> <p><u>Kelemahan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Tidak</u> terdapat rencana kerja Dewan Komisaris untuk membahas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS/Pemilik Modal. • Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <u>belum</u> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris) dan belum tertuang di risalah rapat internal Dewan Komisaris. 	<p>membahas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS/Pemilik Modal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <u>belum</u> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris) dan dituangkan di dalam risalah rapat internal Dewan Komisaris. 			
	61	Dewan Komisaris (berdasarkan usul dari Komite Audit) mengajukan calon auditor eksternal kepada RUPS/Pemilik Modal.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat kebijakan dan prosedur Dewan Komisaris mengenai proses penunjukan calon auditor eksternal dan/atau penunjukan kembali auditor eksternal dan penyampaian usulan calon auditor eksternal kepada RUPS/Pemilik Modal. Hal ini terdapat di GCG Code Berdasarkan intruksi Dewan Komlsaris, Direksi membentuk Panitia Pengadaan Jasa KAP yang 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,778	100,00%	0,778

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>dipantau Komite Audit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat rencana kerja penunjukan calon auditor dan anggaran biaya audit eksternal dalam Rencana Kerja Dewan Komisaris. Rencana Program Kerja Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) Tahun 2018 poin N. • Dewan Komisaris melalui Komite Audit <u>telah</u> melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing perusahaan, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya. Dibuktikan dengan adanya Program Kerja Komite Audit Butir 4 dan Notulen KA ttg Proses Pemilihan Eksternal Audit. • Dewan Komisaris melalui Komite Audit <u>telah</u> melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing perusahaan, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya, berdasarkan risalah Ragab Kamis, 30 April 2018 Pembahasan Rapat: <ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan KAP untuk General Audit tahun buku 2018 - Lapkin s/d Februari 2018 • Dewan Komisaris <u>telah</u> menyampaikan kepada RUPS/Pemilik 				

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Modal alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbil jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut. Surat Dewan Komisaris Nomor: 06/DEKOM/IV/2019 Hal: Usulan Keputusan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT Sarinah (Persero) Tahun Buku 2018 Poin.7 Menetapkan kembali KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris/Dewan Pengawas <u>telah</u> mengevaluasi kinerja Auditor Eksternal sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Tertuang di dalam risalah Ragab Kamis, 30 April 2018 Pembahasan Rapat: <ul style="list-style-type: none"> Pembahasan KAP untuk General Audit tahun buku 2018. Lapkin s/d Februari 2018. <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
	62	Dewan Komisaris memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Telah</u> terdapat kebijakan Dewan Komisaris tentang pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, tertuang dalam GCG Code PT Sarinah (Persero) hal.47 Tugas Komite Audit: Melakukan penilaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Agar dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris memuat: Rencana Kerja tentang pengawasan efektivitas pelaksanaan 	1,106	67,19%	0,743

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat rencana kerja Dewan Komisaris tentang pengawasan efektivitas pelaksanaan audit internal. Rencana Program Kerja Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) Tahun 2018 poin.g Melakukan peningkatan efektivitas pengendalian internal Perusahaan, dimana Dewan Komisaris bersama Dewan Komite Audit akan melakukan pengawasan dan fungsi kontrol untuk sistem pengendalian internal Perusahaan. • <u>Telah</u> terdapat penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal melalui: (1) pemantauan kesesuaian penyelesaian progres audit dengan rencana kerjanya; (2) telaah kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik; dan (3) telaahan hasil audit eksternal dan kualitas rekomendasi audit eksternal. Tertuang dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan masukan dan pendapat kepada Direksi terkait dengan pelaksanaan audit oleh KAP Auditor Independen Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo. 	<p>audit eksternal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar Dewan Komisaris melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit internal melalui: (1) telaah atas efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit SPI (2) telaah atas kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit internal; (3) kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil audit internal; dan (4) telaah rencana kerja pengawasan dan pelaksanaannya; (5) manajemen fungsi SPI. 			

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>b. Melakukan pembahasan dengan Direksi maupun KAP mengenai hasil audit yang telah dilakukan KAP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat pelaksanaan: (1) telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris serta penyampaian saran berdasarkan hasil telaahan kepada Direksi; (2) telaahan terhadap seluruh pengaduan yang diterima oleh Dewan Komisaris. Selama 2018 Tidak ada pengaduan. • Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <u>telah</u> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris). <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Belum</u> terdapat rencana kerja Dewan Komisaris tentang pengawasan efektivitas pelaksanaan audit eksternal. • <u>Tidak</u> terdapat penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit internal melalui: (1) telaah atas efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit SPI dan auditor eksternal; (2) telaah atas kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit internal; (3) kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil audit internal; dan (4) telaah rencana kerja pengawasan dan pelaksanaannya; (5) manajemen fungsi SPI. 				

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
63	Dewan Komisaris melaporkan dengan segera kepada RUPS/Pemilik Modal apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat kebijakan dan prosedur: (1) pelaporan kepada RUPS/Pemilik Modal jika terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan; dan (2) mekanisme pemberian saran segera kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan tersebut; (3) mekanisme untuk segera membahas gejala menurunnya kinerja perusahaan. Tertuang dalam Anggaran Dasar PT Sarinah (Persero) pasal 15b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk: 4) Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan. • <u>Telah</u> terdapat gejala menurunnya kinerja perusahaan selama tahun 2018. <p><u>Kelemahan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Belum</u> terdapat mekanisme pemberian saran segera kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan tersebut dan mekanisme untuk segera membahas gejala menurunnya kinerja perusahaan. 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar Dewan Komisaris membuat mekanisme pemberian saran segera kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan tersebut dan mekanisme untuk segera membahas gejala menurunnya kinerja perusahaan. 	1,106	81,25%	0,899

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
18	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan/perusahaan patungan.			1,504	63,50%	0,955
64	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan/ perusahaan patungan dan pelaksanaannya.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> Terdapat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Tertuang dalam GCG Code PT Sarinah (Persero) hal.25 Komisaris Berkewajiban: poin.8 Memberikan nasehat/pengawasan terhadap sistem pengendalian intern, manajemen risiko, sistem teknologi informasi, sumber daya manusia, pengadaan, manajemen mutu, dan pengawasan pengelolaan anak perusahaan. • Telah terdapat proses evaluasi terhadap arah pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan kinerja anak perusahaan/perusahaan patungan terkait dengan visi pengembangan usaha perusahaan, baik melalui proses pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, tertuang di dalam risalah Ragab: Jumat, 23 Maret 2018 terkait Sari Pan Pasific dan Sari Valas. 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar Dewan Komisaris membuat kebijakan dan prosedur peran Dewan Komisaris dalam pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan serta pelaksanaannya. 	0,985	75,00%	0,739

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		<ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris/Dewan Pengawas <u>telah</u> memberikan evaluasi kesesuaian mengenai arah pengelolaan anak perusahaan dan kinerja anak perusahaan terkait dengan visi pengembangan usaha perusahaan. tertuang di dalam risalah Ragab: Jumat, 23 Maret 2018 terkait Sari Pan Pasific dan Sari Valas. Proses evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <u>telah</u> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris). <u>Telah</u> terdapat kualitas yang memadai atas hasil evaluasi terhadap kebijakan dan pengelolaan anak perusahaan. <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Belum</u> terdapat rencana pembahasan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan. 				
	65	Dewan Komisaris berperan dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan /perusahaan patungan.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Penetapan tertulis terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan paling lambat 15 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya calon Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan. Tertuang dalam Surat <p><u>Hambatan:</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Agar Dewan Komisaris membuat kebijakan dan prosedur peran Dewan Komisaris dalam pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak 	0,519	41,67%	0,216

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Dewan Komisaris Nomor: III/DEKOM/II/2018 Februari 2018 Tanggapan atas pengusulan wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota dewan komisaris pada PT Sari Valuta Asing.</p> <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Tidak</u> terdapat kebijakan dan prosedur peran Dewan Komisaris dalam pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan. • Dewan Komisaris/Dewan Pengawas perusahaan <u>belum</u> melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan. 	perusahaan/perusahaan patungan serta pelaksanaannya.			
19	Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolejal), dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.				2,438	92,38%	2,251
66	Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 2018 tidak terdapat pergantian Direksi (N/A). <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar Dewan Komisaris menetapkan kebijakan 	0,502	75,00%	0,376	

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN			
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR	
		ditetapkan.	belum memiliki kebijakan dan kriteria seleksi bagi calon Direksi dan pengusulan calon tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.	dan kriteria seleksi bagi calon Direksi dan pengusulan calon tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal serta pelaksanaannya.			
67	Dewan Komisaris menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai penilaian kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal. Tercantum dalam Board Manual hal.8 Poin 3. • <u>Telah</u> terdapat rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pamantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal. Tertuang dalam Rencana Program Kerja Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) Tahun 2018 poin.c Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi. • Telah terdapat penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara kolegial dengan realisasi pencapaiannya, tertuang di dalam Laporan Tugas Pelaksanaan Dewan Komisaris. • Proses penilaian yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <u>telah</u> menggunakan 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,968	100,00%	0,968	

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		<p>seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris), tertuang di dalam Laporan Tugas Pelaksanaan Dewan Komisaris-Rincian.</p> <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
68	Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengusulan remunerasi Direksi. Tercantum dalam Anggaran Dasar. • <u>Telah</u> terdapat rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menelaah pengusulan remunerasi Direksi. Tertuang dalam Rencana Program Kerja Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) Tahun 2018 poin.o. • Pengusulan tantiem/insentif kinerja mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan perusahaan. terdapat Surat Dewan Komisaris Nomor: 06/DEKOM/IV/2019 tanggal 18 April 2019 Hal : Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT Sarinah (Persero) Tahun Buku 2018 poin. 5 Mengusulkan Penyesuaian Remunerasi Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2019 poin. 6 Mengusulkan pemberian 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap pengusulan remunerasi Direksi yang di tuangkan di dalam risalah rapat internal Dewan Komisaris. 	0,968	93,75%	0,908

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>tantiem.</p> <ul style="list-style-type: none"> Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <u>telah</u> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris). Dewan Komisaris/Dewan Pengawas <u>telah</u> menyampaikan usulan remunerasi (gaji, tunjangan dan fasilitas serta tantiem/insentif kinerja) Direksi kepada RUPS/Pemilik Modal. terdapat Surat Dewan Komisaris Nomor: 06/DEKOM/IV/2019 tanggal 18 April 2019 Hal : Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT Sarinah (Persero) Tahun Buku 2018 poin. 5 Mengusulkan Penyesuaian Remunerasi Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2019 poin. 6 Mengusulkan pemberian tantiem. <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris <u>belum</u> melakukan telaah terhadap pengusulan remunerasi Direksi yang di tuangkan di dalam risalah internal Dewan Komisaris. 				

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
20	Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.			0,571	100,00%	0,571
69	Dewan Komisaris memiliki kebijakan benturan kepentingan dan melaksanakan secara konsisten kebijakan tersebut.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai (potensi) benturan kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Terdapat didalam GCG Code PT Sarinah (Persero) hal.35 poin.7 Benturan Kepentingan. • <u>Telah</u> terdapat pakta integritas Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun, tertera dalam Pakta Integritas Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarinah. • Dewan Komisaris/Dewan Pengawas <u>telah</u> melaporkan kepada perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan tersebut dan perusahaan lain, tertuang di dalam Daftar Khusus Kepemilikan Saham Anggota Komisaris PT Sarinah (Persero). <p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p>	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,571	100,00%	0,571

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
21	Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.			1,659	61,07%	1,013
70	Dewan Komisaris memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat kebijakan/ pedoman Dewan Komisaris untuk memantau penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Tertera dalam GCG Code. • <u>Telah</u> terdapat rencana kerja Dewan Komisaris untuk memantau penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Tertuang dalam Rencana Program Kerja Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) Tahun 2018 poin.e. <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris/Dewan Pengawas <u>belum</u> melakukan telaah terhadap : (1) laporan hasil <i>assessment/review</i> atas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, <i>GCG Code</i> dan kebijakan/ketentuan teknis lainnya, serta memantau tindak lanjut <i>area of improvement</i> hasil <i>assessment</i> GCG oleh Direksi; (2) laporan GCG yang diungkapkan dalam laporan tahunan. • <u>Tidak</u> terdapat penyampaian kepada Direksi mengenai hasil telaah Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar Dewan Komisaris melakukan telaah atas hasil <i>assessment/review</i> atas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, <i>GCG Code</i> dan kebijakan/ketentuan teknis lainnya, serta memantau tindak lanjut <i>area of improvement</i> hasil <i>assessment</i> GCG oleh Direksi. 	0,985	72,92%	0,718

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		<ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris <u>belum</u> menyampaikan kepada Direksi mengenai hasil telaah Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas <u>belum</u> menindaklanjuti <i>area of improvement</i> hasil <i>assessment/review</i> GCG yang menjadi kewenangannya. 				
71	Dewan Komisaris melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris <u>telah</u> memiliki/ menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja beserta target-targetnya, dan disetujui oleh RUPS/Menteri setiap tahun berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan, Penetapan kontrak manajemen Tahun 2018 antara kuasa Pemegang Saham dengan Direksi dan Dewan Komisaris serta <i>Key Performance Indicators</i>. <p><u>Kelemahan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris <u>belum</u> memiliki kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris. Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris <u>belum</u> mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris atau Komite Dewan 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Agar Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris. 	0,674	43,75%	0,295

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		Komisaris <u>belum</u> mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota (individual) Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris.				
22	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri rapat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			1,349	43,58%	0,588
72	Dewan Komisaris memiliki pedoman/tata tertib rapat Dewan Komisaris yang memadai.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris <u>telah</u> memiliki pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris yang memadai tentang Etika rapat. Tertuang dalam GCG Code PT Sarinah (Persero) hal.28 d. Rapat Komisaris. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas <u>telah</u> memiliki pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang memadai tentang Tata penyusunan risalah rapat. Tertuang dalam GCG Code PT Sarinah (Persero) hal.28 d. Rapat Komisaris Tata cara. <p><u>Kelemahan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris <u>belum</u> memiliki pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris yang memadai tentang pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya. <u>Belum</u> terdapat pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Agar Pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris dilengkapi, antara lain mengatur: <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya. Pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi dan Dewan Komisaris. 	0,346	50,00%	0,173

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN			
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR	
			arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi.				
	73	Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggota Dewan Komisaris <u>telah</u> menghadiri rapat-rapat Dewan Komisaris. <p><u>Kelemahan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris <u>tidak</u> memiliki rencana penyelenggaraan rapat internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri Direksi (Rapat Gabungan). • <u>Tidak</u> terdapat surat kuasa yang dibuat oleh anggota Dewan Komisaris yang berhalangan hadir di dalam rapat Komisaris/ Pengawas serta penjelasan ketidakhadiran dalam rapat tersebut, yang dituangkan dalam Risalah Rapat. 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar Dewan Komisaris memiliki rencana penyelenggaraan rapat internal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dihadiri Direksi (Rapat Gabungan), dengan jumlah dan waktu penyelenggaraan rapat sesuai ketentuan yang berlaku. 	0,657	50,00%	0,328
	74	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.	<p><u>Kekuatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Belum</u> terdapat evaluasi Dewan Komisaris atas tindak lanjut hasil rapat internal sebelumnya. • Hasil rapat Dewan Komisaris sebelumnya <u>belum</u> ditindak lanjuti seluruhnya. 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar Dewan Komisaris melakukan evaluasi tindak lanjut hasil rapat internal sebelumnya. 	0,346	25,00%	0,087

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
23	Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris.			2,593	75,67%	1,962
75	Sekretariat Dewan Komisaris memiliki uraian tugas yang jelas.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat uraian tugas bagi Sekretariat Komisaris yang ditetapkan oleh Komisaris Utama. Tertuang dalam RKAP PT Sarinah (Persero) Tahun 2018 hal.31 Sekretariat Dewan Komisaris. • Tugas pokok dan fungsi Sekretaris Dewan Komisaris dalam membantu Dewan Komisaris <u>telah</u> mencakup: Sekretaris Dewan Komisaris melakukan tugas dan kewajiban untuk membantu Dewan Komisaris dalam fungsi kesekretariatan, memastikan tugas-tugas Dewan Komisaris telah dijalankan dan semua informasi yang diperlukan Dewan Komisaris telah tersedia dan tugas lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tugas pokok dan fungsi Sekretaris Dewan Komisaris <u>belum</u> mencakup monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris. 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Komisaris dilengkapi dengan monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris. 	0,804	96,88%	0,779

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
76	Sekretariat Dewan Komisaris melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Sekretaris Dewan Komisaris <u>telah</u> mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk ke Dewan Komisaris, dan dokumen lainnya dengan tertib. <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Sekretaris Dewan Komisaris <u>belum</u> mempunyai fasilitas penyimpanan dokumen Komisaris yang disediakan oleh Perusahaan. 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Agar Perusahaan menyediakan penyimpanan dokumen untuk Sekretaris Dewan Komisaris. 	0,337	62,50%	0,211
77	Sekretaris Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Telah</u> terdapat undangan rapat Dewan Komisaris, yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak-pihak lain yang diundang. Bahan-bahan rapat disediakan dan <u>telah</u> disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum diadakan rapat. <p><u>Kelemahan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Belum</u> terdapat pendokumentasian yang memadai atas hasil rapat Dewan Komisaris. 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Agar Sekretaris Dewan Komisaris membuat Risalah Rapat internal Dewan Komisaris. <p>4.3.1.1</p>	0,959	50,00%	0,480
78	Sekretaris Dewan Komisaris menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Telah</u> terdapat data/informasi yang berkaitan dengan dukungan administrasi dan monitoring atas hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan perusahaan yang 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,493	100,00%	0,493

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		<p>dilakukan oleh Direksi, tertuang di dalam risalah rapat gabungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola perusahaan, tertuang di dalam Laporan Manajemen Triwulan. • Telah terdapat data/informasi yang berkaitan dengan dukungan administrasi dan monitoring yang berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi (N/A) sepanjang tahun 2018. <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
24	Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif.			2,438	75,49%	1,840
79	Dewan Komisaris memiliki komite Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Dewan Komisaris.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Terdapat Komite Audit yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris Nomor SK 02/DEKOM/KEP/XII/2017 28 Desember 2017 a/n Miftah. • <u>Telah</u> terdapat komite lain untuk membantu tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u> -</p>	0,643	100,00%	0,643

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>berdasarkan analisis mengenai kebutuhan untuk mendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan tugasnya yaitu Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko. Terdapat Komite Investasi dan Risiko Usaha Nomor SK 03/DEKOM/KEP/IX/2014 17 September 2104 a/n Teddy Poernama Nomor SK 03/DEKOM/KEP/X/2014 22 Oktober 2014 a/n Sulartono Namun pada 5 November 2018 terdapat Keputusan Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) Nomor: 022/DEKOM/KEP/XI/2018 tentang Pemberhentian Anggota-Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha PT Sarinah (Persero).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua maupun Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan <u>telah</u> dilaporkan kepada RUPS/Pemilik Modal. terdapat Keputusan Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) Nomor: 022/DEKOM/KEP/XI/2018 tentang Pemberhentian Anggota-Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha PT Sarinah (Persero) 5 November 2018 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Kementrian BUMN; 2. Deputi Bidang Usaha Kontruksi dan Sarana dan Prasarana 				

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		<p>Perhubungan.</p> <p>3. Anggota Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero).</p> <p>4. Direksi PT Sarinah (Persero).</p> <ul style="list-style-type: none"> Ketua Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas <u>adalah</u> anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.SK Dewan Komisaris No. 2/DEKOM/KEP/XII/2017. <p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p>				
80	Komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi komite dan independensi dari masing-masing komite Dewan Komisaris.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Salah seorang anggota Komite <u>telah</u> memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang cukup di bidang tugas masing-masing Komite. CV setiap Komite. Anggota Komite <u>telah</u> berasal dari pihak di luar perusahaan dan tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kaitan kepemilikan dan dengan kegiatan usaha perusahaan. Jumlah keanggotaan masing-masing Komite yang berasal dari luar Dewan Komisaris/Pengawas <u>telah</u> sesuai dengan ketentuan yang berlaku. <p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p>	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,487	100,00%	0,487
81	Komite Dewan Komisaris memiliki piagam/charter dan program kerja tahunan.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Muatan Piagam Komite Audit <u>telah</u> sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Muatan piagam Komite 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p>	0,643	45,83%	0,295

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		<p>lainnya sesuai kebutuhan Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> Program kerja tahunan Komite Audit <u>telah</u> : memuat telaah untuk memastikan (1) memastikan efektivitas sistem pengendalian manajemen dan memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta pelaksanaannya; (2) efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan SPI; (3) menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal dan SPI; (4) telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. <p><u>Kelemahan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Piagam Komite Audit <u>Belum</u> ditinjau dan di mutakhirkan secara berkala. Program kerja tahunan Komite Audit <u>belum</u> memuat <i>self-assessment</i> kinerja Komite Lainnya. 	<p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Agar Komite Audit melakukan pemutakhirkan Piagam Komite secara berkala. Agar dalam Program kerja tahunan Komite Audit turut memuat <i>Self-assessment</i> kinerja Komite Audit. 			
82	Komite Audit melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris.	<p><u>Kekuatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Program kerja komite audit <u>belum</u> memuat jumlah pertemuan berkala dan agenda yang dibahas. <u>Belum</u> terdapat Risalah Rapat Komite Dewan Komisaris untuk setiap rapat. 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Agar Risalah Rapat Komite Dewan Komisaris dapat dibuat pada setiap penyelenggaraan rapat. Memuat hasil-hasil analisis, 	0,332	25,00%	0,083

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN			
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR	
			telaahan, dan evaluasi atas acara yang diagendakan, serta risalah asli dari setiap Rapat Komite Dewan Komisaris diserahkan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk disimpan di perusahaan.				
	83	Komite melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Telah terdapat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan penugasan disertai dengan rekomendasi. Telah terdapat laporan triwulanan dan tahunan Komite kepada Dewan Komisaris, memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya. <p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p>	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,332	100,00%	0,332
JUMLAH ASPEK III				35,000	82,62%	28,92	

4.4 ASPEK DIREKSI

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
25	Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.			1,089	100,00%	1,089
84	Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Tidak</u> terdapat pergantian Direksi pada tahun 2018 (N/A). <p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p>	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,467	100,00%	0,467
85	Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Telah</u> terdapat kebijakan tentang pelatihan bagi anggota Direksi sesuai kebutuhan dalam GCG Code PT Sarinah (Persero) hal.40 Tanggung Jawab Umum poin 5. Direksi wajib mengikuti pelatihan/training/workshop yang sesuai dengan bidangnya baik yang diselenggarakan internal perusahaan maupun eksternal. <u>Telah</u> terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi anggota Direksi. Tertuang dalam Action Plan Tahun 2018 PT Sarinah (Persero) 5. Biaya Direksi Seminar Direksi 138,50. <u>Telah</u> terdapat pelatihan bagi anggota Direksi yang direalisasikan sesuai dengan rencana kerja Direksi sesuai Action Plan Program Kerja RKAP 2018 Divisi Sekretariat 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,622	100,00%	0,622

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Perusahaan & Umum. <ul style="list-style-type: none"> <u>Telah</u> terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Direksi tertuang dalam Acara Seminar Direktur Utama pada tahun 2018. <u>Kelemahan</u> -				
26	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.				1,867	75,00%	1,400
86	Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.		<u>Kekuatan</u> <ul style="list-style-type: none"> <u>Telah</u> terdapat struktur organisasi yang dirancang untuk memastikan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Sesuai dengan surat Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 024/KPTS/VI/2018 Lampiran: 1 (satu) Berkas tentang Struktur Organisasi Utama PT Sarinah (Persero). <u>Telah</u> terdapat penetapan oleh Direksi tentang uraian tugas dan tanggungjawab masing-masing anggota Direksi dalam Organisasi, Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 024/KPTS/VI/2018 Lampiran: 1 (satu) Berkas tentang Struktur Organisasi Utama PT Sarinah (Persero) Pasal 7 Tugas, Wewenang 	<u>Hambatan</u> - <u>Rekomendasi</u> -	0,622	100,00%	0,622

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>dan Tanggung Jawab Direksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat penetapan deskripsi dan spesifikasi jabatan serta uraian tugas untuk semua tingkat jabatan di struktur organisasi. Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 024/KPTS/VI/2018Lampiran: 1 (satu) Berkas tentang Struktur Organisasi Utama PT Sarinah (Persero) Uraian tugas sampai dengan Ass. Manger. • <u>Telah</u> terdapat permintaan persetujuan Dewan Komisaris atas struktur organisasi. Hal ini tertuang pada Surat Direksi Nomor: 228/DIREKSI/1/II/2018 Perihal: Struktur Organisasi PT Sarinah (Persero) Jakrta 21 Pebruari 2018 dan Surat Dewan Komisaris Nomor: 4/DEKOM/III/2018 Perihal: Persetujuan Struktur Organisasi PT Sarinah (Persero) Jakarta, 15 Maret 2018. <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
	87	Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional baku (SOP) untuk proses bisnis inti (core business) perusahaan.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat SOP untuk seluruh proses bisnis inti perusahaan sebagai panduan melaksanakan kegiatan perusahaan. Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 031/KPTS/DIREKSI/VI/2010 tentang Sistem dan Prosedur PT 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar Sarinah membuat kebijakan tentang 	0,778	40,00%	0,311

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Sarinah (Persero) ditetapkan di: Jakarta pada tanggal: 30 Juni 2010 Jimmy M. Rifai Gani (Direktur Utama).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat sosialisasi SOP untuk proses bisnis inti perusahaan kepada karyawan yang terkait. Disosialisasikan melalui mailist. • Direksi <u>telah</u> melakukan peninjauan dan penyempurnaan SOP secara berkala. Sudah ada revisi SOP di Adele. <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Tidak</u> terdapat kebijakan tentang pedoman penyusunan SOP di perusahaan. • SOP untuk proses bisnis inti perusahaan <u>belum</u> dilaksanakan konsisten dan tidak terdapat penyimpangan atas prosedur. Hal ini tertuang pada Laporan Hasil Audit terdapat Penyimpangan atas Prosedur. • Direksi <u>belum</u> melakukan peninjauan dan penyempurnaan SOP secara berkala. 	<p>pedoman penyusunan SOP di perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar Sarinah melakukan peninjauan dan penyempurnaan SOP secara berkala. • Perusahaan agar melaksanakan SOP untuk proses bisnis inti secara konsisten. 			
	88	Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan perusahaan (<i>corporate action</i>) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Direksi secara formal, terdiri dari (1) pengambilan keputusan melalui rapat Direksi; (2) pengambilan keputusan diluar rapat (melalui 	<p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,467	100,00%	0,467

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>sirkuler dan lain-lain). Mekanisme pengambilan keputusan tertuang dalam board manual hal.39 3.3.3 Kesegeraan Pengambilan Keputusan Direksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi. Tertuang di dalam Board Manual Sarinah 2016 hal.39 poin 3.3.3 Kesegeraan Pengambilan Keputusan Direksi. • Telah terdapat ketentuan tentang kesegeraan untuk mengkomunikasikan kepada tingkatan organisasi dibawah direksi yang terkait dengan keputusan tersebut, maksimal 7 hari sejak disahkan/ditandatangani. Board Manual Sarinah 2016 hal.39 poin 3.3.3 Kesegeraan Pengambilan Keputusan Direksi. <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
27	Direksi menyusun perencanaan perusahaan.				4,044	97,31%	3,935
89	Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS/Pemilik Modal.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang memadai. Terdapat pada Prosedur Pengelolaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Nomor 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,778	100,00%	0,778	

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Dokumen: PSM/SKD-03 Disetujui oleh Direktur Utama 01-09-14.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat rancangan RJPP yang sesuai dengan pedoman penyusunan RJPP yang ditetapkan. Tertuang pada Rencana Jangka Panjang PT Sarinah (Persero) 2014-2018. • <u>Telah</u> terdapat proses telaah oleh Direksi atas rancangan RJPP yang disusun oleh Tim Penyusun RJPP dan menindaklanjuti/membahas hasil telaahan (tanggapan/pendapat) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas rancangan RJPP. Tertuang dalam notulen rapat BOD Tanggal 7 November 2013. • Direksi <u>telah</u> menyampaikan rancangan RJPP kepada RUPS/Menteri/Pemilik Modal dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan yaitu dalam waktu 60 hari sebelum berakhirnya RJPP periode sebelumnya. • Direksi <u>telah</u> menyosialisasikan dalam RJPP kepada seluruh karyawan perusahaan. <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
	90	Direksi memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p>	0,778	100,00%	0,778

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
RUPS/Menteri/Pemilik Modal.	<p>(RKAP) yang memadai. Terdapat pada Prosedur Prosedur Pengelolaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Nomor Dokumen: PSM/DAK-001 Disetujui oleh Direktur Keu & Adm 01-09-14.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat rancangan RKAP yang sesuai dengan pedoman penyusunan RJPP yang ditetapkan dan rancangan RKAP tersebut merupakan penjabaran tahunan RJPP. Terdapat pada Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Sarinah (Persero) Tahun 2018. • <u>Telah</u> terdapat proses telaah oleh Direksi atas rancangan RKAP yang disusun oleh Tim Penyusun RKAP dan menindaklanjuti/membahas hasil telaahan (tanggapan/pendapat) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas rancangan RKAP tersebut. Dibuktikan dengan RKAP Tahun 2018 PT Sarinah (Persero) 17102017 Pembahasan Dewan Komisaris. • Direksi <u>telah</u> menyampaikan rancangan RKAP kepada RUPS/Menteri/Pemilik Modal dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan yaitu selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sebelum tahun anggaran perusahaan. Hal ini tertuang dalam Surat Nomor: 	<p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>			

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		<p>983/DIREKSI/E/X/2017 Perihal: RKAP PT Sarinah (Persero) Tahun 2018 Jakarta, 24 Oktober 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> Direksi mensosialisasikan RKAP RKAP kepada seluruh GM Divisi tahun 2019. <p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p>				
91	Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam perusahaan.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Telah</u> terdapat kebijakan/pedoman perusahaan mengenai manajemen karir di perusahaan, dan sistem dan prosedur promosi, demosi dan mutasi di perusahaan. Tercantum pada Keputusan Direksi PT Sarinah Nomor: 015/KPTS/DIREKSI/III/2017 tentang Mutasi dan Promosi Karyawan di Lingkungan PT Sarinah (Persero) dan Keputusan Direksi Nomor: 024/KPTS/DIREKSI/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Penggolongan Jabatan (Job Grading) dan Tingkat Pekerjaan (Work Level) berdasarkan Struktur Organisasi PT Sarinah (Persero). Penempatan karyawan pada setiap level jabatan <u>telah</u> sesuai dengan spesifikasi jabatan yang ditetapkan. Terdapat Kompilasi Report dan Klasifikasi karyawan sampai level BOD-2. Direksi <u>telah</u> memiliki database (list) 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan sehingga tidak terdapat jabatan yang kosong. 	1,088	90,00%	0,979

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>tentang orang yang memiliki skill dan kompetensi serta pengalaman yang cukup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditargetkan dapat tersedia di setiap posisi/jabatan-jabatan di perusahaan. Terdapat Kompilasi Report dan Klasifikasi karyawan sampai level BOD-2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan seleksi untuk suksesi/promosi pejabat satu level di bawah Direksi <u>telah</u> sesuai dengan ketentuan melalui proses <i>Assessment</i>. <i>Assessment</i> untuk karyawan dilakukan setiap 2 tahun sekali. • Rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi <u>telah</u> dibahas secara intens dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk kesempatan pemberian arahan terhadap rencana promosi dan mutasi tersebut, terdapat Ada Berita Acara Mutasi yang dibahas di level BOD. • <u>Telah</u> terdapat tingkat obyektivitas dan transparansi yang memadai dalam penempatan karyawan pada setiap level jabatan. Hal ini didukung dengan bukti Hasil <i>Assessment</i> untuk setiap jabatan. <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat Lowong Jabatan. 				

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
92	Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan, penghematan/efisiensi perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat mekanisme bagi Direksi untuk merespon usulan peluang bisnis dari manajemen di bawah Direksi/anggota Direksi/Dewan Komisaris yang tertuang dalam Tertuang di Uraian Jabatan General Manager Divisi Ritel. Tugas Pokok poin f. Menyusun "Business Plan" dalam mengembangkan produk pada Aneka Usaha. • Direksi <u>telah</u> membahas secara intensif untuk: (1) mengidentifikasi peluang bisnis; (2) mengambil keputusan atas usulan tersebut; (setuju atau tidak setuju) yang antara lain ditunjukkan dalam BOD Meeting Rabu, 3 Januari 2018 Pembahasan Marchandise Asian Games. • Direksi <u>telah</u> menyampaikan kepada Dewan Komisaris tentang usulan peluang disertai dengan studi kelayakan dan membahas dengan Dewan Komisaris. • Peluang bisnis Perusahaan yang dibahas dan disampaikan kepada Dewan Komisaris merupakan peluang yang <u>belum terlambat</u> untuk ditindaklanjuti. • Realisasi peluang bisnis <u>telah</u> mampu memberikan manfaat bagi perusahaan sesuai dengan rencana yang dibuat, Realisasi Booth Sarinah untuk Event Asian Games. 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,778	100,00%	0,778

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<u>Kelemahan</u> -				
	93	Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan	<u>Kekuatan</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat mekanisme bagi Direksi untuk sewaktu-waktu segera membahas isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan dalam GCG Code PT Sarinah (Persero) hal.46h. Rapat Direksi. • <u>Telah</u> terdapat pembahasan internal Direksi mengenai isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan. Terkait pembangunan Sarinah Tower II tertuang di dalam risalah BOD Senin, 5 November 2018. • Telah terdapat pembahasan terkait isu-isu terkini mengenai pembangunan Sarinah Tower II tertuang pada risalah Ragab, Selasa 23 Oktober 2018 Pembahasan Rapat: Penyampaian arahan Dewan Komisaris terkait pembangunan Sarinah Tower II. • <u>Tidak</u> terdapat perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak signifikan pada usaha perusahaan dan kinerja 	<u>Hambatan</u> - <u>Rekomendasi</u> -	0,622	100,00%	0,622

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			perusahaan, yang tidak direspon oleh Direksi. <u>Kelemahan</u> -				
28	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.				8,089	89,68%	7,255
94	Direksi melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil keputusan yang diperlukan setelah melalui analisis yang memadai dan tepat waktu.	<u>Kekuatan</u> <ul style="list-style-type: none"> Pada Tahun 2018 tidak terdapat <i>corporate action</i> yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris (N/A). <u>Kelemahan</u> -	<u>Hambatan</u> - <u>Rekomendasi</u> -	0,467	100,00%	0,467	
95	Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif dan transparan.	<u>Kekuatan</u> <ul style="list-style-type: none"> <u>Telah</u> terdapat prosedur operasional standar pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan (struktural) dalam perusahaan. Terdapat dalam <i>Key Performance Indicator</i> contoh dokumen KPI General Manager Divisi Satuan Pengawasan Intern. <u>Telah</u> terdapat penjelasan mengenai Indikator Kinerja, minimal berupa formula/rumus, cara-cara penilaian, informasi sumber data, saat pelaporan, dsb. Terdapat dalam <i>Key Performance Indicator</i> contoh dokumen KPI General Manager Divisi Satuan Pengawasan Intern. 	<u>Hambatan</u> - <u>Rekomendasi</u> <ul style="list-style-type: none"> Agar Sarinah dalam pengukuran kinerja unit dan jabatan dalam organisasi didukung dengan aplikasi komputer. 	0,311	66,67%	0,207	

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat Indikator kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan peran unit dan jabatan (struktural) dalam organisasi. <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
96	Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat target kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi sesuai dengan kapasitas peran dan potensi tugas unit dan jabatan (struktural) didalam organisasi tertuang dalam RKAP PT Sarinah (Persero) 2018 poin.E Sasaran dan Program Kerja Tahun 2018 I. Bisnis Unit. • <u>Telah</u> terdapat kontrak kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi. Terdapat KPI Individu PT Sarinah (Persero). <p><u>Kelemahan</u> -</p>	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u> -</p>	0,155	100,00%	0,155
97	Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat perusahaan.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat laporan berkala pengukuran dan informasi kinerja dari jabatan/unit-unit di bawah Direksi secara berkala dan tepat waktu. Terdapat Laporan manajemen triwulan. 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u> -</p>	0,311	100,00%	0,311

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pembahasan/evaluasi bulanan atas kinerja dari jabatan/unit-unit dibawah Direksi secara berjenjang, tertuang dalam Notulen Rapat MRM Semester I Tahun 2018PT Sarinah (Persero) Rabu, 25 Juli 201816.00 s/d selesai Materi Rapat: Kinerja Divisi Ritel SMTR I 2018. • Direksi menindaklanjuti hasil pembahasan bulanan atas kinerja jabatan/unit di bawah Direksi yang tidak/belum mencapai target yang ditetapkan, tertuang dalam Notulen Rapat MRM Semester I Tahun 2018PT Sarinah (Persero) Rabu, 25 Juli 201816.00 s/d selesai Materi Rapat: Kinerja Divisi Ritel SMTR I 2018. • Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan kinerja jabatan/unit-unit di bawah Direksi, Sudah dilakukan Evaluasi di Laporan manajemen triwulan. <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
98	<p>Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.</p> <p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Direksi <u>telah</u> menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pencapaian kinerja perusahaan berdasarkan target-target kolejal Direksi. Hal ini tertuang dalam tertuang dalam 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada 	0,311	75,00%	0,233

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN			
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR	
	<p>Laporan Manajemen tahun 2018 (Audited).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direksi <u>telah</u> menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris mengenai pencapaian kinerja masing-masing Direktorat berdasarkan target-target dalam Kontrak Manajemen sebagai kinerja masing-masing Direksi tertuang dalam Laporan Manajemen tahun 2018 (Audited). • <u>Telah</u> terdapat tingkat pencapaian target kinerja Direksi dalam KPI Kolegial. <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Direksi <u>belum</u> menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris mengenai pencapaian kinerja masing-masing Direktorat berdasarkan target-target dalam Kontrak Manajemen. • <u>Belum</u> terdapat pencapaian target Kinerja anggota Direksi (individu) dalam KPI Direktorat. 	<p>Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diantaranya membuat laporan pencapaian kinerja individu (Direktorat).</p>				
99	<p>Direksi menyusun dan menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi</p>	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat usulan kepada RUPS/Pemilik Modal yang sudah disetujui Dewan Komisaris tentang insentif kinerja Direksi, sesuai ketentuan yang berlaku. Tertuang dalam terdapat Surat Dewan Komisaris Nomor: 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,156	100,00%	0,156

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>06/DEKOM/IV/2019 tanggal 18 April 2019 Hal : Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT Sarinah (Persero) Tahun Buku 2018 poin. 5 Mengusulkan Penyesuaian Remunerasi Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2019. poin. 6 Mengusulkan pemberian tantiem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penentuan usulan insentif kinerja Direksi <u>telah</u> mencerminkan kesesuaian dengan kinerja yang dicapai (KPI). <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
	100	Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan <u>telah</u> menetapkan <i>Information Technology Master Plan (ITMP)</i> sebagai pedoman dalam pengembangan teknologi informasi. Terdapat dalam dokumen Kegiatan Penyusunan Master Plan Teknologi Informasi PT Sarinah (Persero) 2016-2020. • Arsitektur sistem informasi <u>telah</u> mendesain sampai dengan level data dan sistem keamanannya. 5.6 Kebijakan Umum Tata Kelola dan Keamanan TI. 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar Direksi menetapkan <i>Information Technology Detail Plan (ITDP)</i> sebagai penjabaran lebih lanjut dari ITMP. • Agar Direksi melakukan audit atas TI. 	0,778	72,50%	0,564

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<ul style="list-style-type: none"> Arah penggunaan dan pengadaan teknologi informasi yang digunakan <u>telah</u> direncanakan dengan memperkirakan trend perkembangan teknologi. Hal ini tercantum pada Manual Pengelolaan Teknologi informasi 2. KAJIAN TI 2.2 Trend Industri dan Best Practice 2.3 Arah Strategi TI 2.3.1 Peran TI Perusahaan Kedepan <u>Telah</u> terdapat kebijakan pengelolaan data, prosedur pengelolaan data, dan pelaporan TI, tertuang di dalam SOP IT 2008, pelaporan IT di Laporan Kegiatan bulanan. Penerapan TI di perusahaan <u>telah</u> sesuai dengan masterplan dan disertai dengan perencanaan TI yang matang mencakup sumber daya manusia, struktur organisasi pengelolaan dan tingkat layanan yang diberikan TI. Tertuang dalam Kegiatan Penyusunan Master Plan Teknologi Informasi PT Sarinah (Persero) 2016-2020 sudah mencakup sumber daya manusia, struktur organisasi pengelolaan dan tingkat layanan yang diberikan TI. Tingkat kesesuaian penerapan TI saat ini <u>telah</u> sesuai dengan kebutuhan perusahaan terdapat ERP 				

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>tertuang di Action Plan RKAP PT Sarinah (Persero) Tahun 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat laporan kinerja teknologi yang disampaikan kepada Direktur. • Adanya laporan pelaksanaan sistem TI secara tertulis terkait dengan pelaksanaan IT Master Plan dan ITDP serta disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, baik diminta ataupun tidak diminta, tertuang pada Laporan Manajemen tahun 2018 BAB II Kinerja Perusahaan Tahun 2018. Sistem Manajemen & Sistem Teknologi Informasi. <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan <u>belum</u> menetapkan <i>Information Technology Detail Plan</i> (ITDP) sebagai penjabaran lebih lanjut dari ITMP, yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan atas perencanaan tahunan sesuai ITMP. • Perusahaan <u>belum</u> melakukan audit atas TI. 				
	101	Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan <u>telah</u> memiliki kebijakan mengenai standar pelayanan minimal. Dibuktikan dengan dokumen Prosedur Pelayanan Terhadap Pemilik Counter dan Pengunjung Nomor Dokumen: PSM/OPS-03 Disetujui oleh Direktur 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar Sarinah secara konsisten melakukan sertifikasi atas kebijakan 	0,778	86,67%	0,674

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>Operasional 01-09-14.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan <u>telah</u> memiliki SOP Layanan Pelanggan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dibuktikan dengan dokumen Pedoman Pelayanan bagi Pramuniaga. SOP dan SPM <u>telah</u> diinformasikan secara terbuka, terdapat Form Hasil <i>Screening</i> terhadap Pegawai baru yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> -Bersedia mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman SA dan wajib melaksanakannya. Minimnya keluhan pelanggan terkait pelayanan ditunjukkan dengan minimnya keluhan pelanggan terkait pelayanan. <u>Telah</u> terdapat pedoman Peningkatan mutu (sistem pengendalian mutu produk). Tingkat kualitas yang memadai mengenai kemudahan layanan dan <i>fairness</i>. Perusahaan <u>telah</u> memiliki kebijakan mutu (sistem pengendalian mutu produk). SKD No. 014-6/2018/373 tentang Kebijakan Mutu dan K3L Dan Sasaran Mutu dan K3L. Perusahaan memiliki sertifikasi atas kebijakan mutu, diaplikasikan di anak perusahaan. <p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p>	<p>mutu (sistem pengendalian mutu produk).</p>			

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
102	Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan <u>telah</u> memiliki pedoman pengadaan barang/jasa yang menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, akuntabel; dan memuat hak-hak dan kewajiban pemasok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat dalam Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 019.1/KPTS/DIREKSI/III/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Non Niaga PT Sarinah (Persero). Pedoman/kebijakan pengadaan <u>telah</u> dipublikasikan/dapat diakses pemasok/calon pemasok, Dibagikan pada saat pelaksanaan aanwijzing. Perusahaan <u>telah</u> merencanakan pengadaan barang dan jasa secara optimal berdasarkan perhitungan kebutuhan perusahaan, RKAP Tahun 2018 PT Sarinah (Persero). Pengadaan barang dan jasa perusahaan <u>telah</u> terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan persaingan sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan, contoh dokumen pengadaan 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Agar Perusahaan memastikan SOP pengadaan barang dan jasa dan kebijakan perusahaan telah dijalankan dengan benar. 	0,933	75,00%	0,700

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>Dokumen lengkap mengenai Tim <i>Lelang Project Manajemen Consultant (PMC)</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan <u>telah</u> memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, tertuang di Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Non Niaga PT Sarinah (Persero) hal.8 4. Menyusun dan mengusulkan Harga Perkiraan Sendiri/<i>Owner Estimate (HPS/OE)</i> kepada Direksi. • <u>Tidak</u> terdapat temuan audit baik oleh auditor eksternal dan auditor internal mengenai pengadaan yang merugikan perusahaan dan tidak terdapat sanggahan pemilihan penyedia barang/jasa perusahaan. <i>Management Letter KAP</i> tidak menunjukkan tidak terdapat temuan-temuan audit. • <u>Telah</u> terdapat tingkat transparansi untuk pengadaan barang dan jasa untuk dokumen Yodya Karya. <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan <u>belum</u> memastikan SOP pengadaan barang dan jasa dan kebijakan perusahaan telah dijalankan dengan benar, Berdasarkan konfirmasi Kepala SPI untuk tahun 2018 SPI belum 				

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			melakukan audit untuk Pengadaan baru akan dilakukan di tahun 2019.				
	103	Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian perusahaan.	<p>Kekuatan</p> <p>Pendidikan dan Pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan <u>telah</u> melaksanakan program pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan Laporan Kegiatan Pelatihan Tahun 2018 PT. Sarinah (Persero) total 32 kegiatan. <u>Telah</u> Terdapat evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan, Evaluasi dilakukan 2 tahun sekali oleh pihak independen. <u>Telah</u> terdapat tingkat keadilan yang memadai atas kesempatan pendidikan dan pelatihan karyawan. Sebanyak 9 training diikuti oleh 610 orang mengikuti pelatihan pada tahun 2018. <p>Program pengembangan SDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Telah</u> terdapat program pengembangan SDM melalui training, <i>coaching</i> dan <i>assignment</i> yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat Kompilasi Report dan Klasifikasi Rekomendasi Workshop/Training. Program pengembangan SDM <u>telah</u> dilaksanakan sesuai pedoman/sistem yang ditetapkan. Laporan Kegiatan Pelatihan Tahun 2018 PT. Sarinah (Persero). <u>Telah</u> terdapat Pelaksanaan program 	<p>Hambatan</p> <p>-</p> <p>Rekomendasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Agar Sarinah menetapkan kebijakan/program pendidikan dan pelatihan untuk memberikan peningkatan knowledge, skill dan ability yang dapat digunakan meningkatkan efektivitas kinerja karyawan dan kebijakan evaluasi kinerja pasca pendidikan dan pelatihan untuk mengukur hasil-hasil pendidikan dan pelatihan. 	3,267	96,88%	3,165

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>pengembangan berhasil yang ditunjukkan dengan pencapaian target indikator keberhasilan (ada evaluasi dan kriteria keberhasilannya), Terdapat assessment sampai tingkat D-2 setiap 2 tahun sekali oleh PPM Management, didalamnya memuat klasifikasi (Direkomendasikan atau Tidak Direkomendasikan).</p> <p>Program K3</p> <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan <u>telah</u> memiliki kebijakan perlindungan keselamatan pekerja melalui program K3 yang tertuang dalam Prosedur Standar Penanganan Keadaan Darurat Nomor Dokumen: PSM/Property-01 Disetujui oleh: Direktur Operasional 01-09-14, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Operasi Lift dan Escalator, nama: Januar Hadi Saputra. Jakarta, 06 Mei 2016 dan Sertifikat Pembinaan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, nama: Komarudin. Pelaksanaan program tersebut (ada alat keselamatan kerja, manajemen K3, sertifikasi K3), fasilitas kesehatan di lingkungan kerja, asuransi kesehatan terhadap pekerja dan keluarga, informasi mengenai adanya tingkat bahaya tertentu bagi 				

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>pekerja),</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi peralatan safety (APD) bagi setiap teknisi, seperti: <ul style="list-style-type: none"> -Seragam -Sepatu Safety -Helmet -Safety Belt 2. Memperbaiki dan merawat sarana dan prasarana pendukung K3 di gedung Sarinah: <ul style="list-style-type: none"> -Jalur Evakuasi -Perbaikan Pipa Hydrant -Penggantian pintuk kayu untuk jalur pipe shaft dengan pintu besi 3. Mengikutsertakan karyawan teknik untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan sertifikasi K3 Teknik. <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi, Laporan Foto Kegiatan Unit K3 Sipil & Sanitair Bulan Maret 2018 laporan dibuat setiap bulanan. <p>Sistem Penilaian Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan sistem penilaian kinerja (<i>performance appraisal</i>) telah mencakup sisi kinerja individu dan kompetensi karyawan. Terdapat KPI Individu contoh KPI Divisi: Satuan 				

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>Pengawasan Intern.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat indikator kinerja individu dan target yang ditetapkan bersama oleh karyawan dan atasan langsung terdapat KPI Individu contoh KPI Divisi: Satuan Pengawasan Intern. • Sistem penilaian kinerja (performance appraisal) bagi karyawan <u>telah</u> diterapkan dengan konsisten. Evaluasi KPI Individu setiap setahun sekali. • Hasil penilaian <i>performance appraisal</i> <u>telah</u> dimanfaatkan untuk pengembangan karyawan. • Perusahaan <u>telah</u> memberikan kesempatan yang memadai untuk menduduki posisi tertentu yang sesuai dengan kompetensi. Terdapat hasil assessment sampai dengan D-2 yang akan digunakan sebagai acuan ketika ada jabatan kosong. <p>Remunerasi dan Kesejahteraan</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat kebijakan mengenai remunerasi pekerja. Terdapat dalam Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 044/KPTS/DIREKSI/X/2018 Penyesuaian Kenaikan Gaji Pokok, Tunjangan Kehadiran dan Tunjangan Prestasi Karyawan PT Sarinah (Persero) Tahun 2018. • Kebijakan remunerasi <u>telah</u> ditinjau 				

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>secara komprehensif dan disempurnakan secara berkala dalam periode tertentu. Ditinjau berkala setiap tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan remunerasi dan kesejahteraan <u>telah</u> disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh karyawan. Terdapat Sosialisasi Asuransi Mandiri Inhealth Tahun 2018, daftar hadir dan Foto Acara. • <u>Telah</u> terdapat tingkat keadilan dan tingkat kompetitif skema remunerasi yang diberlakukan perusahaan ditunjukkan dengan adanya Konsultan yang di tunjuk untuk Perumusan Gaji Pokok Karyawan merujuk pada dokumen Surat Perintah Kerja Nomor:08.2/DIREKSI/SPK/E/I/2019 tanggal: 15 Januari 2019. <p>Reward and Punishment</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan <u>telah</u> memiliki kebijakan/program <i>reward</i> dan <i>punishment</i>. Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 013/KPTS/DIREKSI/I/II/2006 tentang Ketentuan Pelanggaran dan Sanksi Bagi Karyawan PT Sarinah (Persero) dan Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 033/KPTS/DIREKSI/I/VII/2018 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Karyawan PT Sarinah (Persero) dengan Masa Bakti 17 				

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>Tahun, 25 Tahun dan 30 Tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat program reward untuk prestasi, baik untuk unit dan individu. Terdapat Lomba karya Inovasi (Unit dan Individu). • Kebijakan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> <u>telah</u> disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh karyawan dalam disosialisasikan melalui email untuk lomba karya tulis. • Penerapan reward dan punishment kepada karyawan <u>telah</u> sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan konsisten dibuktikan dengan Rekap Pemotongan Tunjangan Kehadiran Karyawan PT Sarinah (Persero) Bulan Desember 2018 dan Penghargaan terkait Masa Kerja. • Perusahaan <u>telah</u> memiliki kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang berkaitan dengan perencanaan Perusahaan yang dapat berpengaruh signifikan bagi karyawan/pekerja sebagai perusahaan Tbk. Serikat Pekerja (IKS). • <u>Telah</u> Terdapat media komunikasi atau sistem informasi yang menyediakan kebijakan perusahaan serta dapat diakses oleh seluruh karyawan, terdapat Aplikasi World Client http://mail.sarinah.co.id/WorldClient • Perusahaan <u>telah</u> melaksanakan 				

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>kebijakan keterbukaan informasi tersebut secara konsisten. Aplikasi World Client http://mail.sarinah.co.id/WorldClient.</p> <p><u>Kelemahan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan <u>belum</u> memiliki kebijakan/program pendidikan dan pelatihan untuk memberikan peningkatan knowledge, skill dan ability yang dapat digunakan meningkatkan efektivitas kinerja karyawan dan kebijakan evaluasi kinerja pasca pendidikan dan pelatihan untuk mengukur hasil-hasil pendidikan dan pelatihan. 				
	104	Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (<i>subsidiary governance</i>) dan/atau perusahaan patungan.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Direksi <u>telah</u> menetapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (<i>subsidiary governance</i>) dan perusahaan patungan antara lain mencakup: pengangkatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, penetapan target kinerja dan penilaian kinerja serta insentif bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi tertuang di dalam Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 032/KPTS/DIREKSI/IX/2006 tentang Karyawan PT Sarinah (Persero) yang Ditugaskan Pada Anak Perusahaan Menjadi Direksi, 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,622	100,00%	0,622

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Komisaris maupun Karyawan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat pengangkatan Direksi Dekom pada anak Perusahaan tahun 2018. <u>Telah</u> terdapat penetapan target kinerja dan realisasi kinerja anak perusahaan/perusahaan patungan mendukung kinerja perusahaan. <u>Telah</u> terdapat Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan dan perusahaan patungan berdasarkan formula yang ditetapkan, tertuang di dalam Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 032/KPTS/DIREKSI/IX/2006 tentang Karyawan PT Sarinah (Persero) yang Ditugaskan Pada Anak Perusahaan Menjadi Direksi, Komisaris maupun Karyawan Memutuskan: KEEMPAT. <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
29	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.				3,266	80,96%	2,644
	105	Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Direksi <u>telah</u> menetapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Terdapat dalam Keputusan Direksi PT Sarinah 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u> -</p>	622	100,00%	0,622

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
umum di Indonesia (SAK).	<p>(Persero) Nomor: 047/KPTS/DIREKSI/XI/2014 tentang Kebijakan Akuntansi PT Sarinah (Persero).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan <u>telah</u> diterapkan secara konsisten, tidak ada penyesuaian dan temuan auditor atas pengakuan, pengukuran dan pencatatan serta pembukuan transaksi dan pengungkapan kebijakan akuntansi. Hasil laporan auditor independen Wajar Tanpa Pengecualian. • Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan <u>telah</u> sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan diterbitkan tepat waktu, Mengacu kepada Keputusan Menteri BUMN KEP-211/M-PBUMN/1999 tanggal 24 September 1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. • Hasil opini auditor independen atas penyajian laporan keuangan adalah <u>wajar</u> tanpa pengecualian dalam semua hal material serta kinerja keuangan dan arus kasnya yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Laporan Auditor Independen Bagian Opini. 				

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<u>Kelemahan</u> -				
	106	Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.	<u>Kekuatan</u> <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan <u>telah</u> memiliki kebijakan manajemen risiko yang memuat: kerangka, tahapan pelaksanaan manajemen risiko, pelaporan risiko dan penanganannya, Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Korporat PT Sarinah (Persero) Jakarta, 20 Desember 2013. Direksi <u>telah</u> memiliki fungsi yang bertugas melaksanakan program manajemen risiko, Divisi Hukum dan Manajemen Risiko. <u>Telah</u> terdapat rencana kerja perusahaan untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko, tertuang di dalam RKAP PT Sarinah (Persero) tahun 2018. Divisi Hukum & Manajemen Risiko Program Kerja <ul style="list-style-type: none"> Manajemen Risiko Proses Bisnis (Profile Risiko) Pendampingan survey pembukaan outlet/bisnis baru. Direksi <u>telah</u> melaksanakan program manajemen risiko (program manajemen risiko antara lain mencakup indentifikasi dan penanganan risiko pada proses bisnis (N/A) Karena tidak terdapat aksi korporasi yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris pada tahun 2018. 	<u>Hambatan</u> - <u>Rekomendasi</u> <ul style="list-style-type: none"> Agar Sarinah melakukan sosialisasi Kebijakan manajemen risiko kepada seluruh karyawan perusahaan. Agar Direksi melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. 	1,244	50,00%	0,622

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<u>Kelemahan</u> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan manajemen risiko <u>belum</u> disosialisasikan kepada seluruh karyawan. • Direksi <u>belum</u> menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko tiga bulanan dan/atau sewaktu-waktu jika diminta oleh Dewan Komisaris. 				
	107	Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi dan mengamankan investasi dan aset perusahaan.	<u>Kekuatan</u> <ul style="list-style-type: none"> • Direksi <u>telah</u> menetapkan rancangan sistem pengendalian intern yang mengatur kerangka (<i>framework</i>) pengendalian intern antara lain dengan pendekatan unsur lingkungan pengendalian, pengelolaan risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi dan pemantauan, pelaksanaan dan pelaporannya, tertuang di dalam Piagam Satuan Pengawasan Intern (<i>Internal Audit Charter</i>) PT Sarinah (Persero). • Direksi (Direktur Utama dan Direktur Keuangan) memberi sertifikasi terhadap laporan keuangan tahunan, tertuang di dalam Laporan Tahunan PT Sarinah (Persero) Tahun 2018 hal.365 Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 	<u>Hambatan</u> - <u>Rekomendasi</u> -	0,778	100,00%	0,778

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>Desember 2018 dan 2017 PT Sarinah (Persero).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cascading atas sertifikasi terhadap laporan keuangan kepada tingkatan di bawah Direksi yang menjadi entitas akuntansi dan pelaporan atas laporan keuangannya yang akan dikonsolidasikan, tertuang di dalam Laporan Tahunan PT Sarinah (Persero) Tahun 2018 hal.365 Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 PT Sarinah (Persero). • Perusahaan <u>telah</u> melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas dan tingkat operasional/aktivitas tertuang di dalam Laporan Hasil Audit SPI tahun 2018. • Perusahaan <u>telah</u> menerbitkan internal control report yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - suatu pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara suatu struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai; - suatu penilaian atas efektivitas 				

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan pada akhir tahun buku perusahaan.</p> <p>Tertuang di dalam Laporan Tahunan PT Sarinah (Persero) hal.366 Pernyataan Direksi no 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern PT Sarinah (Persero).</p> <p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p>				
	108	Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK).	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK). Terdapat Matriks Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, dan Pengelolaan Aset PT Sarinah (Persero) Tahun Buku 2008 dan 2009 (s.d Semester I) di Jakarta dan Bandung. • Pelaksanaan tindak lanjut telah dilaporkan Direksi kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. • <u>Telah</u> terdapat progress (tingkat penyelesaian) pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi SPI pada tahun yang bersangkutan dan auditor eksternal, Total temuan 14 sudah di tindak lanjuti 10 dan sisa 4 untuk temuan BPK. 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,622	100,00%	0,622

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		<ul style="list-style-type: none"> Telah terdapat tingkat komitmen yang tinggi dari Direksi dalam menindaklanjuti rekomendasi/temuan audit SPI dan eksternal auditor. <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
30	Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.			0,778	100,00%	0,778
109	Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Telah terdapat fungsi yang mengendalikan dan memastikan kebijakan, keputusan perusahaan, dan seluruh kegiatan perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga. Berdasarkan Konfirmasi Fungsi dijalankan oleh Divisi Hukum dan Manajemen Risiko. Fungsi kepatuhan telah mengikuti perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan akan berlaku bagi perusahaan, terdapat Daftar Peraturan dan Kepatuhan Tahun 2018. 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u> -</p>	156	100,00%	0,156

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<u>Kelemahan</u> -				
	110	Perusahaan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.	<u>Kekuatan</u> <ul style="list-style-type: none"> <u>Telah</u> terdapat kajian hukum (legal opinion) atas rencana tindakan dan permasalahan yang terjadi terkait dengan kesesuaian hukum atau ketentuan yang berlaku, terdapat Pendapat Hukum tentang Keputusan Pejabat Administrasi Pemerintahan dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Kewajiban untuk Mendengarkan Pendapat Warga Masyarakat Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Oleh Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H. Ketua Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia 25 Januari 2018. <u>Telah</u> Terdapat kegiatan evaluasi kajian risiko dan legal (<i>risk and legal review</i>) atas rencana inisiatif bisnis, kebijakan dan rencana kerjasama yang akan dilakukan oleh perusahaan. Terdapat contoh Perjanjian Kerjasama JV tower II/ERP. <u>Telah</u> Terdapat kegiatan/upaya-upaya penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi. Tertuang di dalam Laporan tahunan hal.293 Perkara Penting yang Dihadapi di Tahun 2018. 	<u>Hambatan</u> - <u>Rekomendasi</u> -	622	100,00%	0,622

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Tidak terdapat</u> teguran, tuntutan maupun sanksi kepada perusahaan oleh otoritas/instansi yang berwenang di bidang usaha perusahaan, tertuang di dalam Laporan tahunan hal.293 Perkara Penting yang Dihadapi di Tahun 2018. • Opini Auditor <u>tidak</u> menunjukkan adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang signifikan. Tertuang dalam Laporan Auditor Independen Atas Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan dan Pengendalian Intern PT Sarinah (Persero) Tahun 2018. • Berdasarkan konfirmasi <u>tidak terdapat</u> Unit-unit operasi perusahaan yang memperoleh kinerja merah, merah minus atau hitam dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan. • Seluruh Nota Kesepahaman dan perjanjian yang melibatkan perusahaan dan pihak ketiga <u>telah</u> menggunakan bahasa Indonesia, contoh Perjanjian Kerjasama Impor Sodium Sacharin PT Sarinah (Persero) dengan PT Wihadil Nomor: 021/DIREKSI/Perj./1/2018 dan Nota Kesepahaman antara PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) dengan PT Sarinah (Persero) tentang Kerja sama Joint Marketing & Cross 				

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Selling Product dan/atau JasaNo. PT JIEP: 058/MoU/2018No. PT Sarinah (Persero): 059/DIREKSI/Perj./II/2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Laporan Hasil Audit, <u>Tidak ada</u> sengketa/permasalahan yang terkait dengan transaksi bisnis dengan pihak lain yang belum diselesaikan. Perusahaan <u>tidak</u> sedang menjadi pembicaraan/sorotan oleh publik/pers dalam masalah tertentu. <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
31	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan <i>stakeholders</i> .				689	91,86%	6,145
	111	Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Telah</u> terdapat kebijakan mengenai hak-hak konsumen/pelanggan, kebijakan keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen/pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat dalam Terdapat di <i>Code of Conduct</i> (COC) PT Sarinah (Persero) BAB III Perilaku Etika,11. Etika Perusahaan terhadap Konsumen. <u>Telah</u> terdapat kontak pelanggan untuk menerima umpan balik secara mudah dan mekanisme penanganan keluhan pelanggan melalui https://www.sarinah.co.id/contact- 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u> -</p>	1,244	100,00%	1,244

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>us/ atau PT Sarinah (Persero) Jl. M. H. Thamrin No.11, Tel. (021) 31923008, Fax (021) 319318353.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam https://www.sarinah.co.id/ telah terdapat program untuk mengkomunikasikan informasi produk/layanan. • <u>Telah</u> terdapat prosedur/mechanisme penanganan keluhan pelanggan. Tertuang di dalam Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan Nomor Dokumen: PSM/OPS-02 Disetujui oleh Direktur Operasional 01/09/14. • <u>Telah</u> terdapat kegiatan penyebarluasan/penerusan data keluhan pelanggan kepada pihak-pihak terkait dalam perusahaan, tertuang di dalam Rekap Keluhan Cust. Tahun 2018. • Pihak-pihak terkait dalam perusahaan <u>telah</u> mendefinisikan masalah keluhan pelanggan secara tertulis dan pencarian penyebab permasalahan, serta mengimplementasikan tindakan untuk mengatasi penyebab permasalahan dari keluhan pelanggan. terdapat Rekap Keluhan Cust. Tahun 2018-kolom Status. • Progres kinerja penanganan hak-hak dan keluhan pelanggan <u>telah</u> ditindaklanjuti/ditangani, terdapat dalam terdapat Rekap Keluhan Cust. 				

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>Tahun 2018-kolom Status.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan melaksanakan survei secara sistematis dan dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan/konsumen dan hasil indeks survey kepuasan: dilaksanakan secara berkala. Perusahaan <u>telah</u> melaksanakan survei secara sistematis dan dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan/konsumen dan hasil indeks survey kepuasan: dilaksanakan secara berkala, yaitu setahun sekali. Costumers & Tenant Satisfaction Survey PT Sarinah (Persero) oleh Riset Indonesia. Rekomendasi hasil survei <u>telah</u> ditindaklanjuti/ditangani. Dengan Memberikan pelatihan kepada Sales Assistant. Hasil survey <u>telah</u> menunjukkan tingkat kepuasan yang baik. Terdapat dalam Survei Kepuasan, Hasil Survei meningkat. Hasil survei <u>telah</u> menunjukkan tingkat kepuasan yang baik, <i>Satisfaction Index</i> yang diperoleh sebesar 80%. <p><u>Kelemahan</u> -</p>				

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
112	Pelaksanaan hubungan dengan pemasok.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Seleksi untuk menjadi pemasok perusahaan <u>telah</u> dilakukan berdasarkan persyaratan yang terukur dan jelas, terdapat form Evaluasi untuk pemasok baru. Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis dan administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya <u>telah</u> terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya, contoh Dokumen lengkap mengenai Tim Lelang Project Manajemen Consultant (PMC). Perusahaan <u>telah</u> memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun, contoh Dokumen lengkap mengenai Tim Lelang Project Manajemen Consultant (PMC). Secara berkala perusahaan <u>belum</u> melakukan assessment pemasok berdasarkan pencapaian QCDS (quality, cost, delivey, service), terdapat Form Evaluasi Counter. Berdasarkan konfirmasi <u>Tidak terdapat</u> keterlambatan pembayaran 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Agar Sarinah melakukan survey tingkat kepuasan pemasok. 	0,933	50,00%	0,467

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>kepada pemasok sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian/kontrak.</p> <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Belum</u> terdapat pelaksanaan survei tingkat kepuasan pemasok terhadap perusahaan. • Tidak terdapat keterlambatan pembayaran kepada pemasok sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian/kontrak belum dapat dinilai karena belum melakukan survey kepuasan pemasok. 				
	113	Pelaksanaan hubungan dengan kreditur	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan <u>telah</u> memiliki kebijakan mengenai perlindungan hak dan kepentingan kreditur, antara lain: (1) pemenuhan kewajiban kepada kreditur sesuai perjanjian; (2) pengungkapan informasi secara transparan, akurat dan tepat waktu, baik pada saat permintaan maupun penggunaan pinjaman; (3) covenant yaitu jaminan perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk melindungi kepentingan kreditur. Terdapat dalam <i>Code of Conduct</i> Perusahaan BAB III Perilaku Etika¹². Etika Perusahaan terhadap Kreditur/Penanam Modal. • Perusahaan <u>tidak</u> memiliki kebijakan mengenai manajemen/pengelolaan 	<p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,778	100,00%	0,778

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>penggunaan pinjaman jangka panjang sesuai dengan peruntukannya dan pelunasannya (N/A) karena Sarinah belum pernah melakukan pinjaman jangka panjang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat Kebijakan perusahaan sebagai penjamin (avalist). Terdapat dalam GCG Code PT Sarinah (Persero) hal.21. • <u>Tidak terjadi</u> mismatch dalam penggunaan dan penyediaan dana dari pendapatan operasional yang digunakan untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok hutang jangka panjang (N/A) Sarinah tidak memiliki pinjaman jangka panjang. • Perusahaan <u>telah</u> memberikan informasi yang akurat kepada kreditur sesuai dengan perjanjian, secara lengkap dan tepat waktu, (N/A) Sarinah tidak memiliki pinjaman jangka panjang. • Kreditur perusahaan dibayar tepat waktu/sesuai perjanjian. <u>Tidak terdapat</u> keterlambatan/penundaan pembayaran pinjaman kepada Bank dan kreditur, (N/A) Sarinah tidak memiliki pinjaman jangka panjang. <p><u>Kelemahan</u> -</p>				

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	114	Pelaksanaan kewajiban kepada Negara	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Tidak</u> terdapat keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban perpajakan (SPT Tahunan maupun bulanan), Bukti Penerimaan Elektronik SPT Tahunan PPh Badan Nomor Tanda Terima Elektronik: 55610606448191020811. Tidak terdapat keterlambatan pembayaran kewajiban pajak (PPh karyawan, PPh Badan, PPN masa dan rampung, dan PBB), Bukti Penerimaan Elektronik SPT Masa PPh Pasal 22Masa/Tahun Pajak: 12/2018. <u>Tidak</u> terdapat keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban pada lembaga regulator (N/A) karena bukan Perusahaan di bidang keuangan. <p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p>	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,467	100,00%	0,467
	115	Pelaksanaan hubungan dengan karyawan perusahaan	<p><u>Kekuatan</u></p> <p>Partisipasi Karyawan</p> <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan <u>telah</u> memiliki kebijakan yang mendorong partisipasi karyawan, terdapat Forum Serikat Pekerja dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Sarinah (Persero) dengan Ikatan Karyawan PT Sarinah (Persero) (IKS) 2015-2018. <u>Telah</u> terdapat penyediaan sarana 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	1,089	100,00%	1,089

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>partisipasi, misalnya konsultasi bersama Notulen Rapat MRM Semester I Tahun 2018PT Sarinah (Persero) Rabu, 25 Juli 2018 16.00 s/d selesai Materi Rapat: Kinerja Divisi Ritel SMTR I 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat penetapan jenis kebijakan perusahaan yang harus dikomunikasikan kepada karyawan dan jenis kebijakan yang harus melibatkan karyawan dalam perumusannya yaitu melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Sarinah (Persero) dengan Ikatan Karyawan PT Sarinah (Persero) (IKS) 2015-2018. <p>Pengukuran Kepuasan Karyawan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan <u>telah</u> memiliki kebijakan mengenai metode penilaian untuk mengukur kepuasan karyawan dan melaksanakan survai kepuasan karyawan. Terdapat Internal Memo Nomor: 008/DSDM/IM/I/2019Perihal: Survey Kepuasan Karyawan Kepada: - Seluruh GM - Store Manager Outlet - Mgr. Koord • Pengukuran kepuasan karyawan <u>telah</u> dilakukan secara berkala. • Hasil survei tingkat kepuasan (indeks kepuasan karyawan) tertuang dalam Laporan Singkat dengan nilai Overall 				

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>67,2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat tindakan atau program kerja untuk menindaklanjuti hasil survei kepuasan karyawan, tindak lanjut dari survey Kepuasan Karyawan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional dan Team Building 2019 "Integrate And Enhance Our Capabilities To Achieve Corporate Target". <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
	116	Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan <i>stakeholders</i>	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat mekanisme penanganan keluhan <i>stakeholders</i> (pemasok, karyawan dan lain-lain), terdapat Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan Nomor Dokumen: PSM/OPS-02 Disetujui oleh Direktur Operasional 01/09/14. • Mekanisme keluhan <i>stakeholders</i> <u>telah</u> dilaksanakan secara konsisten dan efektif, tertuang di dalam Rekap Keluhan Cust. Tahun 2018 - kolom Status. • Telah terdapat penyelesaian atas keluhan <i>stakeholders</i> secara tuntas, Rekap Keluhan Cust. Tahun 2018 kolom Status-Sudah ditindak lanjuti semua. <p><u>Kelemahan</u> -</p>	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u> -</p>	0,311	100,00%	0,311

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
117	Upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham secara konsisten dan berkelanjutan.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan <u>telah</u> mampu meningkatkan kinerja perusahaan (sesuai KPI yang ditetapkan) dari tahun-tahun sebelumnya. Laporan Auditor Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati (<i>Key Performance Indicator</i>) PT Sarinah (Persero) Tahun 2018. Perusahaan mampu memenuhi harapan Pemegang Saham melalui pencapaian target. Pertanggung jawaban Laporan Keuangan PT Sarinah (Persero) Tingkat Kesehatan & Key Performance Indicator (KPI) tahun 2018 skor: 91,48 tahun 2017 skor: 60,49. <p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p>	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,311	100,00%	0,311
118	Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasi perusahaan.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Telah</u> terdapat kebijakan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan. Terdapat Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 017/KPTS/DIREKSI/III/2016 tentang Perubahan Lampiran Sistem dan Prosedur PKBL pada surat Keputusan Direksi Nomor: 031/KPTS/DIREKSI/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Sistem dan Prosedur PT Sarinah (Persero) dan Pedoman Prosedur Penyaluran 	<p><u>Hambatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Terdapat</u> tambahan tunggakan pengembalian dana kemitraan yang dipinjamkan kepada usaha kecil. <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	1,556	95,00%	1,478

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Sarinah (Persero) Tahun 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat unit/bagian yang bertugas melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di dalam Bagian PKBL, Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Sarinah (Persero) menurut struktur organisasi berada dibawah Direktorat Direktur Keuangan dan Administrasi sesuai Surat Keputusan (SK) Direksi nomor : 024/KPTS/DIREKSI/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018. • <u>Telah</u> terdapat kebijakan tentang pembinaan usaha kecil. Mengacu ke Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/7/2017Perusahaan memiliki kebijakan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. • Perusahaan <u>telah</u> memiliki indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pengelolaan PKBL atau CSR atau TJSL. Sesuai Permen BUMN No. KEP-100/MBU/2002 Ttg Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. • Perusahaan <u>telah</u> memiliki SOP yang memuat kewajiban perusahaan memastikan bahwa asset-asset dan lokasi usaha serta fasilitas 				

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>perusahaan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, tertuang di dalam Prosedur Standar Penanganan Keadaan Darurat Nomor Dokumen: PSM/PROPERTY-01 Disetujui oleh Direktur Operasional 01-09-14.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat program penanganan keadaan darurat yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan, Terdapat simulasi pemadam kebakaran setiap akhir tahun. • <u>Telah</u> terdapat infrastruktur, baik sebagai <i>early warning system</i> maupun pelaksanaan program keadaan darurat, Terdapat infrastruktur, baik sebagai <i>early warning system</i> maupun pelaksanaan program keadaan darurat seperti APAR, Stiker Muster Point, Stiker Jalur Evakuasi Darurat. • Perusahaan <u>telah</u> memiliki rencana kerja untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan, BAB III Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018. Divisi Sekretariat dan Umum PKBL Bina Lingkungan. • Rencana kerja implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dianggarkan dalam Rencana Kerja 				

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan bukan sebagai distribusi laba. Risalah Rapat Pembahasan RKA PKBL 2018 PT Sarinah (Persero) Tahun 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial <u>telah</u> sesuai dengan rencana yang ditetapkan, tertuang di dalam Laporan Keuangan Program Kemitraan & Bina Lingkungan PT Sarinah (Persero) tahun 2018. • <u>Telah</u> terdapat Persetujuan RUPS terkait Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2017. • Perusahaan <u>telah</u> memiliki rencana kerja untuk untuk melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil. RKA PKBL PT Sarinah (Persero) Tahun 2018. • Rencana kerja implementasi program kemitraan <u>telah</u> dianggarkan dalam RKAP dan bukan sebagai distribusi laba. • Pelaksanaan kegiatan kemitraan <u>telah</u> sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, Laporan Keuangan Program Kemitraan & Bina Lingkungan PT Sarinah (Persero) tahun 2018. • Perusahaan <u>telah</u> menetapkan indikator keberhasilan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, Metode Penilaian Sesuai dengan 				

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/7/2017. <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan <u>telah</u> melakukan evaluasi atas pencapaian indikator keberhasilan dengan target-targetnya, Sudah mencapai target dengan nilai skor maksimal. <u>Kelemahan</u> -				
32	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.				1,089	100,00%	1,089
119	Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan.	<u>Kekuatan</u> <ul style="list-style-type: none"> <u>Telah</u> terdapat mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi Direksi dan pejabat struktural perusahaan yang disebabkan benturan kepentingan. Terdapat dalam Surat Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 057/KPTS/DIREKSI/VIII/2015 tentang Pedoman Benturan Kepentingan. <u>Telah</u> dilakukan sosialisasi kebijakan untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi bagi Direksi dan pejabat struktural perusahaan. <u>Telah</u> terdapat surat pernyataan Direksi tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain, atau 	<u>Hambatan</u> - <u>Rekomendasi</u> -	0,467	100,00%	0,467	

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>golongan dengan kepentingan perusahaan pada awal pengangkatan, Pakta Integritas Direksi PT Sarinah (Persero).</p> <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
	120	Direksi menerapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat Penyampaian laporan kepemilikan Saham pada perusahaan dan perusahaan lainnya kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus. • Direksi <u>telah</u> menandatangani Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS/Pemilik Modal. • <u>Telah</u> terdapat informasi mengenai tingkat kesungguhan Direksi dalam pengambilan keputusan bebas kepentingan pribadi Direksi dan pihak-pihak lainnya. • <u>Tidak ada</u> pelanggaran sehubungan dengan transaksi kesempatan perusahaan (<i>corporate opportunity</i>). • <u>Tidak ada</u> pelanggaran sehubungan dengan transaksi dengan perusahaan yang bersangkutan, baik yang dilaksanakan oleh Direksi pribadi atau secara tidak langsung oleh Direksi 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u> -</p>	0,622	100,00%	0,622

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>melalui anggota keluarganya atau keluarga dekatnya (<i>self dealing</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Tidak ada</u> pelanggaran sehubungan dengan transaksi yang mengandung benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>). • <u>Tidak ada</u> pelanggaran sehubungan dengan transaksi yang dibantu oleh orang dalam (<i>insider information</i>). <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
33	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu.				1,089	100,00%	1,089
121	Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Direksi <u>telah</u> menyampaikan laporan manajemen dan tahunan serta laporan tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham. Laporan kepada Dekom dilaksanakan setiap bulanan, laporan tahunan disusun bersama Direksi dan Dekom. <p>-Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2018 -Laporan Manajemen Semester I Tahun 2018 -Laporan Manajemen S/D Triwulan III Tahun 2018</p>	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u> -</p>	0,622	100,00%	0,622	

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>-Laporan Manajemen Tahun 2018 (Audited)</p> <p>-Laporan Tahunan PT Sarinah (Persero) Tahun 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian laporan manajemen (triwulanan dan tahunan) dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas <u>telah</u> tepat waktu, yakni sebelum batas waktu penyampaian kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal. Laporan kepada Dekom dilaksanakan setiap bulanan. • Direksi <u>telah</u> menyampaikan laporan manajemen triwulanan yang telah ditandatangani seluruh anggota Direksi serta laporan manajemen tahunan dan laporan tahunan yang ditandatangani seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan laporan tahunan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal. • <u>Telah</u> terdapat laporan Manajemen disajikan tiap triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan 4 bulan (april) setelah tahun buku berakhir. Nomor: 1112/DIREKSI/E/X/2018 Perihal: Laporan Manajemen s/d Triwulan III Tahun 2018 Jakarta, 23 Oktober 2018 Nomor: 770/DIREKSI/E/VII/2018 Perihal: Laporan Manajemen Semester I Tahun 2018, Jakarta, 24 Juli 2018, Nomor: 447/DIREKSI/E/IV/2018 Perihal: 				

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2018 Jakarta, 25 April 2018, Nomor: 227/DIREKSI/E/III/2019Perihal: Laporan Manajemen Tahun Buku 2018 (Audited) Jakarta, 4 Maret 2019, Penyampaian RUPS Laporan Tahunan pada tanggal 17 Mei 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat informasi terkait Muatan (<i>content</i>) laporan manajemen triwulanan dan laporan manajemen tahunan lengkap (untuk muatan laporan tahunan parameter tersendiri) minimal sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
	122	Direksi memberikan perlakuan yang sama (fairness) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan <u>telah</u> memberikan informasi (laporan manajemen triwulanan, tengah tahunan, dan tahunan) dengan muatan dan waktu yang sama kepada Pemegang Saham minoritas (N/A) 100% Kepemilikan BUMN. • Perusahaan <u>telah</u> memberikan informasi yang relevan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, -Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2018 -Laporan Manajemen Semester I Tahun 2018 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u> -</p>	0,467	100,00%	0,467

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			-Laporan Manajemen S/D Triwulan III Tahun 2018 -Laporan Manajemen Tahun 2018 (Audited) -Laporan Tahunan PT Sarinah (Persero) Tahun 2018. <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan <u>telah</u> melakukan pemenuhan prinsip perlakuan yang sama dalam pemberian informasi oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham/Pemilik Modal. <u>Kelemahan</u> -				
34	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.				1,556	72,49%	1,128
123	Direksi memiliki pedoman/tata tertib Rapat Direksi, minimal mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Komisaris / Dewan Pengawas.	<u>Kekuatan</u> <ul style="list-style-type: none"> Pedoman/tata tertib Rapat Direksi <u>telah</u> mengatur etika rapat. <u>Kelemahan</u> <ul style="list-style-type: none"> Pedoman/tata tertib Rapat Direksi <u>belum</u> mengatur tata penyusunan risalah rapat dalam Board Manual. <u>Belum</u> terdapat hasil evaluasi rapat sebelumnya. <u>Belum</u> terdapat pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris terkait dengan 	<u>Hambatan</u> - <u>Rekomendasi</u> <ul style="list-style-type: none"> Agar Sarinah melengkapi Pedoman/tata tertib Rapat Direksi, antara lain mengatur: <ul style="list-style-type: none"> Tata penyusunan risalah rapat Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya Pembahasan/telaah 	0,156	25,00%	0,039	

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			usulan Direksi.	atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terkait dengan usulan Direksi.			
	124	Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit sekali dalam setiap bulan.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat rencana Rapat Direksi dan agenda yang dibahas. • Jumlah rapat yang direncanakan <u>telah</u> sesuai dengan kebutuhan, paling sedikit sekali dalam sebulan. • Penyelenggaraan Rapat Direksi <u>telah</u> sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam RKAT. <p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p>	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,467	100,00%	0,467
	125	Anggota Direksi menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat Direksi dan Komisaris, jika tidak dapat hadir yang bersangkutan harus menjelaskan alasan ketidakhadirannya.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat tingkat kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi. • Telah terdapat tingkat kehadiran anggota Direksi dalam Rapat dengan Dewan Komisaris. <p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p>	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,311	100,00%	0,311
	126	Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Di dalam setiap rapat, Direksi <u>telah</u> melakukan evaluasi (pemantauan progress) terhadap pelaksanaan 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p>	0,311	100,00%	0,311

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>keputusan hasil rapat sebelumnya, tertuang di dalam Risalah Rapat BOD.</p> <ul style="list-style-type: none"> Terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya yang belum selesai <u>telah</u> dilakukan pembahasan untuk tindaklanjutnya, tertuang di dalam Risalah Rapat BOD. <p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p>	-			
	127	Direksi menindaklanjuti arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	<p><u>Kekuatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Belum</u> terdapat tindak lanjut atas arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. <u>Belum</u> terdapat tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris. 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Agar Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang tertuang di dalam Risalah Rapat BOD. 	0,311	0,00%	0,000
35	Direksi menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.				1,711	95,04%	1,626
	128	Perusahaan memiliki Piagam Pengawasan Intern yang ditetapkan oleh Direksi.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Telah</u> terdapat Piagam Pengawasan (Internal Audit Charter) yang disepakati dan ditetapkan oleh Direksi, setelah mempertimbangkan saran-saran Dewan Komisaris. Piagam Satuan Pengawas Intern PT Sarinah (Persero) tahun 2017. Muatan Piagam Pengawasan Intern <u>telah</u> menjelaskan: posisi fungsi 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,156	100,00%	0,156

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>Audit Internal dalam organisasi: kewenangan Fungsi Audit Internal untuk mendapatkan akses terhadap semua catatan, personil dan aset perusahaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan menjelaskan ruang lingkup Fungsi Audit Internal. Hal ini tercantum dalam Piagam Satuan Pengawas Intern PT Sarinah (Persero) tahun 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muatan Piagam pengawasan Intern <u>telah</u> memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Bapepam, UU perusahaan dan peraturan pelaksanaannya). 2. Mempertimbangkan Standar Profesional Audit Intern yang dibuat oleh FK-SPI perusahaan dan/atau Konsorsium Organisasi Profesi Audit Intern atau <i>international Professional Practices Framework of Internal Auditing</i>. • Piagam audit <u>telah</u> ditinjau dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan, Piagam Satuan Pengawas Intern PT Sarinah (Persero) tahun 2017. <p><u>Kelemahan</u> -</p>				

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
129	SPI/Fungsi Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Posisi SPI/Fungsi Audit Internal di dalam struktur organisasi <u>telah</u> berada langsung di bawah Direktur Utama, Struktur Organisasi PT Sarinah (Persero). • Berdasarkan konfirmasi Pimpinan Fungsi Audit Internal mempunyai akses langsung melapor hasil kerjanya kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit. • Posisi SPI/Fungsi Audit Internal <u>telah</u> memiliki Rencana Kebutuhan Tenaga Auditor/SDM tertuang di dalam Internal Memo Nomor: 111/DSPI/IM/XI/2018 perihal: Pelaksanaan Audit Outlet Bandara Bali, GWK Bali, Makasar, Palembang dan Medan. • Jumlah tenaga auditor <u>telah</u> mencukupi kebutuhan perusahaan. Kecukupan tenaga auditor dihasilkan dari analisis beban kerja yang dilakukan oleh SPI dan/atau Divisi SDM, ditunjukkan dengan dokumen Internal Memo Nomor: 116.A/DSPI/IM/XIII/2018 Perihal: Laporan Analisis Beban SPI 2018. • <u>Telah</u> terdapat program pengembangan profesi secara berkelanjutan bagi staf auditor internal, baik untuk 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar SPI/Fungsi Audit Internal melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal. • Agar SPI/fungsi Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya dengan memberikan sertifikasi profesi untuk Pimpinan Fungsi Audit Internal dan seluruh anggota staf SPI. 	0,466	89,58%	0,417

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>mempertahankan sertifikasi profesinya maupun mengikutsertakan staf auditor internal dalam pendidikan satuan pengawas internal tahun 2018, terdapat Realisasi Laporan Pendidikan tahun 2018 dan 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat kualitas yang memadai atas profesionalitas personil SPI tertuang di dalam LHA SPI 2018. • Kepala SPI <u>telah</u> menetapkan kebijakan dan prosedur sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan fungsi pengawasan intern, ditunjukkan dengan dokumen Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal SPI dan Kode Etik Satuan Pengawas Intern. • Kepala SPI/Fungsi Audit Internal <u>telah</u> melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal, yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas fungsi pengawasan intern. <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan Fungsi Audit Internal <u>belum</u> memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat (<i>Certified Internal</i> 				

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p><i>Auditor/Qualified Internal Auditor).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> SPI/Fungsi Audit Internal <u>belum</u> melakukan penilaian atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal secara keseluruhan. 				
	130	SPI melaksanakan pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Rencana penugasan (Program Kerja Pengawasan Tahunan) <u>telah</u> disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas cq Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran-saran. Rencana penugasan (Program Kerja Pengawasan Tahunan) <u>telah</u> disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas cq Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran-saran. Fungsi Auditor Internal <u>telah</u> melaksanakan audit sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan, Realisasi Hasil Audit Tahun 2018 Divisi Satuan Pengawas Intern. <u>Telah</u> terdapat Tingkat pencapaian (kinerja) atas target-target dalam PKPT (Jumlah audit dan pelaporan audit.) tertuang di dalam Realisasi Hasil Audit Tahun 2018 Divisi Satuan Pengawas Intern. Penanggung jawab Audit Internal 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Agar dalam penyusunan Kerja Pengawasan Tahunan/PKPT (Rencana Audit Tahunan) dilakukan dengan pendekatan risiko (<i>risk based auditing</i>). 	1,089	96,67%	1,053

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p><u>telah</u> melaporkan hasil kerjanya (penugasan pengawasan intern) kepada Direktur Utama, terdapat Memo Internal Nomor: 129/DSPI/IM/XII/2018 Perihal: Laporan Hasil Audit Divisi Legal dan Manajemen Risiko Th. 2018 Kepada: Direktur Utama Dari: Divisi Satuan Pengawasan Intern.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil penugasan pengawasan intern <u>telah</u> disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas cq Komite Audit, LHA di cc Komite Audit. • SPI <u>telah</u> memberikan rekomendasi (masukan atas prosedur) yang meningkatkan proses Tata Kelola (<i>governance</i>), tertuang di dalam LHA Internal Memo Nomor: 116/DSPI/IM/XII/2018 Perihal: Laporan Hasil Audit Divisi SDM Periode Tahun 2018 Tanggal: 21 Desember 2018 Rekomendasi: Divisi Sumber Daya Manusia segera mengusulkan kepada Manajemen untuk pengisian kekosongan Jabatan. • SPI <u>telah</u> memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan pengendalian intern kepada perusahaan, tertuang di dalam LHA Internal Memo Nomor: 				

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>065/DSPI/IM/VI/2018 Perihal: Laporan Hasil Audit Divisi Perdagangan Periode Tahun 2017/2018 Tanggal: 29 Juni 2018 Saran/Rekomendasi: Pelaksanaan kegiatan ekspor agar sesuai dengan pedoman penerapan manajemen Risiko Korporat sehingga dapat menjadi panduan kerja bagi Divisi perdagangan dalam menjalankan proses bisnisnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SPI <u>telah</u> memberi masukan atas konsistensi hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan dan program dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada manajemen, Teturang di dalm LHA Internal Memo Nomor: 129/DSPI/IM/XII/2018 Tanggal: 31 Desember 2018 Saran: Divisi RM & Legal untuk menjalankan Program kerja seperti yang sudah tertuang dalam Action Plan 2018 Program Kerja RKAP 2018 Divisi hukum & Manajemen Resiko, seperti Profil Resiko yang belum di Tanda Tangani/ Disetujui oleh Dirkeu. • Penanggung jawab Fungsi Audit Internal <u>telah</u> memiliki pedoman untuk memantau tindak-lanjut hasil rekomendasi hasil pengawasan intern dan pengawasan eksternal (BPK, KAP, dll). Tertuang dalam 				

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Laporan Manajemen Triwulan dan Semesteran.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fungsi Audit Internal secara efisien dan efektif <u>telah</u> melaksanakan Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern dan pengawasan eksternal dan mendokumentasikan hasil pemantauan. Penyampaian Laporan Hasil Audit Internal. Tingkat penerapan rekomendasi yang <u>telah</u> disampaikan oleh SPI dapat diterapkan/dijalankan; dan rekomendasi SPI memperbaiki kegiatan operasional di unitnya. <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan/PKPT (Rencana Audit Tahunan) <u>belum</u> dilakukan dengan pendekatan risiko (<i>risk based auditing</i>). 				
36	Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.				1,711	89,90%	1,538
	131	Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Sekretaris perusahaan <u>telah</u> memenuhi kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh perusahaan, berdasarkan dokumen CV Haslinda Triekasari. Sekretaris Perusahaan <u>telah</u> memiliki pengalaman profesional dan 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,466	100,00%	0,466

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>kompetensi yang dimiliki mencakup hukum, pasar modal, manajemen keuangan, dan komunikasi perusahaan. Berdasarkan CV.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posisi Sekretaris Perusahaan dalam struktur organisasi di bawah Direktur Utama, berdasarkan dokumen Struktur Organisasi PT Sarinah (Persero). • Uraian tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan <u>telah</u> mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG; 2. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta; 3. sebagai penghubung (<i>liaison officer</i>); 4. menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan RUPS. 				

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<u>Kelemahan</u> -				
	132	Sekretaris perusahaan menjalankan fungsinya.	<u>Kekuatan</u> Sekretaris Perusahaan memberikan informasi yang materil dan relevan kepada stakeholders. <ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Perusahaan <u>telah</u> mengkoordinasikan penyusunan Laporan Manajemen Triwulan yang akurat dan dapat diandalkan. • Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan <u>telah</u> disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tepat waktu • <u>Telah</u> dilakukan pemutakhiran materi informasi yang disajikan dalam website perusahaan maupun website perusahaan on-line dimutakhirkan secara berkala, https://www.sarinah.co.id/latest-news/. • Sekretaris Perusahaan <u>telah</u> Mengkoordinasikan penyiapan dan penyediaan bahan-bahan untuk “Proses Release” atas setiap pernyataan dalam tingkatan Direksi. • Pelayanan pemberian informasi atas informasi yang dibutuhkan mengenai data atau performance dari perusahaan <u>telah</u> dalam batas-batas yang ditetapkan dalam Protokol Informasi yang ditetapkan perusahaan dan penyampaian laporan-laporan lainnya yang kepada kepada 	<u>Hambatan</u> - <u>Rekomendasi</u> <ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Perusahaan harus memastikan bahwa risalah rapat direksi yang dibuat mencantumkan <i>dissenting opinion</i> (jika ada), dinamika rapat, dan hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya. • Agar Sekretaris Perusahaan membuat Laporan/hasil telaah tingkat kepatuhan perusahaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	1,089	84,13%	0,916

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p><i>stakeholders</i> lainnya <u>telah</u> sesuai peraturan perundang-undangan disampaikan tepat waktu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat tingkat ketepatan waktu yang memadai atas penyampaian laporan-laporan dan informasi relevan lainnya yang disampaikan kepada mereka. <ul style="list-style-type: none"> - Nomor: 1112/DIREKSI/E/X/2018 Perihal: Laporan Manajemen s/d Triwulan III Tahun 2018 Jakarta, 23 Oktober 2018. - Nomor: 770/DIREKSI/E/VII/2018 Perihal: Laporan Manajemen Semester I Tahun 2018 Jakarta, 24 Juli 2018. - Nomor: 447/DIREKSI/E/IV/2018 Perihal: Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2018 Jakarta, 25 April 2018. - Nomor: 227/DIREKSI/E/III/2019 Perihal: Laporan Manajemen Tahun Buku 2018 (Audited) Jakarta, 4 Maret 2019. - Penyampaian RUPS Laporan Tahunan pada tanggal 17 Mei 2019. <p>Sekretaris Perusahaan sebagai pejabat penghubung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Perusahaan <u>telah</u> mengorganisasikan dan mengkoordinasikan Rapat Direksi, Rapat Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, RUPS 				

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>dan Kegiatan lainnya dengan <i>stakeholders</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Perusahaan <u>telah</u> menyusun jadwal dan tahapan kegiatan menjelang RUPS/RUPS dan Rapat Direksi. <p>Sekretaris perusahaan menjalankan fungsi pelaksanaan dan pendokumentasian RUPS dan rapat Direksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Perusahaan <u>telah</u> membuat, memelihara, dan menyimpan Daftar Pemegang Saham. • Risalah RUPS RJPP telah memuat sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS. • Risalah RUPS telah dibuat dalam bentuk Akta Notaris. <p>Sekretaris perusahaan menjalankan fungsi pelaksanaan dan pendokumentasian RUPS dan rapat Direksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Perusahaan <u>telah</u> membuat, memelihara, dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, 100% Kepemilikan BUMN. • Sekretaris Perusahaan <u>telah</u> membuat, memelihara, dan menyimpan Daftar Khusus, Daftar Khusus Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Sarinah (Persero). 				

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Perusahaan <u>telah</u> membuat, memelihara, dan menyimpan Risalah RUPS. • Risalah Rapat Direksi <u>telah</u> dibuat untuk setiap Rapat Direksi. • Risalah rapat <u>telah</u> memuat hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya. • Setiap anggota Direksi <u>telah</u> menerima salinan risalah Rapat Direksi, terlepas apakah anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut. • Validasi risalah rapat <u>telah</u> sesuai dengan tata tertib yang ditetapkan. • Risalah asli dari setiap Rapat Direksi <u>telah</u> disimpan di perusahaan. • Risalah asli dari setiap Rapat Direksi <u>dapat</u> diakses oleh setiap anggota Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi. <p>Sekretaris Perusahaan menyelenggarakan program pengenalan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat kebijakan tentang program pengenalan perusahaan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat. • <u>Telah</u> terdapat program pengenalan bagi Dewan Komisaris. 				

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<ul style="list-style-type: none"> Program pengenalan minimal <u>telah</u> meliputi: (1) pelaksanaan prinsip-prinsip GCG; (2) gambaran mengenai BUMN berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya; (3) keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;(4) keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan. <p>Sekretaris perusahaan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sekretaris perusahaan <u>telah</u> melaporkan laporan yang berkaitan dengan tugasnya secara berkala, dan apabila diminta dapat memberikannya kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, tertuang di KPI Sekretaris Perusahaan. <u>Telah</u> terdapat Laporan/hasil telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. <u>Telah</u> terdapat pengukuran tingkat 				

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>ketepatan waktu yang memadai atas penyampaian laporan-laporan dan informasi relevan lainnya yang disampaikan kepada <i>stakeholders</i>.</p> <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam risalah rapat tersebut <u>belum</u> dicantumkan pula pendapat yang berbeda (<i>dissenting comments</i>) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Direksi. • Risalah Rapat <u>belum</u> mencantumkan jalannya rapat (dinamika rapat). Risalah Rapat Board of Director BoD Meeting. • Risalah rapat <u>belum</u> memuat keputusan rapat sebelumnya. • <u>Belum</u> terdapat laporan/hasil telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. • <u>Belum</u> terdapat laporan/hasil telaah tingkat kepatuhan perusahaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 				
133	<p>Direksi mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.</p> <p><u>Kekuatan</u> Direksi mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> Terdapat evaluasi atas pelaksanaan tugas Sekretaris perusahaan. Terdapat Format Evaluasi Kinerja Sekretaris Perusahaan. • <u>Telah</u> terdapat Capaian program kerja pelaksanaan tugas Sekretaris perusahaan, tertuang di dalam KPI 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u> -</p>	0,156	100,00%	0,156

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Sekretaris Perusahaan. <u>Kelemahan</u> -				
37	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.				2,022	82,05%	1,659
134	Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pemanggilan RUPS <u>telah</u> dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar (N/A) <i>non listed company</i>. Dalam panggilan RUPS <u>telah</u> dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan laporan tahunan <u>telah</u> dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan. Tertuang dalam RUPS Pengesahan Laporan Tahunan dilakukan pada tanggal 17 Mei 2019. <u>Telah</u> terdapat tanggal pengesahan/persetujuan RKAP pada lembar pengesahan/persetujuan RKAP. Lembar Persetujuan Keputusan RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 PT Sarinah (Persero) Jakarta, 29 Desember 2017. 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Agar Melakukan pemanggilan RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan. 	1,089	66,67%	0,726	

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<u>Kelemahan</u> <ul style="list-style-type: none"> Pemanggilan RUPS <u>belum</u> dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. 				
	135	Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.	<u>Kekuatan</u> <ul style="list-style-type: none"> Panggilan untuk RUPS, <u>telah</u> mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau usul itu harus disediakan di kantor Persero sebelum RUPS diselenggarakan, Undangan RUPS Nomor: 477/DIREKSI/E/V/2019 Perihal: Undangan RUPS Laporan Tahunan PT Sarinah (Persero) Tahun Buku 2018 terdapat Agenda RUPS. <u>Telah</u> terdapat metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi yang sedang 	<u>Hambatan</u> - <u>Rekomendasi</u> -	0,933	100,00%	0,933

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>menjabat, khusus dalam RUPS mengenai Laporan Tahunan, tertuang di dalam Risalah Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sarinah Nomor: 59.-</p> <p>Keputusan Agenda 4:</p> <p>-Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), akan ditetapkan sendiri. Dan Surat Kementerian BUMN Nomor: S-516/MBU/D2/05/2019 Perihal: Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) Tahun 2019 31 Mei 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Telah</u> terdapat informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Persero, khusus untuk RUPS Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), tertuang di dalam Risalah Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sarinah Nomor: 04 Ad 1. - Menyetujui Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, untuk selanjutnya dapat disebut juga (RKAP) Tahun 2018. 				

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<ul style="list-style-type: none"> Informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Persero <u>telah</u> dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, Laporan Tahunan PT Sarinah (Persero) Tahun 2018 hal,363 PT Sarinah (Persero) dan Entitas Anak Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut. Penjelasan mengenai hal-hal lain berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung, Undangan RUPS Nomor: 477/DIREKSI/E/V/2019 Perihal: Undangan RUPS Laporan Tahunan PT Sarinah (Persero) Tahun Buku 2018. <u>Telah</u> terdapat penjelasan lengkap dan informasi akurat berkaitan dengan Persero dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sepanjang berhubungan dengan mata acara RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Persero, Surat Undangan RUPS. Mata acara RUPS Tidak ada yang bertentangan dengan kepentingan PT Sarinah (Persero). <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
JUMLAH ASPEK IV			35,000	89,64%	31,37

4.5 PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
38	Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepadastakeholders.			0,435	0,00%	0,000
136	Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting.	<p><u>Kekuatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Kelemahan</u></p> <p>Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Tidak</u> terdapat kebijakan tentang pengendalian informasi perusahaan. 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting. 	0,290	0,00%	0,000
137	Tingkat kepatuhan perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan	<p><u>Kekuatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Kelemahan</u></p> <p>Tingkat kepatuhan perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Belum</u> terdapat tingkat kepatuhan perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan. 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting. 	0,145	0,00%	0,000
39	Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.			2,320	81,54%	1,892
138	Terdapat media untuk	<u>Kekuatan</u>	<u>Hambatan</u>	0,322	33,33%	0,107

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN			
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR	
		<p>penyediaan Informasi Publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan <u>telah</u> memiliki website yang dikelola yaitu: https://www.sarinah.co.id/ <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Belum</u> terdapat pengelolaan website sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan secara konsisten, karena kebijakan belum diperbaharui. 	<p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Dalam pengelolaan website sebaiknya disesuaikan dengan kebijakan pengelolaan website yang ditetapkan secara konsisten. 			
	139	<p>Website perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusahaan.</p>	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Telah</u> terdapat kebijakan yang dipublikasikan, antara lain: Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (<i>GCG Code</i>), <i>Board Manual</i>, Program Pengendalian Gratifikasi, dan Pedoman Perilaku. <u>Telah</u> terdapat informasi penting (selain Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan) yang dipublikasikan, yaitu : Company History, Message from the President Director, Vision & Mission, Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Tenders, Careers, Awards & Certifications, Links & Affiliates, Corporate News, Annual Report. <p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p>	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,572	100,00%	0,572
	140	<p>Perusahaan menyediakan</p>	<p><u>Kekuatan</u></p>	<p><u>Hambatan</u></p>	0,427	50,00%	0,214

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN			
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR	
		media lain untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan <u>telah</u> menyelenggarakan pertemuan/gathering dengan <i>stakeholders</i> (karyawan, media). <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Tidak</u> terdapat Majalah internal bulletin, dan sebagainya. 	-			
			<p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Agar Perusahaan memuat majalah internal bulletin, dan sebagainya. 				
	141	Informasi yang disediakan dalam website Perusahaan dan bumn.go.id dimutakhirkan secara berkala.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Informasi yang disediakan dalam website Perusahaan dan bumn.go.id <u>telah</u> dimutakhirkan secara berkala, Website Perusahaan Update dan portal https://silaba.bumn.go.id/view/laporan. <p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p>	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,427	100,00%	0,427
	142	Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting perusahaan yang disediakan dalam website perusahaan.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Informasi yang dimuat dalam website perusahaan mudah diakses dan diunduh (download). Pada Oktober 2018, Assesor telah berhasil melakukan pengunduhan atas file dokumen Laporan <i>Annual Report</i> dan Pedoman-pedoman perusahaan lainnya pada website www.sarinah.co.id. Permintaan/permohonan untuk memperoleh Informasi Publik <u>dapat</u> dipenuhi oleh perusahaan yang bersangkutan. Selama 2018, terdapat permintaan untuk memperoleh informasi publik dari Kementerian 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,572	100,00%	0,572

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		yang dipenuhi oleh perusahaan berdasarkan konfirmasi. <u>Kelemahan</u> -				
40	Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			3,341	98,77%	3,300
143	Laporan Tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan.	<u>Kekuatan</u> <ul style="list-style-type: none"> <i>Annual Report</i> PT Sarinah (Persero) Tahun 2018 <u>telah</u> memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan yakni: <ol style="list-style-type: none"> <i>Annual Report</i> disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara berdampingan. <i>Annual Report</i> dicetak pada kertas yang berwarna terang agar mudah dibaca dan jelas. <i>Annual Report</i> mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas, yakni terdapat tahun <i>Annual Report</i> dan identitas perusahaan berupa nama perusahaan (bukan nama Grup) di halaman depan (sampul), di samping (yang dicetak dengan huruf yang jelas, mudah terbaca), halaman belakang (sampul) dan identitas perusahaan di setiap halaman. <i>Annual Report</i> <u>telah</u> disajikan dalam 	<u>Hambatan</u> - <u>Rekomendasi</u> -	0,291	100,00%	0,291

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		<p>website milik Perusahaan sendiri dan dapat diunduh informasi di dalamnya yang tersedia.</p> <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
144	Laporan Tahunan memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> PT Sarinah (Persero) bukan <i>listed company</i> sehingga tidak ada pemaparan harga saham PT Sarinah (Persero) bukan <i>listed company</i> sehingga tidak ada pemaparan jumlah obligasi. <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan <u>telah</u> menyajikan informasi keuangan (laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, rasio-rasio keuangan secara umum dan yang relevan dengan industri perusahaan) dalam bentuk perbandingan <u>namun</u> hanya 3 (tiga) tahun buku (hal 13). 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u> Agar konten Laporan Tahunan dilengkapi sesuai dengan ketentuan SK 16, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyajikan informasi keuangan (laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, rasio-rasio keuangan secara umum dan yang relevan dengan industri perusahaan) dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku. 	0,073	91,67%	0,067
145	Laporan Tahunan memuat Laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Laporan Direksi.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Annual Report</i> 2018 <u>telah</u> memuat Laporan Dewan Komisaris yang mencakup: Penilaian kinerja direksi mengenai pengelolaan perusahaan; Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi (hal.49); Komite-komite yang berada dibawah pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (hal 255-267); dan perubahan komposisi 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u> -</p>	0,291	100,00%	0,291

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>Dewan Komisaris (hal 43).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Annual Report 2016 telah</i> memuat Laporan Direksi yang mencakup hal-hal mengenai kinerja perusahaan terkait Kinerja perusahaan mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan (hal.11); Prospek usaha (hal.169); Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang telah dilaksanakan oleh perusahaan (hal.204); Perubahan komposisi direksi (jika ada) tidak terdapat perubahan Direksi di tahun 2018. • <i>Annual Report 2018 telah</i> memuat Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan dimana terdapat tandatangan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta nama dan jabatannya di lembar terpisah (hal.54). <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
146	<p>Laporan Tahunan memuat profil perusahaan secara lengkap</p> <p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Annual Report 2018 telah</i> memuat informasi mengenai nama dan alamat Perusahaan, kode pos, nomor telepon, nomor fax, email, dan website (hal.56). 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u> Agar konten Laporan Tahunan dilengkapi sesuai dengan</p>	0,145	97,66%	0,142

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Annual Report 2018 telah</i> memuat Riwayat singkat perusahaan yang mencakup: tanggal/tahun pendirian, nama dan perubahan nama perusahaan (hal.57). • <i>Annual Report 2018 telah</i> memuat bidang usaha Perusahaan (hal.60). • <i>Annual Report 2018 telah</i> memuat Struktur Organisasi Perusahaan yang dibuat dalam bagan beserta jabatan (hal.66). • <i>Annual Report 2018 telah</i> memuat Visi dan Misi Perusahaan dan anak perusahaan (hal.62). • <i>Annual Report 2018 telah</i> memuat Profil Dewan Komisaris. Profil Dewan Komisaris telah memuat uraian tentang nama, tanggal lahir, jabatan, pendidikan dan pengalaman kerja (hal.68). • <i>Annual Report 2018 telah</i> memuat Profil Direksi. Profil Direksi telah memuat uraian tentang nama, tanggal lahir, jabatan, pendidikan, dan pengalaman kerja (hal.68). • <i>Annual Report 2018 telah</i> memuat Jumlah Karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (hal 101-107). • <i>Annual Report 2018 telah</i> memuat komposisi Pemegang Saham (hal.86). • <i>Annual Report 2018 telah</i> memuat tentang bidang usaha anak perusahaan (hal.85). 	ketentuan SK 16, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> • Struktur Organisasi dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan. 			

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> • <i>Annual Report</i> 2018 <u>telah</u> memuat kronologis pencatatan Saham (tidak berlaku untuk <i>Non listed company</i>); • <i>Annual report</i> <u>telah</u> memuat informasi nama dan alamat Kantor Akuntan Publik beserta <i>fee</i> dan jasa yang diberikan (hal 280). • <i>Annual Report</i> 2018 <u>telah</u> memuat masa berlaku, nama penghargaan dan sertifikasi berskala nasional dan internasional, tahun perolehan, dan badan pemberi penghargaan (hal 26). • <i>Annual Report</i> 2018 <u>telah</u> memuat nama dan alamat kantor anak perusahaan (hal.89). <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur Organisasi <u>belum</u> memuat nama pemangku jabatan. 				
	147	Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Annual Report</i> <u>telah</u> memuat Tinjauan operasi per segmen usaha, memuat uraian mengenai: (1) produksi; (2) penjualan/ pendapatan usaha; (3) profitabilitas; (4) Peningkatan/ penurunan kapasitas produksi untuk masing-masing segmen usaha (NA untuk perusahaan yang tidak mempunyai segmen). (hal 128) • <i>Annual Report</i> 2018 <u>telah</u> memuat Uraian atas Kinerja Keuangan Perusahaan yakni analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja 	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	1,234	100,00 %	1,234

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: (1) aktiva lancar, aktiva tidak lancar, dan jumlah aktiva; (2) kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan jumlah kewajiban; (3) penjualan/pendapatan usaha; (4) beban usaha; (5) laba/rugi bersih (hal 139).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Annual Report telah</i> memuat Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar hutang dan tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan antara lain memuat penjelasan tentang: (1) kemampuan membayar hutang; (2) tingkat kolektibilitas piutang (hal.159). • <i>Annual Report telah</i> memuat Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>), kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>), dan tingkat likuiditas perusahaan (<i>liquidity</i>) antara lain penjelasan atas: (1) struktur modal (<i>capital structure</i>); (2) kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>); (3) tingkat likuiditas perusahaan (<i>liquidity</i>) (hal.162). • <i>Annual Report telah</i> memuat Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (hal.163). • <i>Annual Report telah</i> memuat Bahasan 				

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi (hal.168).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Annual Report telah</i> memuat Uraian tentang komponen-komponen substansial dari pendapatan dan beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan (hal.13). • <i>Annual Report telah</i> memuat laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, maka wajib disertai dengan bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan antara lain dengan, jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru (hal.11). • <i>Annual Report telah</i> memuat bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya (hal.161). • <i>Annual Report telah</i> memuat terkait Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan, termasuk dampaknya terhadap kinerja dan resiko usaha di masa mendatang (hal.168). 				

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Annual Report telah</i> memuat uraian tentang prospek usaha perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya (hal.122). • <i>Annual Report telah</i> memuat uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain meliputi pangsa pasar (hal.173). • <i>Annual Report telah</i> memuat Pernyataan mengenai kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen kas per Saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir, memuat uraian mengenai: (1) besarnya deviden untuk masing-masing tahun; (2) besarnya Payout Ratio (hal.176). • Karena PT Sarinah (Persero) adalah <i>Non-listed company</i> sehingga tidak mencantumkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. • <i>Annual Report telah</i> memuat informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, restrukturisasi hutang/modal, transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sifat transaksi dengan pihak afiliasi (hal 164). • <i>Annual Report telah</i> memaparkan 				

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		<p>uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (hal 182).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Annual Report telah</i> memuat uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (hal 183). <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
148	Laporan Tahunan memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Annual Report 2018 telah</i> memuat Uraian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memuat antara lain: (1). Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewann Pengawas (hal.227); (2) Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (hal.252); (3) Frekuensi pertemuan (hal.241); (4) Tingkat kehadiran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam pertemuan. (hal.241). • <i>Annual Report 2018 telah</i> memuat Uraian Direksi memuat antara lain: (1) Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi (hal.233; (2) Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota direksi, yang meliputi gaji, fasilitas, 	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u> Agar konten Laporan Tahunan dilengkapi sesuai dengan ketentuan SK 16, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komite manajemen risiko belum mencakup Uraian pelaksanaan kegiatan komite pemantauan risiko. • Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen. 	0,944	96,67%	0,913

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>dan/atau tunjangan lain yang diterima dari perusahaan yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan perusahaan yang bersangkutan (hal.252); (3) Frekuensi pertemuan (hal.243); (4) tingkat kehadiran anggota direksi dalam pertemuan (hal.241); (5) Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi direksi (hal.92).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Annual Report 2018 telah</i> memuat uraian Komite Audit mencakup antara lain: (1) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite audit; (2) Uraian tugas dan tanggung jawab; (3) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit; (4) Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit; (5) Independensi anggota komite audit (hal.255). • <i>Annual Report 2018 telah</i> memaparkan terkait Komite nominasi dan remunerasi mencakup antara lain: (1) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan remunerasi; (2) Independensi anggota komite nominasi dan remunerasi; (3) Uraian tugas dan tanggung jawab; (4) Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan remunerasi; (5) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan remunerasi (hal.268). 				

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Annual Report</i> 2018 <u>telah</u> memaparkan terkait Komite manajemen resiko mencakup antara lain: (1) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite pemantauan resiko; (2) Independensi anggota komite pemantauan resiko; (3) Uraian tugas dan tanggung jawab; (4) Uraian pelaksanaan kegiatan komite pemantauan resiko; (5) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite pemantauan resiko (hal.263). • <i>Annual Report</i> 2018 <u>telah</u> memuat uraian mengenai nama dan uraian pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan serta laporan pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan (hal.268). • <i>Annual Report</i> <u>telah</u> memaparkan terkait Uraian mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern (<i>internal audit and control</i>) (hal.274-279). • <i>Annual Report</i> 2018 <u>telah</u> memuat uraian tentang Unit Audit internal (Satuan Pengawas Intern) mencakup antara lain: (1) Informasi tentang keberadaan Unit Audit Internal; (2) Penjelasan tentang Piagam Audit Internal; (3) Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal; (4)Uraian pelaksanaan kegiatan Unit Audit Internal; (5) Nama 				

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>dan riwayat hidup singkat kepala Unit Audit Internal (hal.274).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Annual Report 2018 telah</i> memuat uraian mengenai manajemen risiko yang memuat uraian mengenai risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan (hal.282). • <i>Annual Report telah</i> memaparkan terkait Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai “community development program” yang telah dilakukan, mencakup antara lain informasi tentang: (1) Mitra Usaha binaan Perusahaan; (2) Program pengembangan pendidikan; (3) Program perbaikan kesehatan; (4) Program pengembangan seni budaya; (5) Biaya yang telah dikeluarkan (hal.339). • <i>Annual Report 2018 telah</i> mengungkapkan Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai “community development program” yang telah dilakukan, mencakup antara lain informasi tentang: (1) Mitra Usaha binaan Perusahaan; (2) Program pengembangan pendidikan; (3) Program perbaikan kesehatan; (4) Program pengembangan seni budaya; (5) Biaya yang telah dikeluarkan 				

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<p>(hal.334).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Annual Report</i> 2018 <u>telah</u> mengungkapkan Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama aktivitas lingkungan, mencakup antara lain informasi tentang (1) Aktivitas pelestarian lingkungan (2) Aktivitas pengelolaan lingkungan; (3) sertifikasi atas pengelolaan lingkungan; (4) Biaya yang telah dikeluarkan (hal.321-532). • <i>Annual Report</i> 2018 <u>telah</u> mengungkapkan perkara penting yang dihadapi Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris yang sedang menjabat dimana tidak terdapat kasus perkara hukum selama tahun 2018 (hal.293). • <i>Annual Report</i> 2018 <u>telah</u> mengungkapkan Akses informasi dan data perusahaan, yaitu uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website, media massa, mailing list, bulletin dsb https://www.sarinah.co.id/company-profile/corporate-news/. • <i>Annual Report</i> 2018 <u>telah</u> mengungkapkan Etika Perusahaan memuat uraian antara lain: (1) Keberadaan Pedoman Perilaku ; (2) Isi Pedoman Perilaku; (3) penyebaran 				

INDIKATOR / PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Pedoman Perilaku kepada karyawan dan upaya penegakannya; (4) pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki perusahaan (hal.294).</p> <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Komite manajemen risiko <u>belum</u> mencakup Uraian pelaksanaan kegiatan komite pemantauan risiko. • <u>Belum</u> terdapat uraian pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen. 				
	149	Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Annual Report 2018 telah</i> memuat Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan Bapepam (hal.54). • <i>Annual Report 2018 telah</i> memuat Opini akuntan atas laporan keuangan adalah wajar tanpa pengecualian (WTP). • <i>Annual Report 2018 telah</i> memuat Deskripsi Auditor Independen di Opini antara lain: (1) Nama & tanda tangan; (2) Tanggal Laporan Audit; (3) No. ijin KAP (hal.368). • <i>Annual Report 2018 telah</i> memuat Laporan keuangan yang lengkap, yaitu: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan serta disajikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir 		0,363	100,00%	0,363

INDIKATOR / PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		<p>atau sejak usaha dimulai bagi perusahaan yang memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun buku (hal.369).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Annual Report 2018 telah</i> memuat Penyajian laporan keuangan sesuai ketentuan Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang diterbitkan Bapepam & LK dan/atau institusi yang berwenang (hal.368). <p><u>Kelemahan</u> -</p> 				
41	Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.			2,904	62,50%	1,815
150	Perusahaan mengikuti Annual Report Award (ARA).	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Sarinah (Persero) <i>telah</i> mengikuti <i>Annual Report Award (ARA)</i> berdasarkan Sertifikat bukti Peserta Annual Report Award 2018. • Hingga asesor menilai Assessment ini belum terdapat pengumuman pemenang ARA 2018. <p><u>Kelemahan</u> -</p>	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u> -</p>	1,452	75,00%	1,089
151	Perusahaan memperoleh penghargaan atau award lainnya.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan berpartisipasi dan memperoleh penghargaan dalam CSR (Sustainability Reporting Award) (N/A). <p><u>Kelemahan</u></p>	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar Perusahaan dapat 	1,452	50,00%	0,726

INDIKATOR / PARAMETER	ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
			BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan <u>tidak</u> mendapat penghargaan lain di bidang publikasi dan keterbukaan informasi pada tahun 2018. 	berpartisipasi dalam ajang award bidang publikasi dan keterbukaan informasi. 4.3.1.2			
JUMLAH ASPEK V			9,000	77,85%	7,01

DAFTAR USULAN REKOMENDASI

HASIL PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG DI PT SARINAH (PERSERO)

TAHUN BUKU 2018

No.	USULAN REKOMENDASI	Penanggungjawab Tindak Lanjut					
		PEMEGANG SAHAM	DEWAN KOMISARIS	DIREKSI	Sekper	SPI	Fungsi Terkait
1	Agar Perusahaan meninjau dan memutakhirkan secara berkala atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku (COC).			✓			
2	Agar seluruh Karyawan menandatangani secara berkala pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku.			✓			GCG
3	Agar dalam proses induction (pengenalan) bagi karyawan baru memasukkan materi Pedoman Perilaku dan peraturan teknis/pedoman pelaksanaan.			✓			SDM
4	Agar Perusahaan melakukan Evaluasi (review), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di perusahaan dengan menindak lanjuti AOI tahun sebelumnya.			✓			GCG
5	Agar dilakukan perbaikan pengukuran peningkatan pemahaman terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku oleh Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan karyawan perusahaan.			✓			GCG
6	Agar dilakukan perbaikan pengukuran peningkatan pemahaman Dewan Komisaris Direksi dan karyawan terhadap kebijakan			✓			GCG 2018

	Pengendalian Gratifikasi.						
7	Agar di dalam Kebijakan/ketentuan tentang gratifikasi memuat Komitmen Dewan Komisaris serta sanksi atas penyimpangan ketentuan gratifikasi.			✓			GCG
8	Agar dilakukan kegiatan sosialisasi atas kebijakan <i>whistle blowing system</i> kepada <i>stakeholders</i> perusahaan, terutama untuk pihak eksternal.			✓			GCG
9	Agar dilakukan pengukuran pemahaman terhadap kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan karyawan perusahaan.			✓			GCG
10	Agar Perusahaan mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi memuat pengelolaan gratifikasi, pelaporan serta peninjauan dan penyempurnaan berkala terhadap perangkat pendukung.			✓			GCG
11	Agar di dalam Kebijakan/ketentuan mengenai pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (<i>whistle blowing system</i>) memuat Kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran dan Infrastruktur WBS.			✓			GCG
12	Agar terdapat sarana/media perusahaan yang mudah diakses oleh pihak eksternal stakeholder untuk mendukung pelaksanaan kebijakan <i>whistle blowing system</i> .			✓	✓		
13	Agar pelaporan atas pelaksanaan kebijakan terkait pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (<i>whistle blowing system</i>) dapat dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.			✓	✓		
14	Agar RUPS/Pemilik Modal menetapkan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen	✓					

	paling sedikit 20% dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara eksplisit dalam keputusan pengangkatannya.						
15	Agar RUPS/Pemilik Modal dalam pengesahan Kontrak Manajemen tidak hanya target kinerja kolegiat namun memuat target kinerja (Individu) Direksi.	✓					
16	Agar Perusahaan membuat kebijakan terkait pelatihan bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		✓				
17	Agar dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris memuat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana Kerja membahas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau RUPS/Pemilik Modal. ▪ Rencana Kerja tentang pengawasan efektivitas pelaksanaan audit eksternal. ▪ Rencana Kerja pembahasan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan. 		✓				
18	Agar Dewan Komisaris melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit internal melalui: (1) telaah atas efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit SPI (2) telaah atas kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit internal; (3) kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil audit internal; dan (4) telaah rencana kerja pengawasan dan pelaksanaannya; (5) manajemen fungsi SPI.		✓				
19	Agar Dewan Komisaris membuat kebijakan dan prosedur peran Dewan Komisaris dalam pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan serta		✓				

	pelaksanaanya.						
20	Agar Dewan Komisaris menetapkan kebijakan dan kriteria seleksi bagi calon Direksi dan pengusulan calon tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal serta pelaksanaanya.		✓				
21	Agar Dewan Komisaris melakukan telaah atas hasil assessment/review atas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, GCG Code dan kebijakan/ketentuan teknis lainnya, serta memantau tindak lanjut area of improvement hasil assessment GCG oleh Direksi.		✓				
22	Agar Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris.		✓				
23	Agar Pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris dilengkapi, antara lain mengatur: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya ▪ Pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi dan Dewan Komisaris 		✓				
24	Agar Dewan Komisaris memiliki rencana penyelenggaraan rapat internal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dihadiri Direksi (Rapat Gabungan), dengan jumlah dan waktu penyelenggaraan rapat sesuai ketentuan yang berlaku.		✓				
25	Agar Sekretaris Dewan Komisaris membuat Risalah Rapat internal Dewan Komisaris.		✓				

26	Agar Komite Audit melakukan pemutakhiran Piagam Komite secara berkala.		✓				
27	Agar dalam Program kerja tahunan Komite Audit turut memuat <i>Self-assessment</i> kinerja Komite Audit.		✓				
28	Agar Risalah Rapat Komite Dewan Komisaris dapat dibuat pada setiap penyelenggaraan rapat. Memuat hasil-hasil analisis, telaahan, dan evaluasi atas acara yang diagendakan, serta risalah asli dari setiap Rapat Komite Dewan Komisaris diserahkan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk disimpan di perusahaan.		✓				
29	Agar Sarinah membuat kebijakan tentang pedoman penyusunan SOP di perusahaan.			✓			
30	Agar Sarinah melakukan peninjauan dan penyempurnaan SOP secara berkala.			✓			
31	Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan sehingga tidak terdapat jabatan yang kosong.			✓			SDM
32	Agar Sarinah dalam pengukuran kinerja unit dan jabatan dalam organisasi didukung dengan aplikasi komputer.			✓			IT
33	Agar Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diantaranya membuat laporan pencapaian kinerja individu (Direktorat).			✓			
34	Agar Direksi menetapkan Information Technology Detail Plan (ITDP) sebagai penjabaran lebih lanjut dari ITMP.			✓			IT
35	Agar Direksi melakukan audit atas TI.			✓			IT

36	Agar Sarinah secara konsisten melakukan sertifikasi atas kebijakan mutu (sistem pengendalian mutu produk).			✓			
37	Agar Sarinah menetapkan kebijakan/program pendidikan dan pelatihan untuk memberikan peningkatan knowledge, skill dan ability yang dapat digunakan meningkatkan efektivitas kinerja karyawan dan kebijakan evaluasi kinerja pasca pendidikan dan pelatihan untuk mengukur hasil-hasil pendidikan dan pelatihan.			✓			
38	Agar Sarinah melakukan sosialisasi Kebijakan manajemen risiko kepada seluruh karyawan perusahaan.			✓			
39	Agar Direksi melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.			✓			
40	Agar Sarinah melakukan survey tingkat kepuasan pemasok.			✓			
41	Agar Sarinah melengkapi Pedoman/tata tertib Rapat Direksi, antara lain mengatur: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tata penyusunan risalah rapat ▪ Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya ▪ Pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terkait dengan usulan Direksi. 			✓			
42	Agar Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang tertuang di dalam Risalah Rapat BOD.				✓		
43	Agar SPI/Fungsi Audit Internal melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal.					✓	

44	Agar dalam penyusunan Kerja Pengawasan Tahunan/PKPT (Rencana Audit Tahunan) dilakukan dengan pendekatan risiko (<i>risk based auditing</i>).					✓	
45	Agar SPI/fungsi Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya dengan memberikan sertifikasi profesi untuk Pimpinan Fungsi Audit Internal dan seluruh anggota staf SPI.					✓	
46	Sekretaris Perusahaan harus memastikan bahwa risalah rapat direksi yang dibuat mencantumkan dissenting opinion (jika ada), dinamika rapat, dan hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya.					✓	
47	Agar Sekretaris Perusahaan membuat Laporan/hasil telaah tingkat kepatuhan perusahaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.					✓	
48	Agar Melakukan pemanggilan RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan.					✓	
49	Agar Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting.					✓	
50	Agar Perusahaan menetapkan kebijakan tentang pengelolaan dan pemutakhirkan website.					✓	
51	Agar konten Laporan Tahunan dilengkapi sesuai dengan ketentuan SK 16, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> ▪ menyajikan informasi keuangan (laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, rasio-rasio keuangan secara umum dan yang relevan dengan industri perusahaan) dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku. ▪ Struktur Organisasi dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan. ▪ Komite manajemen risiko belum mencakup Uraian pelaksanaan kegiatan komite pemantauan risiko. ▪ Pembentukan Pusat Pengaduan 					✓	

	Konsumen.						
52	Agar Perusahaan dapat berpartisipasi dalam ajang award bidang publikasi dan keterbukaan informasi.				✓		

DAFTAR CAPAIAN PENERAPAN GCG PER INDIKATOR

TAHUN BUKU 2018

No.	INDIKATOR	JML PARAMETER	BOBOT INDIKATOR	CAPAIAN TH. 2018	
				SKOR	CAPAIAN (%)
I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN (7%)					
1	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan pedoman perilaku (code of conduct).	2	1,2180	0,914	75,00%
2	Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.	2	1,2170	0,932	76,55%
3	Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	2	0,6080	0,532	87,50%
4	Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).	3	1,3700	1,370	100,00%
5	Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.	3	1,3700	0,723	52,76%
6	Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (<i>whistle blowing system</i>).	3	1,2170	0,424	34,87%
	Jumlah I	15	7,000	4,894	69,92%
II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL (9%)					
7	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi .	6	2,423	2,423	100,00%

8	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	5	1,731	1,644	94,99%
9	RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	3	1,385	1,385	100,00%
10	RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	6	2,077	2,012	96,88%
11	RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.	2	0,519	0,519	100,00%
12	Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.	3	0,865	0,865	100,00%
	Jumlah II	25	9,000	8,848	98,32%
III. DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS (35%)					
13	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.	2	1,348	1,123	83,33%
14	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas dan menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung	4	2,127	2,094	98,45%

	pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.				
15	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.	2	2,904	2,904	100,00%
16	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	9	9,593	8,492	88,52%
17	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	6	6,479	5,123	79,07%
18	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.	2	1,504	0,955	63,50%
19	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolejal) dan mengusulkan tantiem/ insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.	3	2,437	2,251	92,38%
20	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.	1	0,571	0,571	100,00%
21	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.	2	1,659	1,013	61,07%
22	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyeleng-garakan rapat Dewan	3	1,348	0,588	43,58%

	Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri rapat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.				
23	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	4	2,593	1,962	75,67%
24	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif.	5	2,437	1,840	75,49%
	Jumlah III	43	35,000	28,916	82,62%
IV. DIREKSI (35%)					
25	Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.	2	1,089	1,089	100,00%
26	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.	3	1,867	1,400	75,00%
27	Direksi menyusun perencanaan perusahaan.	5	4,044	3,935	97,31%
28	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.	11	8,089	7,255	89,68%
29	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	4	3,266	2,644	80,96%
30	Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.	2	0,778	0,778	100,00%
31	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan	8	6,689	6,145	91,86%

	stakeholders.				
32	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.	2	1,089	1,089	100,00%
33	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu.	2	1,089	1,089	100,00%
34	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	5	1,556	1,128	72,49%
35	Direksi menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.	3	1,711	1,626	95,04%
36	Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.	3	1,711	1,538	89,90%
37	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.	2	2,022	1,659	82,05%
	Jumlah IV	52	35,000	31,375	89,64%
V. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI (9%)					
38	Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada stakeholders.	2	0,435	-	0,00%
39	Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.	5	2,320	1,892	81,54%

40	Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	7	3,341	3,300	98,77%
41	Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.	2	2,904	1,815	62,50%
	Jumlah V	16	9,000	7,007	77,85%
	Jumlah I + II + III + IV + V	151	95,000	81,041	85,31%
VI. ASPEK LAINNYA (5%)					
42	Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau <i>benchmark</i> bagi perusahaan perusahaan lainnya di Indonesia;	1	5,000	-	0,00%
43	Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pedoman Umum <i>Good Corporate Governance</i> Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.	1	(5,000)	-	0,00%
	Jumlah VI	2	5,00	-	0,00%
	Jumlah I + II + III + IV + V + VI	153	100,00	81,04	81,04%



PT DINAMIKA PASIFIK SOLUSINDO

Operational Office:

Jl. Raya Lenteng Agung No.41, Jagakarsa,
Jakarta Selatan, Indonesia 12610

Phone : (021) 27804641

Website : www.dpsconsulting.co.id